

Welhendri Azwar, Ph.D

SOSIOLOGI DAKWAH



Sosiologi Dakwah

Welhendri Azwar, Ph.D

Editor

Nurus Shalihin

Desain Isi

Lelo Legowo

Desain Sampul

Kaoem Koesam Syndicate (KKs)

Hak pengarang dilindungi undang-undang

All right reserved

Cetakan I, November 2014

Diterbitkan oleh

Imam Bonjol Press

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat

Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923

Email : ib_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Welhendri Azwar, Ph.D

Sosiologi Dakwah/ Welhendri Azwar, Ph.D;

Padang: Imam Bonjol Press, 2014.

vi + 185 hlm.; 15 x 23 cm.

ISBN 978-979-1389-60-0

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan taufik serta limpahan karunia dan petunjuk-Nya, alhamdulillah penulisan buku ini dapat diselesaikan dan disempurnakan.

Melihat dakwah dengan kaca mata sosiologi dapat dimaknai dalam dua pengertian, yaitu sosiologi sebagai alat analisis dan sosiologi sebagai pendekatan dakwah. Sebagai analisis, sosiologi digunakan untuk membaca berbagai realitas sebagai akibat dari aktivitas dakwah. Bagaimana dakwah dimaknai oleh masyarakat dan bagaimana dakwah berpengaruh kepada kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam. Pada konteks ini beberapa perspektif teori sosiologi digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang muncul akibat dari adanya aktivitas dakwah. Dan sebagai pendekatan, sosiologi berguna untuk memahami masyarakat sebagai objek dakwah. Dengan pendekatan sosiologi, *da'i* dapat mengenal *mad'u*-nya, yang kemudian dengan itu dapat menentukan materi, metode dan media yang tepat.

Dengan hadirnya buku ini, ucapan terima kasih sepatutnya penulis sampaikan kepada Dr. Alkhendra, M.Ag., Drs. Yurisman, M.Ag., dengan pikiran-pikiran cerdasnya menjadi inspirasi bagi penulis untuk melahirkan buku sosiologi dakwah ini. Kepedulian mereka terhadap keberadaan dakwah, secara akademik saintifik dan praktis, selalu membuka wacana perdebatan yang asyik dan menggelitik. Terkhusus dalam kajian-kajian dakwah dan problematikanya. Juga kepada Muhammad Jamil, M.A. dan

Muliono, S.Sos.I., yang dengan komitmen, kegigihan dan kesabarannya menyimak dan menterjemahkan pikiran-pikiran penulis. Kepada Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol Padang, yang memberi dorongan dan peluang untuk terbitnya buku Sosiologi Dakwah ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya akademisi dan praktisi dakwah. Dan, sebagai hasil pemikiran tentu ada saja titik lemah buku ini, untuk itu terbuka ruang segala kritik dalam upaya penyempurnaan. Semoga Allah SWT memberkahi segala upaya kita, dan bernilai pahala yang berlipat di sisi-Nya. Amin.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Mengenal Dakwah	7
2.1. Hakikat Dakwah	9
2.2. Tujuan Dakwah.....	11
2.3. Prinsip-Prinsip Dakwah.....	19
BAB III Sosiologi; Pengenalan Singkat	27
3.1. Cabang-Cabang Sosiologi.....	28
3.2. Beberapa Perspektif Teori dalam Sosiologi....	31
3.3. Paradigma Sosiologi	55
BAB IV Dakwah Dalam Interpretasi Sosiologi	59
4.1. Dakwah Sebagai Lembaga Sosial	62
4.2. Dakwah Sebagai Proses Sosial	73
4.3. Dakwah dalam Dinamika Sosial.....	87
4.4. Dakwah Sebagai Sistem Sosial	93
4.5. Dakwah Dalam Konteks Kebudayaan	97

BAB V Dakwah Dan Gerakan Sosial	105
5.1. Gerakan Sosial; Sekilas Pemahaman.....	106
5.2. Beberapa Bentuk Gerakan Sosial.....	115
5.3. Islam dalam Terma Gerakan Sosial	120
5.4. Dakwah Sufistik; Satu Alternatif Gerakan Dakwah	132
5.5. Kebudayaan Ketuhanan; Tujuan Hakiki Gerakan Dakwah.....	142
BAB VI Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat.....	151
6.1. Apa Itu Pemberdayaan?	151
6.2. Dakwah Komunitas; Pemberdayaan Umat Dalam Perspektif.....	158
6.3. Aktualisasi Dakwah Pemberdayaan	161
6.4. Pola Dakwah Pemberdayaan	164
BAB VI Penutup.....	171
Daftar Pustaka	173
Tentang Penulis	183

BAB I

PENDAHULUAN

Kegersangan moral merupakan topik hangat yang senantiasa asik untuk dibincangkan, membahasnya melelahkan namun selalu memikat untuk dinikmati, berwacana teori menggunakan berbagai perspektif untuk menganalisis serta mengulas dengan muatan gagasan positif bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam lingkungan masyarakat. Ada banyak tokoh penggagas perubahan membawa perbaikan dan mengembalikan manusia kepada *track* yang seharusnya dijalani. Juga banyak tokoh mengabdikan diri pada kekerdilan pikiran, melakukan gerakan dehumanisasi, menikmati kekuasaan tanpa batas, berkincah di dunia kebahagiaan yang mencekam sebagai artikulasi “kekalutan mental” yang kehilangan orientasi. Apalagi mengingat kebenaran memiliki banyak mazhab untuk dianut, maka banyak interpretasi sesuai alur yang diinginkan yang tidak jarang membuka pintu abstrak yang berakhir tanpa solusi.

Turbulensi sosial sebagaimana disebutkan merupakan diskursus yang mengharapakan secercah cahaya penunjuk arah jalan mana yang tepat untuk dilalui. Diskursus itu ialah wacana dakwah sebagai wadah untuk mendekatkan semua yang tidak dapat dijangkau oleh alam pemikiran dan tindakan. Karena itu dakwah juga merupakan satu dari tindakan sosial yang takkan habis untuk dikaji dalam wadah

apapun, seiring dengan berkembangnya manusia pemilik karakter berbeda di tengah proses sosial masyarakat.

Secara sadar atau tidak, disaat manusia terlahir sebenarnya ia telah masuk ke dalam sebuah “penjara” dengan segenap belenggunya yang mengekang baik secara individu maupun secara kolektif dalam bentuk masyarakat. Belenggu itu berupa penjara aturan dimana manusia tidak bisa keluar darinya. Bermula dari aturan yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat, menuntut untuk bertingkah sebagaimana sistem nilai yang berlaku. Bagi anggota masyarakat yang menghindari dari jalur sistem nilai yang telah disepakati sejak lama akan dikatakan sebagai penyimpangan atau tindakan non-konformis.

Tidak asing untuk ditemui dalam masyarakat, perilaku menyimpang sebagai ungkapan naluriah manusia yang disebut Khaldun (dalam Susan, 2009) sebagai unsur kebinatangan yang cenderung mengedepankan nafsu melakukan keinginan tanpa kontrol dan cenderung melakukan tindak pelanggaran dari nilai yang ada. Hal ini tidak terlepas dari jasa iblis, setan beserta pasukannya menstimuli setiap insan yang terlahir yang dalam bahasa Tuhan sebagai khalifah (QS.2: 30) di muka bumi. Iblis dan juga pasukannya mempunyai misi besar untuk berhasil memecahkan manusia dari yang seharusnya tak dijalani. Namun, semakin banyak manusia yang melakukan penyimpangan akan berbanding lurus dengan wahana gerakan penyeruan untuk kebaikan dan pengembalian manusia dari jalan yang menyimpang. Gerakan tersebut ialah gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak terciptanya masyarakat dunia.

Dakwah menjadi solusi satu-satunya yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Namun, seiring perkembangan zaman dari masa tradisional ke modern – postmodern dan diantara keduanya yaitu masa transisi akan menimbulkan fenomena masalah yang cukup kompleks untuk diperbaiki. Apalagi dalam konteks kekinian,

arus globalisasi yang dimotori oleh Barat sebagai kaum yang tidak pro terhadap Islam menjadi sebuah tantangan tersendiri dakwah. Walau demikian, dakwah harus tetap ada untuk bertahan dan memperjuangkan kembali tentang makna hakiki kehidupan.

Dakwah dalam konteks dahulu mungkin saja berbeda dengan sekarang meskipun substansi masalah yang berotasi dalam dunia sosial masyarakat sama. Kemandulan dakwah dalam konteks kekinian merupakan bias dari kealfaan “khalifah bumi” untuk berpedoman dari prinsip yang telah digariskan. Tidak jarang pada saat sekarang ditemukan dakwah hanya sebagai ritual dan rutinitas belaka. Tidak memberi pengaruh apapun dalam memperbaiki manusia baik dari sisi individu maupun sisi kolektifnya dalam masyarakat. Fenomena dakwah yang terdengar lucu untuk era sekarang. Betapa tidak, dakwah yang diemban para Nabi beserta sahabat diwaktu lalu merupakan gelora semangat berkobar merubah dan memperbaiki, *ika bina en pabolo*, berdasarkan asas keikhlasan, keridhaan dan kerinduan bertemu dengan *Rabb* pemilik semua alam smesta. Meskipun para Nabi dan sahabat pada waktu itu harus rela bermandikan keringat, air mata dan tetesan darah hingga sampai titik terakhir mengembuskan nafas panjang kehidupan yang cukup menawarkan khayalan palsu dan sesaat.

Dibanding dengan fenomena dakwah kekinian, tempat-tempat majelis ilmu hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan melepas kepenatan karena banyaknya kerja rumah tangga. Bahkan berjalan paralel dengan mereka yang mengklaim dirinya sebagai penerus rasul menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dakwah hanya sebagai proyek, proyek popularitas dan proyek kekayaan. Sangat aneh terdengar ketika da'i menentukan tarif untuk bertabligh, da'i eksis sebagai selebritis, dan da'i kondang sebagai penghibur umat. Karena itulah perlu interpretasi lebih dan lebih interpretatif mengenai makna dakwah. Dakwah bukan hanya milik mereka yang berstatus ahli di

bidang ilmu dakwah sehingga yang lain dianggap “bercanda” jika menggunakan perspektif lain dalam menganalisis dakwah. Dakwah sangat universal prinsipnya sebagai wujud dari ajaran yang tersirat dan tersurat yang dikandungnya. Oleh karena itu dakwah sangat terbuka dan sangat *legowo* untuk dikaji dengan berbagai bidang ilmu apapun, termasuk melalui analisis dan perspektif sosiologi. Dan, sebagai bagian dari kajian sosiologi agama, yaitu kajian sosiologis tentang dinamika masyarakat beragama, maka sosiologi dakwah menawarkan studi dan analisis tentang berbagai proses dan dinamika aktivitas dakwah pada masyarakat muslim. Studi yang dilakukan pada kajian sosiologi dakwah ialah, beberapa pendekatan analisis teoritis yang dapat dilakukan berkaitan dengan beberapa fenomena yang muncul dalam aktivitas dakwah. Dan, atau beberapa konsep teoritis yang dapat digunakan dalam “berdakwah” .

Buku ini muncul dan hadir dihadapan pembaca sebagai hasil diskusi dan perdebatan di “palanta” akademis yang menyisakan banyak “duel paradigma” mengenai kehadiran kompleksitas kajian dakwah. Berawal dari diskusi panjang meluruskan apa yang seharusnya, dan dari apa yang terjadi, serta didukung dengan beberapa personil akhirnya buku ini hadir, dan diharapkan akan menjadi salah satu bahan kajian lanjutan untuk studi sosiologi dakwah berikut, meskipun buku ini tidak hanya untuk menjawab persoalan itu. Terlebih, diharapkan, buku ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diketahui isinya oleh “masyarakat dakwah”.

Buku ini juga hadir sebagai sebuah jawaban munculnya kegelisahan dan kegersangan di tengah belantara intelektual yang cenderung keceplosan dalam memaknai dakwah. Terkadang para pengkaji ilmu dakwah terlihat agak kesulitan membedakan antara berbagai kajian dakwah, baik ilmu dakwah, filsafat dakwah, metode dakwah, teologi dakwah maupun perangkat-perangkat ilmu dakwah lainnya. Bahkan untuk kajian metodologi dakwah. Banyak

terdengar, antara satu dengan yang lain dikaji dan di bahas dalam interpretasi dan penjelasan yang terlihat tidak berbeda. Sehingga disisi lain dakwah telah berhasil untuk gagal mengenali dirinya. Dakwah cenderung difahami normatif dan tidak boleh keluar dari kotak paradigma pendahulu. Seharusnya tidak. Dakwah mesti bisa dimaknai lebih luas secara komprehensif dengan berbagai perspektif. Kalaulah dakwah merupakan ilmu (sains), maka semestinya dakwah tidak menutup diri untuk dikaji dan “ditelanjangi” dengan berbagai perspektif metodologi ilmu. Dakwah sebagai ilmu pengetahuan akan semakin berdiri kokoh, pabila setiap saat diguncang dengan arus perdebatan dialektik medologi ilmu pengetahuan. Meminjam istilah Kant, suatu ilmu harus mengalami krisis untuk sampai pada “keangkuhannya” sebagai ilmu. Maka ilmu dakwah, ketika sudah melalui proses perdebatan yang terbebas dari sifat-sifat “rezim intelektual”-nya, akan berdiri dengan angkuh menantang perdebatan kaum intelektual dalam pertarungan akademik. Inilah impian, yang mudah-mudahan akan terwujud, menuju lahirnya dahwah sebagai ilmu dengan konsep metodologisnya yang kuat dan kokoh.

Sosiologi dakwah merupakan salah satu perspektif untuk menganalisis dakwah dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Kehadiran buku ini sangat penting untuk merangkaian mozaik pemahaman bagaimana sejatinya dakwah, karena ia ada untuk masyarakat. Masyarakat ada hingga saat ini karena dakwah dan dakwah juga eksis hingga sekarang ini karena masyarakat. Keduanya berbanding lurus. Esensi dakwah merupakan transformasi nilai ketuhanan kepada manusia dengan satu tujuan memutus rantai “kebahagiaan yang mecekam” dalam dinamika dunia masyarakat kemudian menggantinya dengan wajah baru berupa “kebudayaan ketuhanan” yang hadir menjadi dinamika dalam proses sosial kehidupan masyarakat.✽

BAB II

MENGENALI DAKWAH

Memaknai pengertian kebudayaan yang dinyatakan oleh Taylor (dalam Prasetya, 2009) *as a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired by man as a member of society* atau sebagai suatu kesatuan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat, maka proses dakwah merupakan upaya pengislamisasian kesemua unsur tersebut. Karenanya, dakwah memerlukan waktu yang panjang, dan dalam proses yang panjang tersebut akan menemui banyak rintangan dan tantangan, penuh onak dan duri sebab yang akan dirubah bukanlah benda mati melainkan sebuah kompleksitas dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang telah mengakar pada paradigma dan kepribadian masyarakat yang sudah berkebudayaan.

Secara lebih rinci dapat dipahami dari pengertian dakwah, yang secara etimologis memiliki akar kata دعا , يدعو , دعوة , jumlahnya lebih kurang sebanyak 198 ayat dan tersebar pada beberapa surat, dengan makna yang berbeda-beda diantaranya memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendo'akan, menangisi, dan meratapi (Aziz, 2009; Sulthon, 2003; Amin, 2009).

Terlepas dari keumuman makna etimologis dakwah, yang disoroti dalam kajian ini adalah, bahwa kata dakwah mengandung makna menyeru, memanggil dan mengajak kepada kondisi yang lebih baik, yang dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 5 kali kata دعا , sebanyak 8 kali kata يدعو dan sebanyak 4 kali kata دعوة (Enskilopedia Islam, 1992).

Fathi Yakan (dalam Rosada & Dkk, 2007) mendefenisikan dakwah sebagai proses penghancuran kejahiliah dengan segala bentuknya, baik jahiliah pada pola pikir maupun pada moral, kemudian pembinaan masyarakat yang bertumpu pada dimensi keyakinan dan tata cara hidup yang berlandaskan pada nilai Islam. Mahfudz (dalam Hardy, 2005) mendefenisikan bahwa dakwah ialah:

حَسُّ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْهُدَى، الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ
عَنِ الْمُنْكَارِ لِيَفُوزَ بِشَعْدَةِ الْعَا جِلِّ وَالْآ جِلِّ

Mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk atau mengikuti ajaran agama, menyeru kepada yang ma'ruf mencegah perbuatan yang mungkar agar mendapatkan kesenangan hidup di dunia dan di akhirat.

Syekh Muhammad al-Rawi (dalam Aziz, 2009) mengartikan dakwah sebagai pedoman hidup yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak dan kewajibannya. Sementara Imam Al-Gazali mendefenisikan dakwah sebagai program sempurna yang menghimpun segenap pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia di semua bidang, agar ia dapat memahami tujuan hidupnya, serta menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkannya menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dengan demikian, dakwah merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, melibatkan proses transformasi dan perubahan yang sasaran utamanya ialah terbentuknya suatu tatanan sistem sosial masyarakat

yang harmonis di tengah keberagaman yang ada, dibubuhi dengan kesejahteraan hidup yang terbingkai dalam satu nilai, yaitu “Islam”. Atau dengan kata lain, dakwah juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terukur dan terencana dalam upaya mendekatkan manusia kepada jalan kebajikan dan hidayah Tuhan dalam sebuah proses yang panjang melalui berbagai cara dan pendekatan agar kehidupan mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.

2.1. Hakikat Dakwah

Tidak sedikit orang memberikan penjelasan hakikat dan tujuan dakwah menjadi satu bagian yang membuat kita ambigu untuk memaknai mana hakikat dan mana tujuan. Bahkan hakikat dicampur-adukkan menjadi tujuan sehingga keduanya menjadi sama, padahal sesungguhnya tidak. Maka dalam buku ini penulis memisahkan antara hakikat dan tujuan dakwah demi memberikan secerach pemahaman agar terlepas dari belenggu kegalauan tersebut.

Kata hakikat berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-haqiqah* (الحقيقة)” yang berarti “sesungguhnya, sebenarnya, senyatanya, kenyataan, dan kebenaran. Seakar dengan kata *al-haq*, *realty*, dan *absolute*. Karena hakikat adalah kebenaran yang sebenarnya atau absolut, maka yang punya otoritas kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya itu ialah Dzat yang maha benar yaitu Tuhan. Maka hakikat arahnya vertikal, ke atas, atau kepada Tuhan. Oleh karenanya, hakikat dapat diberi arti sebagai makna terdalam dari suatu praktek dan petunjuk yang ada atau sebagai yang esensial dari segala sesuatu atau kebenaran. Makna hakikat menunjukkan kebenaran esoterik yang merupakan batas dari transendensi manusia dan teologis. Hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syari’at.

Oleh karenanya, jika berbicara soal hakikat maka yang menjadi sandarannya harus mengarah kepada Tuhan. Demikian juga dalam pembahasan hakikat dakwah, aktivitas dakwah harus dilihat kepada pandangan sumbernya bahwa Tuhan membutuhkan dakwah untuk mengkomunikasikan gagasan-Nya tentang kehidupan. Dalam beberapa literatur hadis qudsi dan juga ayat al-Qur`an tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa Tuhan butuh terhadap manusia, karena itu Ia menciptakannya. Tuhan membutuhkan manusia untuk mengenal-Nya. Sehingga esensi dakwah, ialah bahwa Dia yang berdakwah agar manusia dapat tunduk dan mengenalinya sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur`an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (adz-Dzariyat: 56)

Namun “ketidakmampuan” Tuhan untuk menyampaikan secara detil kepada manusia tentang apa yang Ia ingini, diutuslah orang-orang pilihan, *great individualist*, yang dapat menangkap serta memahami makna bahasa di balik tirai kelaziman yang ada sebagai penyambung pesan Tuhan untuk ditransformasikan kepada masyarakat bumi. Manusia hanya sebagai perwakilan. Mewakili Tuhan merinci dan mengelaborasi pesan-Nya dalam bahasa manusia. Tuhan mengharapkan adanya khalifah dan kemudian Ia ciptakan sebagai penjabar dan penyampung lidah.

Alqur`an yang diturunkan dari *lauh mahfudz* melalui malaikat Jibril untuk seluruh masyarakat dunia hanya sebagai *platform*, dan tidak akan dapat merubah apapun jika tidak dieksplorasi oleh manusia dan disampaikan pula dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan level pemahaman manusia. Karena itu dakwah hanya mendekatkan hidayah Allah kepada manusia. Hidayah yang sifatnya hakiki ditransfer oleh pendakwah kedalam bahasa manusia. Dalam perkataan lain mentransformasikan hidayah kepada masyarakat

sehingga mereka menjadi orang yang bijak dalam memahami simbol ilahiyah, dan dengan itu masyarakat (manusia) dapat menangkap hidayah tersebut. Kata selaras sebagai rumusannya ialah bahwa hakikat dakwah merupakan proses dialektik antara hidayah dengan aktivitas manusia dalam proses dakwah. Artinya, hakikat dakwah ialah mendekatkan manusia kepada hidayah Allah, manakala orientasinya pada objek. Dan jika orientasinya pada materi, maka hakikat dakwah ialah memudahkan pemahaman firman-firman Tuhan atau pesan-pesan Allah kedalam bahasa manusia. Sifatnya lebih kepada penstransformasian pesan Tuhan kepada kehidupan nyata manusia.

Oleh karena dakwah merupakan aktivitas “di bumi” yang memiliki dataran yang tidak rata, berbukit, lurah bahkan jurang yang sangat dalam, maka dakwah mesti dimaknai dalam “ketidak dataran bumi” ini. Dakwah yang menggunakan bahasa bumi, yang dinamis inklusif.

2.2. Tujuan Dakwah

Salah satu faktor kesuksesan dakwah ialah adanya kerja terarah dan berkesinambungan sebab *the main mission of dakwah* ialah melakukan perubahan, mencerdaskan, dan membuka cakrawala berpikir masyarakat. Upaya untuk mewujudkan perubahan tersebut, pertama yang mesti diketahui dengan baik ialah objek yang akan didakwahi, yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama serta memiliki tujuan yang sama. Keberhasilan dakwah bersandar pada perubahan masyarakat. Oleh karenanya, misi pokok dakwah ialah bagaimana membentuk manusia berkepribadian islam.

Sebagai sebuah proses, aktivitas dakwah yang diemban oleh para Nabi semenjak adanya manusia di muka bumi ini memiliki makna fundamental yang terisirat dan tersurat dalam ayat-ayat

dakwah untuk mengeluarkan manusia secara individu dan secara kolektif sebagai sebuah masyarakat agar terlepas dari satu pola *false consciousness* yang memuja dan mengagungkan sesuatu yang tidak berdaya dan *irrational* kepada *real consciousness* sebagaimana sejatinya manusia yang berafiliasi kepada jalan Allah atau cahaya islam. Sebagaimana pendapat Salafus Shaleh (dalam Basayev, 2004) dengan merujuk pada ayat:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“... Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (al-Baqarah: 256).

Memaknai ayat tersebut, Salafus Soleh menyatakan bahwa dakwah ialah keluarnya manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya islam, meninggalkan thagut dan beriman kepada Allah dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan. Sejalan dengan ini pula, dapatlah diklasifikasikan dalam dakwah ada tiga terma yang melekat padanya yaitu kebebasan, rasionalitas dan universalitas.

Istilah kebebasan bermakna bahwa kerja dakwah bukanlah sebuah pemaksaan. Dalam artian terbebas dari ancaman dan intervensi dalam menyampaikan gagasan konsep nilai-nilai agama yang tertera dalam kitab suci al-qur'an. Sementara rasionalitas menekankan bahwa dakwah merupakan upaya mengajak untuk menggunakan segenap pikiran masyarakat (*mad'u*) memikirkan tentang gejala alam dan fenomena sosial untuk dijadikan sebagai basis ideologi dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim disaat menghancurkan berhala pada masa kerajaan Namrud.

Secara sosiologis, penolakan dan tindakan tegas dengan menghancurkan berhala-berhala yang dilakukan Nabi Ibrahim

bukan dilatarbelakangi akan ketidaksukaannya terhadap patung, melainkan berangkat dari akhir perenungan panjang yang mendalam dan muara dari perjalanan intelektualnya memaknai sesuatu yang tidak masuk akal. Disaat kaumnya berikut juga dengan Raja Namrud mengunjungi suatu perayaan besar di tempat lain, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan menyisakan satu patung yang paling besar sembari mengalungkan kapak di lehernya.

Ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, hal yang menarik adalah ungkapan Nabi Ibrahim yang menyatakan bahwa biang keladi yang punya kerja memporak-porandakan Tuhan mereka hingga berkeping-keping adalah Patung besar yang di bagian lehernya terdapat sebuah kapak. Spontanitas Namrud dan kaumnya kembali kepada kesadaran mereka yang sesungguhnya sebagaimana sejatinya manusia (*real consciousness*) sembari mengungkapkan kerasionalan berpikirnya akan ketidakmungkinan patung tersebut untuk melakukannya. Jangankan menghancurkan patung, memegang kapak saja patung itu tidak mampu, ia hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apapun¹.

Proses dialog Ibrahim bisa ditilik dan ditelaah pada awal dialognya yang bermula dari lingkungan terdekat yaitu keluarganya sebagaimana yang tertera pada ayat berikut:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ
وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, «Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata (Al-An'am: 74).

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai *Azar*, apakah ia ayah atau paman Nabi Ibrahim sebagaimana yang diurai dalam tafsir

1. Kisah ini dapat dilihat dan dimaknai lebih lanjut dalam Qs. Al-Anbiya: 57-71

Ibnu Katsir (2000), ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim melakukan aktivitas dakwah setelah pengembaraan intelektualnya yang berlangsung cukup mendalam dengan menuhankan bulan, bintang, dan matahari pada awalnya², dan disaat perkawinan pemikiran fakta empiris dan nuraninya telah terjadi, maka Ibrahim membuat *decision* dakwahnya melalui ajakan berpikir secara rasional terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh ayah dan anggota masyarakatnya.

Penekanan disini ialah, bahwa dakwah merupakan pendayagunaan potensi berpikir masyarakat dengan optimal agar mereka bisa keluar dari penjara pemikiran yang semu dan dangkal dari kebiasaan yang ada sehingga dengannya mereka bisa menjadi insan yang kamil.

Sementara dalam makna keuniversalitasannya menekankan bahwa dakwah merupakan suatu pemaknaan dan tindakan yang komprehensif untuk semua kelompok manusia (*rahmatat lil 'alamin*). Sebagaimana yang dapat dimaknai pada ayat di bawah:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (al-Maidah: 67).

Menurut Imam As-Sa'di (dalam Luthfi, 2011) ayat ini merupakan perintah menyampaikan dakwah secara komprehensif dalam setiap waktu dan dalam keadaan apapun tanpa terkecuali, dengan konsekuensi akan berhadapan dengan "isme" dan ideologi lain yang telah lebih dulu menjadi sikap yang menyatu dalam

2. Rangkaian cerita ini juga bisa dilihat lebih lanjut pada Qs. al-An'am: 74-79

masyarakat. Sedangkan Luthfi sendiri (2011) berargumentasi bahwa komprehensivitas dakwah dalam ayat di atas dapat dipahami dari huruf “*ma*” yang merupakan “*ma maushulah*” atau kata sambung, yang merupakan redaksi umum -sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir- mencakup semua apa yang diturunkan Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, hukum, politik, ekonomi dan terlebih pada bidang sosial budaya. Sehingga dakwah mesti dipahami sebagai suatu yang utuh, lengkap, total dan menyeluruh, tanpa harus memisah-misahkan antara yang satu dengan yang lain atau menghapuskan satu bagian dari keseluruhan.

Kekompleksitasan makna dakwah inilah yang menjadi bahan perhatian bahwa dakwah tidak hanya sekedar berceramah di depan podium, tidak hanya sekedar berjaulah kesana kemari, *khuruj* selama 3 hari, 40 hari, berbulan-bulan atau bahkan sampai setahun, melainkan dakwah merupakan serangkaian upaya yang muatan pesan dan proses penyampaiannya tidak eksklusif, mencakup semua lini kehidupan manusia dan lingkungannya.

Dakwah harus masuk ke semua dimensi kehidupan. Tidak sektarian, dan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Bukan hanya terkhusus pada satu bangsa tertentu, satu tanah air atau nasionalisme tentu, warna kulit, atau kepentingan kelompok tertentu. Sehingga komprehensivitas dakwah akan membentuk masyarakat dengan satu dasar ikatan akidah, memunculkan karakter kemanusiaan yang sebenarnya³, dan memunculkan masyarakat yang inklusif yang pada akhirnya memiliki konsekuensi lahirnya

3. Karakter kemanusiaan yang sebenarnya disini adalah fitrahnya manusia, sebagaimana yang tertera dalam hadits dalam hadits:

كل مولد يولد على الفطرة

Bahwa setiap manusia berada pada fitrahnya yakni tidak menyembah, memuja dan mengagungkan sesuatu hal melainkan hanya pada yang satu yaitu Allah. Dari sisi karakter, fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang saling toleran dan satu padu untuk membangun kebersamaan demi keberlangsungan hidup yang bahagia.

sebuah tradisi, kebiasaan atau kebudayaan baru yang berbasis pada keharmonisan dan kedamaian (cahaya islam) yang termuat di dalamnya kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat.

Dalam perjalanan dakwah yang semakin kompleks dan bervariasi, tidak jarang ditemukan kebaikan dakwah terdistorsi dengan paradigma atau perilaku oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengemban misi dakwah. Tidak jarang dakwah dipahami berbenturan dengan fasilitas materi. Seakan-akan dakwah dan materi duniawi tidak boleh bertemu dan saling bertentangan. Apalagi perbedaan paradigma dakwah yang telah memasuki domain pemerintahan, yang terkadang memicu friksi dan konflik internal yang tajam.

Oleh karenanya perlu diterjemahkan dakwah dari sisi sosiologis sebagai sebuah fakta sosial dengan memahami perjalanannya dimasa lalu dengan seluruh dinamikanya hingga sampai sekarang. Bahwa dakwah, dengan meminjam istilah Weber (dalam Sunarto, 1993) adalah tindakan sosial, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Artinya, dakwah disini ialah sebagai tindakan yang ditujukan atau diniatkan untuk mempengaruhi orang lain dengan memperhatikan keadaan/kondisi sosial-budaya dan respon yang ada di lingkungan masyarakat agar masyarakat sampai kepada tujuan dakwah yaitu berada di jalan Allah. Jadi, dalam dakwah terdapat segumpal amanah yang mesti dicapai. Tidak bersifat segmentatif dan parsial atau dengan istilah lain “dakwah hanya untuk dakwah”. Sebab jika dakwah hanya untuk dakwah atau tidak memberi efek apapun maka hal ini bisa dideklarasikan sebagai kegagalan dakwah.

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara tindakan individu dengan tindakan sosial. Tindakan individu ialah tindakan yang tidak memiliki pengaruh apapun atau tidak ada hubungannya kepada orang lain. Sebagai contoh tindak bunuh diri karena tidak dapat menahan rasa sakit akibat penyakit atau karena adanya gangguan

kejiwaan bukan disebut sebagai tindakan sosial. Akan tetapi bunuh diri yang disebabkan faktor-faktor sosial maka hal itu disebut sebagai tindakan sosial.

Sebaliknya, jika seseorang menyanyi meski di kamar mandi sekalipun dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain, maka hal itu disebut sebagai tindakan sosial (Sunarto, 1993). Dan disinilah yang ditekankan bahwa dakwah mesti memiliki implikasi sosial. Dakwah tidak bermakna tindakan individu dan bukan pula ditujukan untuk kepentingan da'i secara pribadi atau kepentingan kelompok semata.

Jika dakwah dimaknai sebagai tindakan individu, maka yang terwujud kepermukaan realitas sosial berupa ego dari orang atau kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pengemban dakwah, orang yang paling suci. Fatwa dan arah gerakannya bukan lagi untuk "kepentingan Tuhan" dan umat, melainkan sudah bergeser menjadi kepentingan diri dan kelompoknya semata. Promblema seperti ini sangat tidak asing lagi untuk didengar dan diamati, yang dalam keseharian di masyarakat disebut sebagai da'i pengharap amplop, da'i selebritias, dan bahkan juga pada kelompok yang setiap tahunnya sangat ego terhadap penentuan bulan ramadhan dan hari raya idul fitri.

Membaca realitas episod pergumulan sejarah dan keagamaan (dakwah) saat ini yang tidak jarang keduanya terpisah dan terkotak-kotakkan oleh sebagian pandangan terhadap dakwah yang hanya berada di mesjid-mesjid, berkoar-koar di mimbar, berjalan kesana-kemari dengan membawa bekal seadanya, plus bersorban-sorban seakan-akan hidup di tengah padang pasir, saling menjustifikasi, mengintervensi yang memberi kesan bahwa Islam ajaran radikal, ini dan itu serba haram, tidak boleh menjalin hubungan dengan masyarakat diluar Islam, juga termasuk pandangan yang mengharamkan Islam/dakwah memasuki arena

politik, dalam pandangan sosiologi dakwah tampaknya harus segera mengganti jubahnya yang mengandung simbolis makna parsial kepada keuniversalan makna dakwah (*syumuliatul Islam*) demi menjaga keseimbangan sistem masyarakat Islam nan-madani (universalitas Islam).

Atas nama 'amanah' yang terhimpun dalam kegiatan dakwah sebagaimana yang termaktum dalam al-Qur'an:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui
(at-Taubah: 41).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dakwah harus tetap dilaksanakan dalam bentuk dan kondisi bagaimanapun dan karena itu dakwah harus menjadi tindakan terukur, sistematis, dan terencana. Dakwah harus bermetamorfosa menjadi sebuah sistem yang memiliki segenap perangkat yang menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai integrasi sosial masyarakat dakwah.

Memaknai persoalan integrasi sosial, ada dua hal yang sangat penting sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh Muliono (2013) yaitu pertama, setiap sistem harus mampu memotivasi anggota kelompok masyarakatnya agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing atau sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, sistem sosial harus mampu menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti konflik yang dapat merusak keseimbangan sistem.

Kaitannya dalam hal ini, disamping dakwah sebagai tindakan sosial, dakwah juga mesti diterjemahkan sebagai fakta sosial. Dalam artian, dakwah mempunyai kekuatan memaksa, mengendalikan

segala tindakan individu dan masyarakat demi melahirkan sistem nilai untuk sampai kepada tujuan dakwah yakni terpengaruhnya orang lain dengan tindakan yang direncanakan.

Tindakan yang direncanakan tersebut ialah tujuan dakwah itu sendiri yakni keluarnya masyarakat dari sempitnya penjara alam pemikiran, pemahaman dan kebiasaan dengan menggantungkan diri kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat bertindak dan tidak dapat memberikan kebaikan apapun atau yang disebut dengan istilah *false consciousness*, kemudian masuk kedalam penjara lain yang lebih besar dan mengandung kebebasan yaitu jalan menuju Tuhan dengan segenap aturannya dengan ikhlas tanpa ada intervensi apapun. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ali Bin abi Thalib: kebaikan yang tidak tertata dengan baik dan rapi akan dipunah dikalahkan oleh kejahatan yang tertata rapi dan baik.

2.3. Prinsip-Prinsip Dakwah

Secara etimologi, kata prinsip berasal dari kata *principle*, yang berarti asas, dasar, kaidah, sendi, pendirian, basis, atau rukun. Roh dari aktivitas atau tindakan dan akumulasi dari pemaknaan pengalaman oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. Jadi, prinsip adalah pandangan fundamental yang dijadikan pedoman atau petunjuk arah layaknya kompas untuk berpikir atau bertindak. Prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka prinsip dakwah dapat diberi makna sebagai asas, dasar, kaidah, pedoman dan petunjuk yang dijadikan sebagai acuan yang mendasari segala aktivitas dakwah, dasar berpikir dan bertindak oleh pelaku dakwah. Oleh karenanya segala aktivitas dakwah harus memiliki pedoman yang menjadi rujukan utama yang selaras dengan tujuan hakiki dakwah, yaitu terwujudnya kedamaian, ketentraman, dan kehumanisasian dalam masyarakat.

Hamka (1984) menjelaskan prinsip dakwah dengan literatur yang lebih sederhana yaitu: kontinuitas, berkelanjutan, dan terus-menerus, kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengedepankan akhlak. Kontinuitas dan berkelanjutan oleh Hamka dimaknai bahwa dakwah bukan hanya terbatas kepada Nabi saja, melainkan harus dilanjutkan oleh umatnya yang datang kemudian dan tidak berhenti disaat Rasulullah tiada. Sebagaimana yang perkataan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah telah terbaring menghembuskan nafas terakhir menghirup segarnya udara dunia yang penuh dinamika:

... Barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan tetap hidup selamanya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa selama bintang masih bercahaya di langit, roda kehidupan masih berputar, maka selama itu pula dakwah terus berjalan. Syari'at yang ada menjadi tanggung jawab para ulama untuk menyampaikan, menyebarkan, dan memberi keinsafan kepada yang lain.

Prinsip selanjutnya ialah mengedepankan akhlak. Artinya, dakwah bukan dilakukan dengan kekerasan, yang dalam istilah Hamka "akhlak bukan pedang". Banyak orang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan dijalankan dengan paksa, bahkan yang lebih ironis Islam sebagai agama teroris yang menyebarkan dakwah dengan ekstrim. Sebenarnya tidak, ini hanya celotehan pengkaburan makna. Jika ditelaah peristiwa peperangan yang terjadi pada masa penyebaran agama Islam, tiada lain hanya sebagai reaksi atas aksi angkat senjata yang dilakukan oleh masyarakat anti-islam, *orang kafir*. Akhlak menjadi indikator penting dalam menjalankan kinerja dakwah. Sebagaimana yang dilakukan khalifah *syaidina* Umar bin khattab disaat mengutus pegawainya ke daerah-daerah, beliau mengatakan:

ما ارسلتكم لتضربوا بشارنا س ولكن لتعلموا امر دينهم

..saya utus kalian bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk mengajarkan agama.

Demikian juga dengan apa yang dilakukan Rasulullah sebagai referensi utama dalam dunia Islam (dakwah), ketika berdakwah pada masyarakat Romawi, beliau terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Raja Heraclius yang bunyinya:

اسلم تسلم و الا فعليك اثم الاريسين

..masuk Islamlah kamu, agar engkau selamat. Jika engkau tidak mau masuk kedalam Islam, maka sesungguhnya engkau bertanggung-jawab atas dosa yang dipikul oleh semua petani yang berada di dalam kekuasaanmu.

Artinya, prinsip yang mengedepankan akhlaq dalam dakwah ialah penekanan untuk menyatukan, mengumpulkan bukan untuk memecah-belah, memperdekat dan bukan menjauhkan yang didasarkan pada kharismatik para da'i. Ia tidak banyak berbicara dan lebih menekankan pada contoh sehingga dengannya dapat menyentuh hati orang untuk ikut ke jalan yang diridhai Allah.

Sedangkan dalam prinsip kewajiban, dakwah dimaknai sebagai suatu keharusan bagi mereka yang telah mengenal Islam. Tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali semata-mata karena Allah. Kesalahan terbesar dalam aktivitas dakwah, jika mereka yang mengklaim dirinya atau terlanjur *di-lebelling* masyarakat sebagai pengemban dakwah mengharapkan materi. Sehingga menjadi kewajiban jika dakwah yang ada tidak menyelesaikan masalah umat karena sudah melenceng dari prinsip hakikinya dakwah. Prinsip yang terakhir *amar ma'ruf nahi mungkar*, menekankan dakwah sebagai upaya penyeruan kepada yang baik menurut apa yang diperintahkan alqur'an dan mencegah sesuatu yang terlarang oleh agama. Dalam kondisi bagaimanapun baik sulit, penuh rintangan dan tantangan,

dakwah harus tetap dilaksanakan. Sebagaimana yang dapat ditelaah dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Barang siapa diantara kamu melihat yang mungkar, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Barangsiapa yang tidak kuasa mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lidahnya, dan barang siapa tidak sanggup dengan lidahnya, hendaklah ia mengingkarinya dengan hati. Dan hal yang demikian itu ialah selemah-lemah iman”.

Mengubah dengan tangan ialah melalui kekuasaan. Menurut Hamka tugas ini dilakukan oleh pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum terhadap masyarakatnya. Namun jika seseorang tidak memiliki kekuasaan apapun, bukan berarti kewajiban dakwah hilang dari dirinya, melainkan ia harus menggunakan lisannya untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat melihat jalan yang benar baik itu dengan menulis dan mengarang, seminar, diskusi dan lain sebagainya. Jika hal itu juga tidak dapat dilakukan maka setidaknya ia harus mengingkarinya dengan hati. Pada intinya, dakwah disini bukan semata-mata mencela yang mungkar yang bersifat negatif melainkan yang lebih penting lagi menganjurkan yang ma'ruf secara positif.

Bertolak dari pandangan yang telah dipaparkan di atas, maka prinsip-prinsip dakwah ialah sebagai berikut:

1. Deistik.
2. Universalistik
3. Humanistik
4. Equilibrium

Prinsip deistik adalah prinsip dimana dakwah merupakan tindakan yang ditujukan kepada Allah (ilahiyah). Dalam artian, dakwah hanya sebatas pentransformasian nilai ketuhanan melalui proses mendekatkan hidayah kepada manusia agar mereka bisa menangkap hidayah tersebut. *Universalistik* adalah konsep eksistensi

manusia sebagai khalifah untuk menterjemahkan hidayah Tuhan kepada semua manusia. Karenanya, dakwah tidak hanya ditujukan kepada orang islam saja tetapi kesemua kalangan beragama dalam masyarakat dunia. Tidak pula ditujukan kepada kepentingan kelompok tertentu atau sekterianisme.

Keuniversalitasan dakwah juga tertuju pada dimensi materi dakwah itu sendiri sehingga dapat dirasakan oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat. Hal ini beranjak dari konsep islam sebagai agama dakwah yang merupakan agama rahmatallilalamin. Islam mengenal dua bentuk masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah yaitu masyarakat islami dan masyarakat jahili.

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan islam secara keyakinan dan ritual ibadah, secara syariat dan sistem, serta secara budi dan tingkah laku. Sedangkan masyarakat jahili ialah masyarakat yang bertolak belakangbelakang dari apa yang disebutkan di atas. Suatu masyarakat tidak disebut sebagai masyarakat islam hanya kerana terdiri dari orang-orang yang menamakan dirinya sebagai orang islam, namun syariat itu sendiri tidak menjadi hukum baginya. Oleh karenanya dakwah masih diperlukan bagi masyarakat islam guna memperkokoh dan menguatkan serta menyadarkan kembali akan keislaman komunitas masyarakat islam. Kedua bentuk masyarakat ini harus menjadi sentuhan dakwah sebagai tindakan sosial yang mempunyai misi sebagai *centre of culture and centre of civilization* yang meredam tendensi konflik dan tidak melahirkan *firqoh-firqoh* oleh dakwah yang ditransformasikan.

Sementara dakwah *humanistik* adalah prinsip yang menekankan pada aspek kemanusiaan. Dalam istilah Hamka disebut dengan “mengedepankan akhlak bukan pedang”. Aspek kemanusiaan menjadi faktor paling penting dalam dakwah karena dakwah ditujukan untuk memanusiaikan manusia yang sesungguhnya telah dimuliakan oleh Tuhan. Secara sosiologis, konsep humnistik ini dapat lebih dipahami

melalui satu *teori modeling* (Walgito, 1978), Modeling yang artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain kemudian mencontohnya. Dan da'i harus menjadi model bagi mad'unya sebagaimana Rasulullah yang menjadi model dalam bertingkah laku bagi mad'unya disaat ia berdakwah bahkan hingga sampai saat ini. Sebab hasil dari modeling atau peniruan tersebut cenderung menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Modeling ini dapat menjadi bagian yang sangat penting dalam proses dakwah. Poin signifikant yang memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi mad'u ialah da'i.

Terdapat empat proses yang terlibat di dalam aktivitas dakwah melalui pendekatan modeling, yaitu perhatian (*attention*), pengendapan (*retention*), reproduksi motorik (*reproduction*), dan penguatan (*motivasi*). *Attention* adalah proses dimana mad'u memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan – tindakan yang dilakukan oleh da'i. *Retention* merupakan tindakan yang dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata. *Reproduction* menegaskan bahwa kemampuan motorik masyarakat dakwah juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya sebagian. Sedangkan *motivation* merupakan indikator akhir terhadap tindakan sosial dakwah yang dilakukan seberapa mampu mad'u nantinya melakukan nilai-nilai dakwah melalui pengaruh model nilai yang ada pada da'i. Penguatan dalam bentuk ini lebih kepada sisi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya. Sederhananya, prinsip humanistik menekankan pada contoh atau model dari da'i, sebab unsur penginternalisasian utamanya ialah pemerhatian dan peniruan tingkah laku baik melalui bahasa, teladan, dan nilai

Sedangkan *equilibrium* adalah konsep tawazun yang mengisyaratkan dua hal yaitu konektivitas dan perubahan. Dakwah merupakan tindakan berkesinambungan yang tidak pernah selesai dalam upayanya menyampaikan pesan Tuhan ke dalam bahasa masyarakat manusia demi mewujudkan perubahan dari kebudayaan masyarakat semata menjadi elaborasi dengan kebudayaan ilahiyah.✽

BAB III

SOSIOLOGI ;

PENGENALAN SINGKAT

Sosiologi diklasifikasikan para ahli dengan berbagai pandangan. Ada yang didasarkan pada urutan waktu lahirnya teori, luasnya ruang lingkup pokok pembahasan, dan perbedaan aliran pemikiran. Berdasarkan urutan lahirnya teori dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sosiologi klasik dan modern. Sosiologi klasik didominasi oleh para ahli teori secara individual, seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx dan Geoge Simmel. Sementara sosiologi modern ditandai dengan lahirnya konteks aliran-aliran sosiologi alternatif seperti interaksionisme simbolik, teori pertukaran, teori fungsionalisme, dan teori konflik. Berdasarkan ruang lingkup pokok bahasan diklasifikasikan atas mikro-sosiologi, meso-sosiologi dan makro-sosiologi. Sedangkan berdasarkan pada aliran pemikirannya, lebih menekankan pada *major school* atau aliran utama teori sosiologi yaitu fungsionalisme struktural dan teori konflik.

Beranjak selangkah dari pengklasifikasian di atas, sekilas pandang sebelum membahas tentang cabang- cabang

Sebelum tentang cabang-cabang dan berbagai perspektif dalam sosiologi pada bab ini, terlebih dahulu kita awali dengan pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti 'teman' atau 'kawan'. sedangkan *logos*

–dalam bahasa Yunani- berarti ‘kata’ atau ‘berbicara’. Jadi, sosiologi berarti membicarakan atau memperbincangkan pergaulan hidup manusia. Pengertian kemudian ini diperluas menjadi suatu ilmu pengetahuan yang membahas serta mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat.

Sedangkan secara terminologis, sosiologi didefinisikan oleh banyak ahli sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Emil Durkheim misalnya, berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dinamakan dengan fakta sosial. Sedangkan Weber mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial (Sunarto, 1993). Sorokin (dalam Soekanto, 2001) mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial serta gejala sosial dengan non-sosial. Soemardjan dan Soemardi (dalam Soekanto, 2001) mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sedangkan Soekanto sendiri (2001) berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang ketegoris, murni, abstrak, dan mencari pengertian-pengertian umum, rasional, dan empiris.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bermacam-macam gejala sosial, baik antara manusia dengan kelompok-kelompoknya maupun dengan lingkungannya yang termasuk di dalamnya struktur dan proses sosial dalam masyarakat.

3.1. Cabang-Cabang Sosiologi

Sosiologi sebagai ilmu disaat bercerai dengan induknya ilmu filsafat, semakin banyak dikaji dan dibutuhkan oleh berbagai bidang ilmu terapan lain sehingga sosiologi berhasil melahirkan berbagai cabang, diantaranya **sosiologi pendidikan, sosiologi hukum,**

sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi pembangunan, sosiologi politik, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, dan sosiologi kesehatan, dan sosiologi agama.

Sosiologi pendidikan merupakan cabang sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Masalah-masalah itu muncul sebagai akibat perubahan zaman, seperti perubahan masyarakat dari pertanian menuju ke masyarakat industri. Perubahan itu menuntut dibuatnya berbagai sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, buku-buku pelajaran, dan fasilitas lainnya. Hal itu mengingatkan pentingnya pendidikan dalam dunia industri. Sosiologi pendidikan mencoba mengkaji hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan pendidikan. Materi yang dikaji antara lain peranan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi, peranan pendidikan dalam perubahan masyarakat dan lingkungan pendidikan itu sendiri, serta peranan pendidikan sebagai pranata sosial.

Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum. Materi yang dipelajari antara lain perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku, peranan hukum dalam masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam masyarakat.

Sosiologi keluarga membahas kegiatan atau interaksi antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan keluarga. Hal yang dipelajari dalam sosiologi keluarga antara lain peranan keluarga dalam masyarakat, peranan keluarga dalam perubahan sosial, dan beberapa bentuk keluarga yang ada dalam masyarakat.

Sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingatkan antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya

industri, mata pencaharian hidup masyarakat berubah, dari sektor agraris menjadi sektor industri dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Sosiologi industri mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Beberapa materi yang dipelajari antara lain peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi), serta hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Sosiologi pembangunan mengkaji masyarakat dan segala pola aktivitasnya di alam pembangunan. Sosiologi menghendaki pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat tidak hanya mengejar aspek materiilnya saja, melainkan juga memerhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Beberapa materi yang dipelajari dalam sosiologi pembangunan antara lain pengaruh pembangunan dalam perubahan sosial, peranan pembangunan dalam kehidupan masyarakat, dan peranan pembangunan terhadap perekonomian masyarakat.

Sosiologi politik mempelajari tentang fenomena politik dengan mengaitkan variabel sosial dan variabel politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara. Dengan demikian sosiologi politik bertujuan mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan-kegiatan politik. Ruang lingkup kajian sosiologi politik antara lain perilaku politik, lembaga politik, dan peranan politik dalam masyarakat.

Sosiologi pedesaan mempelajari masyarakat pedesaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari dalam sosiologi pedesaan antara lain mata pencaharian hidup, pola hubungan, pola pemikiran, serta sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari antara lain mata pencaharian hidup, pola hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan.

Sosiologi kesehatan bertujuan mengkaji cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Cabang sosiologi ini berusaha untuk mengkaji perilaku sakit, perilaku sehat, peran sehat, dan peran sakit para anggota masyarakat.

Sementara sosiologi agama mempelajari hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat beragama. Dalam sosiologi agama dipelajari beberapa materi yang meliputi perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan yang dipeluknya, peranan agama sebagai pranata sosial, peranan agama dalam perubahan masyarakat, dan peranan agama sebagai agen pengendalian sosial.

3.2. Beberapa Perspektif Teori dalam Sosiologi

Apakah itu perspektif? Agar memudahkan dalam memahami pokok bahasan yang dibahas pada bagian ini, terlebih dahulu kita berangkat dari pengertian perspektif. Persepektif adalah suatu pandangan atau imajinasi teoritik dalam memahami satu atau berbagai fenomena sosial berkaitan dengan pola hubungan yang muncul dalam proses-proses interaksi masyarakat. Persepektif sosiologi atau *sociological perspective* menekankan pada konteks sosial dimana manusia hidup, bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia di pengaruhi masyarakat yang memiliki kebudayaan dan wilayah bersama. Sederhananya, perspektif sosiologi ialah upaya membaca dan memahami realitas masyarakat dengan menggunakan teori sosiologi.

a. Perspektif Teori Evolusi

Teori evolusi merupakan perspektif teoritis yang paling awal dalam sejarah pengembangan ilmu sosiologi yang memusatkan hatinya pada perubahan-perubahan jangka panjang. Masyarakat layaknya organisme hidup yang mengalami perkembangan melalui tahap demi tahap menuju suatu kondisi yang kompleks. Dalam prosesnya, terjadi suatu mekanisme yang disebut dengan seleksi alam. Masyarakat yang kuat dan mampu beradaptasi akan tetap lestari karena masyarakat yang demikian lebih baik dari pada masyarakat yang lemah. Ini menjadi alasan bagi para ahli sosiologi seperti Spencer untuk menolak adanya campur tangan untuk melindungi masyarakat yang lemah maupun menolak untuk mempengaruhi proses evolusi yang berlangsung secara alamiah.

Ahli sosiolog yang menganut teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer serta beberapa ahli lain. Mereka menyakini evolusi sama dengan perkembangan dan langkah menuju kondisi yang lebih baik. Dalam perkembangannya di era modern terdapat pergeseran makna tanpa mengurangi tujuan sesungguhnya teori evolusi. Ahli sosiolog modern berpandangan bahwa evolusi merupakan proses yang menghasilkan suatu perubahan, tetapi mereka tidak beranggapan bahwa perubahan itu semata-mata akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Meskipun mereka bersepakat bahwa masyarakat senantiasa berkembang menjadi lebih kompleks, tetapi tidak menyatakan bahwa kompleksitas suatu masyarakat yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang baik, atau sebaliknya menghasilkan sesuatu yang buruk. Misalnya masuknya telepon dalam suatu masyarakat dapat dipandang sebagai suatu bentuk teknologi yang maju dan membuat masyarakat kian kompleks. Hadirnya televisi dapat dipandang sebagai hal yang baik sebab dengan mudah orang akan dapat mengetahui informasi atau berita dengan cepat dan dapat menyaksikan gambar atau film, tetapi

disisi lain televisi dapat juga dipandang sebagai gangguan, misalnya mengganggu konsentrasi dalam bekerja atau belajar atau membuat malas anak-anak untuk belajar.

Kehadiran televisi, dalam pandangan penganut evolusi terdahulu akan dilihat sebagai sesuatu hal yang baik dari kemajuan masyarakat tanpa melihat sisi negatifnya. Penganut teori evolusi masa kini pada umumnya memusatkan perhatiannya pada upaya mencari pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda, untuk mencari urutan umum yang dapat ditemukan.

Beberapa ciri yang memudahkan pemahaman terhadap perspektif teori evolusi ini antara lain: Pertama, teori ini merupakan perspektif teoretis yang paling awal dalam sosiologi. Kedua, Perspektif ini didasarkan pada karya August Comte (1798-1857) dan Herbert Spencer (1820-1903). Ketiga, Perspektif ini memberikan keterangan tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan tumbuh. Keempat, mengamati masyarakat dengan berbagai fenomenanya dalam jangka waktu yang lama. Kelima, mencari pola perkembangan dan pola pertumbuhan dalam masyarakat yang berbeda untuk mencari rumusan apakah ada urutan atau ciri umum yang ditemukan.

b. Perspektif Struktural-fungsional

Perspektif teori struktural fungsional memiliki akar pada pemikiran Emile Durkheim dan Max Weber, dua makhluk yang menjadi sosiolog klasik terkenal. Sedangkan dalam perkembangannya kemudian, perspektif ini dipengaruhi oleh karya Talcott Parson dan Robert Merton, dua makhluk yang berinisial ahli sosiologi kontemporer terkenal pada masa kini.

Perspektif ini sering disebut struktural fungsional. Penamaan demikian kerana perspektif ini memusatkan perhatian pada prasyarat fungsional atau keperluan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem

sosial dalam mempertahankan kehidupannya dan struktur-struktur yang sesuai dalam memenuhi keperluan tersebut. Menurut pandangan ini, sistem sosial memiliki kecenderungan untuk melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan untuk kelangsungan sistem sosial. Analisa sosiologi berusaha mengkaji struktur-struktur sosial yang melaksanakan fungsi untuk memenuhi keperluan sistem sosial.

Perspektif ini juga dikenal sebagai fungsionalisme dengan dua alasan. Pertama, ia menjelaskan hubungan dengan istilah yang diajukan oleh tokoh perspektif ini, khususnya Durkheim, Radcliffe Brown dan Malinowski. Kedua, Talcott Parsons dan Robert Merton menggunakan istilah berfungsi secara konsisten. Parsons menolak istilah struktural fungsional ketika ia mengkoreksi konsep fungsi, struktur dan proses sosial. Dalam revisinya, fungsi adalah konsep utama dalam analisa sistem. Struktur dan proses merupakan konsep yang selaras, yang pertama adalah unsur fungsional yang statik (struktur) dan yang kedua adalah unsur fungsional yang dinamik (Ritzer 1996).

Apa yang dimaksudkan dengan fungsionalisme adalah, analisa gejala sosial dan budaya berdasarkan fungsinya dalam sistem sosio budaya. Dalam fungsionalisme, masyarakat difahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bahagian yang berkaitan satu sama lain, masing-masing bahagian tidak dapat difahami secara terpencil dari sistem keseluruhan. Perubahan dalam bahagian-bahagian tertentu sampai pada tahap tertentu boleh menyebabkan perubahan-perubahan pada bahagian-bahagian lain dari sistem, serta menuntut adanya reorganisasi sistem secara keseluruhan. Perkembangan fungsionalisme didasarkan pada model sistem organik yang ditemui dalam ilmu biologi.

Kerana perspektif ini tertarik pada keseluruhan ciri umum struktur dan institusi sosial, maka fungsionalisme mengandungi pusat

perhatian pada masyarakat berskala makro. Dalam menganalisa sistem sosial, fungsionalisme menekankan tiga unsur penting, yaitu (1) hubungan-hubungan umum dari berbagai bahagian sistem, (2) situasi normal, atau situasi keseimbangan, sejajar dengan keadaan normal atau sihat dalam tubuh manusia, (3) cara semua bahagian dari sistem melakukan reorganisasi akan membawa kembali sistem pada situasi normal.

Salah satu proposisi yang paling penting dari fungsionalisme adalah, bahwa dalam sistem akan selalu ada proses reorganisasi dan kecenderungan untuk mencipta keseimbangan. Dalam menganalisa bagaimana sistem sosial memelihara dan menciptakan keseimbangan, para fungsionalis cenderung menggunakan nilai-nilai yang dianut dan diterima secara umum oleh masyarakat, sebagai salah satu konsep utamanya. Penekanan atas nilai-nilai ini merupakan ciri terpenting kedua dari fungsionalisme, selepas penekanan atas keterikatan sistem dan untuk mencipta keseimbangan. Oleh sebab itu, fungsionalisme sangat berbeda dengan perspektif sosiologi makro yang lain, yaitu teori konflik. Jika fungsionalisme menekankan pada kesatuan masyarakat dan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, maka teori konflik menekankan pada pembahagian-pembahagian dalam masyarakat dan persaingan-persaingan yang dilakukan oleh masing-masing bahagian masyarakat di dalam mengambil keuntungan material yang mereka perlukan.

Emile Durkheim (1858-1917) merupakan perintis fungsionalis modern yang sangat penting. Pemikiran Durkheim mempengaruhi pemikiran Radcliffe Brown dan Malinowski secara mendalam. Parsons mengatakan bahwa Durkheim merupakan salah satu model bagi perkembangan intelektualnya. Secara khususnya ia menyebut Durkheim sebagai berikut; “dalam arti substansial pengaruhnya dalam bentuk masalah dan berbagai unsur empirik serta struktur konseptual sangat mendalam bagi pemikiran saya”. Robert Merton

menetapkan Durkheim sebagai salah satu dari dua orang yang mengajarnya secara mendalam. Pengaruh teori Durkheim melintasi batas-batas fungsionalisme. Erving Goffman dan Peter Berger juga menggunakan ide-ide Durkheim ke dalam perspektif interaksi simbolik dan fenomenologi yang mereka anut (Campbell 1994).

Gagasan-gagasan fungsionalisme terpenting dari Durkheim merupakan hasil perhatian sepanjang hayatnya ke atas konsep integrasi, yang ia artikan sebagai suatu keadaan keseimbangan. Buku yang berjudul *The Rules of Sociological Method* dan karya-karyanya mengenai agama dan pendidikan sering dikutip sebagai sumbangan utamanya ke atas fungsionalisme, sekalipun dalam karya terbesarnya yang berjudul *The Division of Labor in Society*, ia membicarakan fungsi pembahagian kerja. Dekripsinya mengenai solidaritas organik, sebuah bentuk integrasi yang khas bagi masyarakat industri, memusatkan pada pergantungan antara peranan (Ritzer 1996).

Durkheim membicarakan wilayah kajian yang sesungguhnya dari sosiologi, yaitu fakta sosial. Ia mendefinisikan fakta sosial sebagai sesuatu yang umum yang merangkum keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri, serta terpisah dari prilaku individu. Ia mencontohkan fakta sosial dengan undang-undang, moral, keyakinan, kebiasaan, dan kaedah. Terkini, Durkheim menggunakan istilah institusi dengan makna yang sama dengan fakta sosial, yang berarti keyakinan dan peraturan prilaku yang dilembagakan oleh masyarakat. Ia mentakrifkan sosiologi sebagai ilmu mengenai institusi, serta kejadian dan fungsinya. Durkheim menjelaskan bahwa ia memandang gejala yang bersifat makro-stuktural sebagai wilayah kajian sosiologi. Dalam *The Rules of Sociological Method*, ketika ia telah membicarakan fakta sosial, ia melihat fungsi-fungsi sebagai keperluan-keperluan umum dari organisma sosial. Penjelasan-penjelasan mengenai fakta sosial lebih mengarah kepada sebab-sebab sosial, berbanding sebab-sebab non-sosial.

Sumbangan terpenting Durkheim terhadap fungsionalisme adalah salah satu karyanya yang bertajuk *The Elementary Forms of The Religious Life* (1961). Dalam karyanya ini ia menunjukkan bahwa agama pada suku yang sangat primitif merupakan sesuatu kekuatan integrasi yang sangat kuat. Hal ini selaras dengan pentingnya peranan nilai-nilai (*values*) dalam sistem sosial sebagaimana difahami para fungsionalis. Durkheim memaknai nilai sebagai “konsep kebaikan yang diterima secara umum” atau “kayakinan yang memperkukuhkan kewujudan dan pentingnya struktur sosial tertentu, serta jenis perilaku tertentu yang ada dalam struktur sosial tersebut”. Durkheim mempertimbangkan agama sebagai institusi yang berkesan dalam mengembangkan nilai-nilai umum sehingga menjadi alat pengintegrasian yang baik. Sistem pendidikan umum pada masyarakat modern mempunyai fungsi yang sama dengan agama pada masyarakat tradisional kerana menghantar nilai-nilai masyarakat (Robertson 1995).

Dua anggota antropologi yang mengikut analisis fungsional dari Durkheim di dalam karya-karyanya adalah Bronislaw Malinowski (1884-1942) dan Arthur Radcliffe Brown (1881-1955). Mereka berdua tertarik pada karya Durkheim, dan Malinowski yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah fungsional bagi jenis kajian ini. Salah satu hubungan antara karya mereka dengan fungsionalisme modern dalam sosiologi terlihat ketika Parsons belajar kepada Malinowski, saat ia belajar di London School of Economics (Ritzer 1996).

Tahapan analisa di antara Malinowski dan Radcliffe Brown berbeda. Malinowski tertarik pada keperluan-keperluan psikologi, dan fungsi-fungsi yang ia yakini harus dipenuhi agar masyarakat berkembang, sedangkan Radcliffe Brown tertarik pada keperluan-keperluan sosiologi, dan fungsi-fungsi institusi dalam sistem sosial. Sebagai contoh, berkenaan dengan masalah fungsi upacara magis,

Malinowski berpendapat bahwa keperluan-keperluan individu yang menjadi faktor penyebabnya. Ia beranggapan bahwa kekuatan magis lebih sering digunakan dalam penangkapan ikan di laut terbuka, berbanding di sungai-sungai. Hal ini disebabkan orang lebih merasa tidak selamat dan berbahaya apabila melakukan penangkapan ikan di dalam laut lepas (Scharf 1995).

Berbeda dengan Malinowski, Radcliffe Brown menganggap magis sebagai fungsi sosial. Ia percaya bahwa masyarakat mengandung pengetahuan mengenai apa yang berbahaya dan mengancam, serta setiap individu diajarkan makna-makna tersebut oleh masyarakat, juga bagaimana cara menanggulangnya. Dengan demikian, upacara magis dimaksudkan bagi memelihara keseimbangan masyarakat, fungsinya bersifat sosial, bukan individual (Scharf 1995).

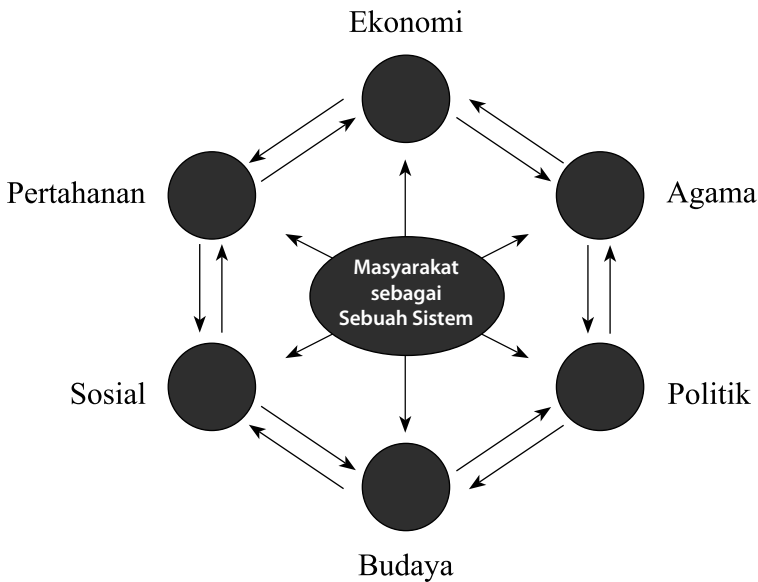
Ketika Parsons (dalam Ritzer 1996) membangunkan rangka fungsionalismenya, ia lebih banyak meminjam idea Brown yang lebih menegaskan keperluan sosial dan penjelasan sosial berbanding idea Malinowski. Namun, Parsons pun meminjam teori Malinowski ketika ia memperkenalkan sistem keperibadian yang sejajar dengan sistem budaya dan sistem sosial dalam sistem tindakan yang dikemukakan olehnya. Inti pembahasan Parsons, adalah konsep sistem. Menurutnya, konsep sistem dalam tindakan sangat sentral. Teori umumnya tentang tindakan merangkumi empat sistem; sistem kebudayaan, sistem sosial, sistem keperibadian, dan sistem perilaku organisma. Menurutnya, unit analisa dari sistem kebudayaan adalah sistem makna atau sistem simbol. Beberapa contoh sistem simbolik adalah keyakinan agama, bahasa, dan nilai kebangsaan. Pada tahap ini, Parson memusatkan pada nilai yang diterima secara umum. Ketika para anggota masyarakat menginternalisasikan nilai-nilai sosial, maka sosialisasi berlaku. Dan, sosialisasi merupakan kekuatan pengintegrasikan dalam melaksanakan kawalan sosial, serta mengikat semua anggota masyarakat.

Sistem sosial menduduki tahap berikutnya dalam teori Parsons. Unit dasarnya adalah “interaksi peranan”. Ia mendefinisikannya sebagai berikut; “sistem sosial terdiri dari sejumlah pelakon individu yang majmuk dan saling berinteraksi antara satu sama lain dalam suatu situasi yang sekurang-kurangnya memiliki aspek fizikal dan persekitaran, pelakon-pelakon yang dimotivasikan berdasarkan kecenderungan untuk memperoleh penghargaan setinggi-tingginya, dan yang hubungannya dengan situasi mereka ditakrifkan dan disalurkan melalui sistem yang terstruktur dalam kebudayaan dan dianut secara bersama” (Ritzer & Goodman, 2005). Dalam definisi Parsons mengenai sistem sosial majmuk boleh ditakrifkan sebagai dua atau lebih pelakon, dan pelakon boleh berarti masyarakat atau kelompok, sehingga sistem sosial merangkumi interaksi dua orang dalam sebuah restoran atau kelompok-kelompok dari organisasi antarabangsa. Hubungan sistem sosial dengan sistem kebudayaan adalah, bahwa sistem kebudayaan menentukan dan mempengaruhi bagaimana cara orang-orang berinteraksi.

Menurut Parsons, unit azas dari sistem keperibadian adalah pelakon secara individu. Perhatiannya terhadap ini selaras dengan pandangan para penganut “teori pertukaran”, bahwa manusia makhluk yang mempunyai “kepentingan peribadi”. Sedangkan pada perilaku organisma, unit azas manusia adalah biologinya sendiri, yaitu aspek fizikal dari orang seorang, termasuk lingkungan fisik dan organik tempat manusia hidup. Ketertarikannya pada sosio-biologi menyebabkan ia berusaha memaham landasan biologi dari perilaku manusia, pada dasarnya merupakan organisma yang hidup. Ketika berkembang menjadi individu, manusia mendapat identitas keperibadian.

Masyarakat – dalam perspektif struktural fungsional- dipandang sebagai sebuah jaringan terorganisir yang masing-masing mempunyai fungsi. Institusi sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi

dan peran masing-masing yang saling mendukung. Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem stabil yang cenderung mengarah pada keseimbangan dan menjaga keharmonisan sistem. Masyarakat dipandang sebagai totalitas dari unsur-unsur yang terpisah namun berhubungan dan memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Kehidupan sosial seperti itulah yang dinamakan dengan sistem sosial. Ketergantungan antara subsistem dalam sebuah sistem sosial dapat dilihat dalam gambar sederhana di bawah ini:



Masyarakat sebagai sistem sosial (dalam Muliono, 2013)

Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status atau posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran maupun karena usaha seseorang dalam masyarakat. Jaringan dari status sosial dalam masyarakat merupakan sistem sosial, misalnya jaringan staus ayah-ibu-anak menghasilkan keluarga sebagai sistem sosial, jaringan

pelajar-guru-kepala sekolah-pegawai tata usaha menghasilkan sekolah sebagai sistem sosial, dan sebagainya. Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak.

Sistem sosial mengembangkan suatu fungsi tertentu dan dengan fungsi itu memungkinkan masyarakat dan orang-orang yang menjadi anggota masyarakat menjadi eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Misalnya lembaga pendidikan berfungsi mengajarkan pengetahuan atau ketrampilan, lembaga agama berfungsi memenuhi kebutuhan rohaniah, keluarga berfungsi untuk sosialisasi anak dan sebagainya. Semua berjalan sesuai dengan ritmenya masing-masing demi menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Sebagai sistem, masyarakat cenderung dalam keadaan seimbang. Manakala salah satu subsistem terganggu, maka subsistem yang lain juga akan terpengaruh yang pada kondisi tertentu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sistem sosial masyarakat. Suatu sistem sosial dapat eksis karena sistem sosial tersebut menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat.

Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh Muliono (2013); pertama, setiap sistem harus mampu memotivasi warga masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing atau sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, sistem sosial harus mampu menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti konflik yang dapat merusak keseimbangan sistem.

Sederhananya ciri perspektif teori ini dikenal dengan; pertama, masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang agak

teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Kedua, Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Ketiga, Menurut Talcott Parsons (1937) Kingsley Davis (1937) dan Robert Merton (1957), setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus, karena hal itu fungsional. Keempat, Perubahan sosial mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru. Kelima, bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional; bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh, maka hal tersebut tidak fungsional.

c. Perspektif Teori Kritik Sosial

Teori kritik didefinisikan secara sempit dan luas kaitannya dengan filsafat dan sejarah ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Teori kritik dalam arti sempit mengarah pada beberapa generasi filsuf Jerman, utamanya dalam tradisi Marxis Eropa Barat yang dikenal dengan sekolah Frankfurt atau Mahzab Frankfurt seperti Jurgen Habermas, Adorno dan Horkheime. Teori kritik dalam arti luas menitik beratkan pada upaya pembebasan manusia seutuhnya dari hal-hal yang memperbudaknya. Kedua definisi ini pada intinya telah menyiapkan dasar-dasar yang normatif dan deskriptif untuk penyelidikan sosial yang diarahkan pada pengurangan dominasi dan terus meningkatkan kebebasan dalam semua bentuknya.

Teori sosial kritik mengamanatkan bahwa penelitian sosial seharusnya memadukan kutub-kutub filsafat dan ilmu-ilmu sosial, yang dipadukan diantaranya pemahaman dan penjelasan, wakil dan struktur, serta keteraturan dan normativitas. Hal inilah yang sangat ditekankan oleh teori kritik, bahwa pemecahan masalah sosial

harus dikaji secara komprehensif integral dari ilmu-ilmu sosial, seperti filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, geografi, politik, hukum, dan kewarganegaraan. Kajian interdisiplin ini pada akhirnya mengarah pada simpulan bahwa kehidupan saat ini yang sudah sangat kapitalisme harus diubah menuju kehidupan sosial yang berlandaskan pada musyawarah mufakat. Fakta ini bisa dicapai melalui demokratisasi di segala bidang kehidupan.

Teori kritik harus memenuhi tiga kriteria, yakni harus jelas, praktis, dan normatif, semua pada waktu yang sama. Teori harus menjelaskan sesuatu yang keliru dengan kenyataan sosial kekinian, mengidentifikasi para pelaku agar mengubah kekeliruan, dan menyiapkan keduanya dalam hal norma-norma yang tepat untuk kritik dan tujuan yang praktis yang dapat dicapai untuk transformasi sosial. Meminjam istilah Habermas (dalam McCharthy, 2011) bahwa kritik ialah untuk tujuan komunikasi. Kritik sosial oleh karena itu bermakna terciptanya masyarakat yang komunikatif. Artinya, terciptanya suatu kondisi dinamis dimana manusia sebagai anggota masyarakat terbebas dari perilaku penindasan dan ketertindasan baik secara ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kritik sosial oleh karena itu bermakna pembebasan.

d. Perspektif Teori Konflik

Pendekatan perspektif ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx. Marx melihat bahwa masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok atau kelas, dimana masyarakat kelas atas senantiasa meneghegemoni masyarakat kelas bawah. Selain Marx dan Hegel tokoh lain dalam pendekatan konflik adalah Lewis Coser.

Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga andaian mendasar, yaitu: 1) rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar di mana mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya, 2) kuasa adalah inti dari struktur sosial, dan hal ini mencipta perjuangan

untuk mendapatkannya, dan 3) nilai dan idea adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, berbanding sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat (Hardiman 1990).

Teori konflik berakar dari fahaman Marxisme tradisional yang menyatakan bahwa revolusi adalah suatu keperluan yang disebabkan oleh memburuknya hubungan produksi yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. Marxisme tradisional tersebut banyak mendapatkan kritikan dari generasi Marxisme baru, terutama terhadap pendekatannya yang bersifat mekanistik. Generasi Marxisme baru, dipengaruhi oleh pemikiran Antonio Gramsci, menyatakan bahwa peranan manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis dan pendidikan, dalam mengubah krisis ekonomi menjadi krisis umum. Mereka menolak bahwa ekonomi adalah sesuatu yang penting dan faktor penentu bagi perubahan sosial, serta menolak gagasan determinisme bersejarah yang mengagungkan manusia sebagai faktor penting di antara banyak faktor lain yang saling bergantung secara dialektik. Mereka mengajukan hujah bahwa gerakan sosial yang berlaku pada tahun 1970an dan 1980an sama sekali tidak menekankan ke arah gerakan perjuangan kelas, seperti yang makna oleh penganut Marxisme tradisional. Gerakan spiritual, gerakan feminisme, gerakan hak azasi manusia dan hak-hak sipil, gerakan anti perang dan anti nuklir, gerakan sosial berazaskan komunitas dan gerakan pecinta lingkungan, serta gerakan lembaga swadaya masyarakat (NGO) merupakan gerakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas pekerja.

Thomas Bernard (1983), mencoba meletakkan teori fungsionalisme struktur dan teori konflik dalam konteks perbincangan yang lebih luas. Teori konsensus (yang salah satunya adalah fungsionalisme struktur) memandang norma dan nilai sebagai

landasan masyarakat, menumpukan perhatian kepada keteraturan sosial berazaskan atas kesepakatan diam-diam, dan memandang perubahan sosial berlaku secara lambat dan teratur. Sebaliknya, teori konflik menekankan kepada dominasi kelompok sosial tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial didasarkan atas manipulasi dan kawalan oleh kelompok dominan, dan memandang perubahan sosial berlaku secara cepat dan mengikut cara yang tidak teratur ketika kelompok subordinat menggulingkan kelompok yang semula dominan (Ritzer 2005). Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan penganut teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Golongan fungsionalis menyatakan bahwa setiap unsur masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan, sementara penganut teori konflik melihat berbagai unsur kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.

Ralf Dahrendorf (dalam Ritzer 2005), tokoh utama teori konflik, berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, dan oleh kerana itu teori sosiologi terbahagi menjadi dua bahagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus untuk menguji nilai integrasi dalam masyarakat, dan teori konflik untuk menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf turut mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang satu sama lain saling berkaitan. Jadi, dalam kenyataannya konflik akan muncul pada satu kelompok atau masyarakat setelah terjadinya konsensus lebih dahulu. Artinya, terjadinya konflik dalam masyarakat atau kelompok sosial setelah terjadinya hubungan sosial, integrasi dan interaksi sosial terlebih dahulu. Bagitupun sebaliknya, konflik pun boleh mencipta konsensus dan integrasi sosial.

Meskipun ada hubungan timbal balik antara teori konsensus dan teori konflik, menurut Dahrendorf, mustahil menyatukan teori

untuk menerangkan satu masalah, kerana perbezaan paradigma dan pendekatan berfikir masing-masing teori dalam menjelaskan satu fenomena sosial (Ritzer 2005). Perbezaan sudut pandang teori dalam menganalisis satu fenomena sosial akan sangat berpengaruh kepada rangka dan struktur berfikir dalam memahami realitas yang ada, yang nantinya berpengaruh kepada cara pengambilan kesimpulan terhadap fenomena yang diamati.

Perspektif teori konflik juga memiliki akar pemikiran pada pemikiran beberapa ahli sosiologi klasik terutama pada Karl Marx. Meskipun demikian, para ahli dari perspektif teori konflik modern juga banyak memberi sumbangan pemikiran, terutama dari John Stuart Mill, Ralph Dahrendorf, Lewis Coser dan sebagainya. Dalam pandangan para ahli dari perspektif teori konflik ini masyarakat akan dapat dengan tepat dianalisis jika menggunakan konsep kekuasaan dan konflik.

Karl Marx memulainya dengan suatu asumsi dasar yang sederhana, yaitu struktur dari masyarakat ditentukan oleh organisasi ekonomi, terutama pada pemilikan barang produksi (*ownership of poverty*). Dogma agama, nilai-nilai budaya, kepercayaan individual, susunan dan struktur lembaga-lembaga dalam masyarakat, semuanya secara mendasar merupakan refleksi dari organisasi ekonomi yang ada dalam masyarakat. Menyatu dalam sistem ekonomi, kesenjangan dalam pemilikan barang produksi telah mendorong terjadinya konflik antar kelas secara revolusioner.

Kelas yang tidak menguasai alat produksi telah menjadi kelas yang dieksploitasi, senantiaisa berjuang memperbaiki posisi mereka yang rendah dan tertindas dan secara revolusi mereka melawan kelas yang dominan dalam penguasaan faktor produksi. Dalam pandangan Marx, cerita sejarah tentang manusia tidak lain adalah cerita tentang perjuangan kelas antara para pemilik alat produksi dengan para buruh yang tidak menguasai alat produksi, antara yang

didominasi melawan yang mendominasi atau antara yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan.

Konflik merupakan fenomena yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial dan sebagai hasilnya, masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang terus menerus. Berbeda dengan Marx, para ahli sosiologi perspektif konflik masa kini jarang yang melihat konflik senantiasa merupakan refleksi dari organisasi ekonomi maupun kepemilikan (*ownership*). Konflik dalam pandangan para ahli perspektif konflik masa kini, meliputi bidang yang luas di mana terjadi pertentangan dari berbagai kepentingan dan kelompok dalam masyarakat.

Jadi konflik bukan hanya antara pemilik modal dengan para buruh seperti dikemukakan oleh Marx, tetapi juga meliputi pertentangan antara orang muda dengan orang tua, antara pria dan wanita, antara satu etnis atau ras tertentu dengan etnis atau ras tertentu sebagaimana antara pemilik modal dengan para buruh. Konflik ini disebabkan karena sesuatu yang dihargai dalam masyarakat (kekuasaan, ilmu pengetahuan, tanah, uang dan sebagainya) tidak terdistribusi merata dan tidak semua orang dapat memperolehnya secara sama. Sesuatu yang bernilai itu merupakan komoditas yang terbatas, sedangkan permintaan (*demand*) akan hal itu lebih besar dari penawaran (*supply*) yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu barang siapa dapat memiliki atau mengontrol barang dan jasa yang bernilai dalam masyarakat, akan cenderung mempertahankan dan melindungi kepentingannya terhadap usaha pihak lain untuk merebutnya.

Dalam pandangan yang demikian, konflik tidak selalu berarti perang, kekerasan dan sejenisnya. Konflik menunjuk pada perjuangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan setiap anggota masyarakat untuk berusaha mempertahankan, meningkatkan dan menjaga posisi sosial mereka dalam kehidupan

sehari-hari. Konflik juga tidak dilihat sebagai proses yang destruktif (merusak) yang akan membawa paada kondisi ketidak-terauran (disorder) dan pecahnya masyarakat.

Beberapa ahli perspektif teori konflik modern misalnya Dahrendorf dan Lewis Coser bahkan melihat adanya peranan konflik dalam menciptakan integrasi, yang ditandai oleh adanya kekuatan yang menyumbang terjadinya keteraturan dan stabilitas. Bagaimana konflik memiliki peran integratif dapat dipahami dengan melihat bahwa semua orang memiliki kepentingan yang sama akan bekerja sama untuk berusaha mencapainya agar keuntungan dapat diraih bersama. Konflik antar ras misalnya dapat menjadi pengikat kebrsamaan dalam suatu ras tertentu, mengabaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka sendiri.

Teori ini berbeda dengan dari struktural fungsional. Jika teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang senantiasa dalam keadaan ekulibrium atau kesimbangan, teori konflik sebaliknya, melihat masyarakat sebagai arena bagi terjadinya pertentangan yang terus menerus dan terjadi perubahan-perubahan. Teori struktural fungsional melihat proses sosial merupakan proses yang terus menerus dengan mengembangkan keselarasan (harmony), sebaliknya teori konflik melihat proses sosial sebagai proses perjuangan yang terus menerus menuju sarannya.

Teori struktural fungsional melihat masyarakat pada dasarnya berlandaskan pada konsensus, terintegrasi dan statis, di lain pihak teori konflik melihat masyarakat itu pada dasarnya ditandai oleh adanya paksaan, pertentangan dan perubahan yang terus menerus. Jika teori struktural fungsional dikritik karena terlalu menekankan pada stabilitas dan status quo serta mengabaikan perubahan, sebaliknya teori konflik dikritik karena terlalu kontroversial dan terlalu berlebihan dalam melihat keteraturan atas dasar paksaan.

e. Perspektif Teori Pertukaran.

Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Dengan kata lain, Manusia adalah makhluk transaksional. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap: pertama, keseimbangan antara apa yang di berikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Kedua, jenis hubungan yang dilakukan, dan ketiga, kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

Pada umumnya, hubungan sosial terdiri daripada masyarakat, maka kita dan masyarakat lain di lihat mempunyai perilaku yang saling memengaruhi dalam hubungan tersebut, yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan. Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, manakala pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, dan persahabatan.

Analogi dari hal tersebut, pada suatu ketika anda merasa bahwa setiap teman anda yang di satu kelas selalu berusaha memperoleh sesuatu dari anda. Pada saat tersebut anda selalu memberikan apa yang teman anda butuhkan dari anda, akan tetapi hal sebaliknya justru terjadi ketika anda membutuhkan sesuatu dari teman anda. Setiap individu menjalin pertemanan tentunya mempunyai tujuan untuk saling memperhatikan satu sama lain. Individu tersebut pasti diharapkan untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya, saling membantu jikalau dibutuhkan, dan saling memberikan dukungan dikala sedih. Akan tetapi mempertahankan hubungan persahabatan itu juga

membutuhkan biaya (*cost*) tertentu, seperti hilang waktu dan energi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak jadi dilaksanakan.

Meskipun biaya-biaya ini tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mahal atau membebani ketika dipandang dari sudut penghargaan (*reward*) yang didapatkan dari persahabatan tersebut. namun, biaya tersebut harus dipertimbangkan apabila kita menganalisa secara obyektif hubungan-hubungan transaksi yang ada dalam persahabatan. Apabila biaya yang dikeluarkan terlihat tidak sesuai dengan imbalannya, yang terjadi justru perasaan tidak enak di pihak yang merasa bahwa imbalan yang diterima itu terlalu rendah dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang sudah diberikan.

f. Perspektif Teori Interaksional Simbolik

Pandangan ini mengkaji masyarakat dari interaksi simbolik yang terjadi di antara individu dan kelompok masyarakat. Tokoh yang menganut pandangan interaksionis misalnya G.H Mead dan C. H Cooley. Mereka berpendapat bahwa interaksi manusia berlangsung melalui serangkaian simbol yang mencakup gerakan, tulisan, ucapan, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Pandangan ini lebih mengarah pada studi individual atau kelompok kecil dalam suatu masyarakat, bukan pada kelompok-kelompok besar atau institusi sosial.

Tokoh utama perspektif ini dibangun oleh George Herbert Mead, William Issac Thomas, dan John Dewey, TH. Cooley. Perbedaan utama perspektif ini dengan perspektif terdahulu terletak pada ukuran dari unit yang dipakai dalam analisis dan penelitian. Jika teori evolusi, struktural fungsional, maupun konflik terletak pada ukuran dari unit yang dipakai dalam analisis dan penelitian. Jika teori evolusi, struktural fungsional maupun konflik berada pada tataran sosiologi makro, yang melihat masyarakat sebagai suatu susunan yang besar: organisasinya, lembaga-lembaganya, kelas-kelas sosial dan sebagainya, maka perspektif teori interaksionisme

simbolik berada pada tataran mikro sosiologi, yang mremusatkan perhatiannya pada individu dalam masyarakat dan definisi situasi, makna, peran, pola interaksi yang dibuat individu. Meski antar berbagai perspektif kedua tataran ini kadang terjadi tumpang tindih (*overlap*), tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan asumsi dan teori yang mendasar diantara keduanya.

Bagi perspektif interaksionisme simbolik yang penting bagi sosiologi adalah memahami bagaimana individu mempengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi juga dipengaruhi oleh masyarakat. Perspektif ini berasumsi bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang telah mengalami proses sosialisasi dan eksistensi serta strukturnya nampak dan terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung diantara individu dalam masyarakat tersebut dalam tingkatan simbolik

Dalam perspektif ini sesuatu yang penting pada penggunaan simbol. Untuk memperjelas makna simbol dapat dijelaskan dengan contoh, misalnya seseorang yang mengendarai mobil di perempatan yang ada lampu pengatur lalu lintas yang menyala adalah merah, maka iapun berhenti, padahal yang ada di hadapannya bukanlah obyek fisik yang dapat menghalanginya. Berhentinya seseorang di lampu merah jelas karena ia telah belajar, telah tahu bahwa lampu merah adalah pertanda atau simbol bahwa ia harus berhenti. Contoh lain adalah, seorang laki-laki yang mengulurkan tangannya merupakan tanda bersahabat, akan tetapi kalau ia mengepalkan tangannya tentu bermakna sebaliknya. Dalam kehidupan yang nyata kegagalan merumuskan situasi perilaku secara benar dapat menimbulkan akibat-akibat yang kurang menyenangkan atau malah bisa berakibat fatal.

Sebagaimana dituangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam buku mereka *Social Construction of Reality* (1966) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (1990). Masyarakat merupakan kenyataan obyektif dalam

arti orang, kelompok, dan lembaga-lembaga adalah nyata. Akan tetapi, masyarakat adalah juga suatu kenyataan subyektif dalam arti bagi setiap orang, atau lembaga-lembaga lain tergantung pada pandangan subyektif orang tersebut. Apakah sebagai orang sangat baik atau jahat, apakah polisi pelindung atau penindas masyarakat, apakah perusahaan swasta melayani kepentingan umum atau pribadi-ini adalah persepsi yang mereka bentuk dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan persepsi ini merupakan “kenyataan” bagi mereka yang memberikan penilaian tersebut.

Dalam hal ini perspektif interaksionisme simbolik memulainya dengan konsep diri (*self*), diri dalam hubungannya dengan orang lain dan diri dan orang lain itu dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam konteks sosial inilah dapat dipahami mengapa seseorang memiliki anggapan negatif terhadap lainnya, mengapa lebih mudah bergaul dengan seseorang dari pada lainnya maupun mengapa lebih enak berada diantara orang-orang yang sudah dikenal dari pada diantara orang-orang yang belum dikenal. Jadi dalam hal ini perspektif interaksionisme simbolik memahami individu dalam konteks sosialnya, melalui pemahaman lingkungan sosial (*sosial setting*), dari sinilah kemudian dapat dipahami interaksinya, nilai-nilainya, misalnya pantas-tidak pantas, baik-buruk dan sebagainya.

g. Perspektif Teori Feminisme

Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Namun sekarang ini kepustakaan internasional mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki laki.

Gerakan feminis dimulai sejak akhir abad ke-18 dan diakhiri abad ke-20. Gerakan feminis pada akhir abad ke-20, banyak dipandang sebagai sempalan gerakan Critical Legal Studies, yang banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar. Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriaki. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh idiologi pembuat keputusan, dan idiologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriaki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku

Feminis menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriaki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Pemahaman kebudayaan menyangkut persoalan-persoalan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial, sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu. Juga

tergantung pada bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut berhubungan dengan posisi kaum perempuan di berbagai komunitas. Para antropolog sekalipun, yang tengah menyelidiki posisi perempuan dalam perkembangan masyarakat secara tidak sadar ikut terlibat dalam perdebatan menyangkut asal usul dan universalitas keterpinggiran kaum perempuan. Dengan begitu kajian ter-hadap hubungan hirarkis antara laki-laki dan perempuan menjadi penting.

Laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetis berbeda, adalah sebuah kenyataan, sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi yang kemudian melahirkan perdebatan adalah ketika perbedaan secara *natur* ini lalu kemudian menimbulkan pemahaman yang beragam pada masing-masing orang dan kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman ini selanjutnya dikenal dengan konsep *gender*, yaitu beberapa sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, 1997). Misalnya, stereotipe perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, keibuan, emosional atau lebih sabar. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Stereotipe-stereotipe ini dapat dipertukarkan dan bisa jadi berbeda pada masing-masing masyarakat, tergantung pada budaya dan sistem nilai yang di-bangun.

Pada prinsipnya adanya perbedaan gender (*gender differences*), yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang didasarkan atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan oleh karena itu tidak perlu digugat. Jikalau secara kodrati kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, lalu kemudian memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik, adalah persoalan *nature*, alamiah. Persoalannya adalah, ternyata peran gender perempuan, dalam ranah sosial, dinilai dan

dihargai jauh lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Peran gender ternyata melahirkan ketidakadilan, pendiskriminasian dan penindasan terhadap kaum perempuan. Ini pada dasarnya adalah sebuah *socially constructed*, sebuah *image* yang dibangun oleh komunitas tertentu melalui proses sosial yang amat panjang yang disosialisasikan bahkan diperkuat melalui legitimasi nilai-nilai budaya dan agama.

3.3. Paradigma Sosiologi

Dalam dunia sosiologi, pergulatan pemikiran terkait dengan obyek kajian atau *what is the subject matter of sociology* juga sangat tampak. Para ilmuwan berbeda pendapat tentang masalah ini. Sehingga Ritzer (2005) menilai bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempunyai beberapa paradigma (*multiple paradigm*). Dan masing-masing paradigma tersebut berbeda mengenai obyek kajian, teori, dan metode analisisnya. Para ahli membagi empat paradigma dalam sosiologi, yakni paradigma *Fakta sosial*, *Definisi Sosial*, *Perilaku Sosial*, dan *Integratif*.

Paradigma Fakta Sosial, terdiri dari sekumpulan teori para teoritis sosial yang memusatkan perhatian atau menjadikan apa yang disebut Durkheim sebagai fakta sosial; struktur dan institusi sosial berskala luas beserta pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu sebagai *subject matter* sosiologi. Dengan kata lain, para teoritis yang masuk dalam paradigma fakta sosial ini memusatkan pada *struktur makro*. Mereka mengasumsikan bahwa terdapat keajegana (*in-stable*) dalam kehidupan manusia. Dan di dalam keajegan tersebut ada perubahan dalam suatu waktu tertentu, serta tidak ada suatu fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya.

Exemplar paradigma ini adalah karya Emile Durkheim, terutama *The Rules of Social Method* dan *Suicide*. Dua tulisan ini

menggambarkan sasaran kajian sosiologi yang disebutnya sebagai fakta sosial. Menurut Durkheim fakta sosial ialah barang (*thing*) yang berbeda dengan ide yang menjadi obyek kajian seluruh ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (*spekulatif*), akan tetapi melalui pengumpulan data riil di luar pemikiran manusia. *Thing* dapat dibagi menjadi dua, yakni dalam bentuk barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi, contohnya adalah arsitektur, norma hukum dan lainnya. Kedua dalam bentuk *non-material*, yakni fenomena yang terkandung dalam diri manusia sendiri, hanya muncul dalam kesadaran manusia, contohnya kelompok, altruisme, egoisme dan sebagainya.

Satu metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah kuantitatif, interview-kuesioner dan perbandingan sejarah. Metode ini memungkinkan adanya reduksi berbagai fakta ke dalam variable-variabel sederhana. Di antara kompleksitas fakta tersebut dimungkinkan terjadinya reduksi fakta secara simpel ke dalam variabel-variabel penelitian.² Teori yang dominan dalam paradigma ini adalah *teori struktural fungsional*, *teori konflik* dan *teori sistem*. Ringkasnya, paradigma ini memiliki asumsi dasar tentang fakta sosial sebagai berikut: *general*, *external*, and *coercion*.

Paradigma selanjutnya ialah paradigma definisi sosial, yang mencakup teori-teori yang menganggap *subject matter* dari sosiologi adalah tindakan sosial yang penuh arti. Paradigma ini diambil dari salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Max Weber, yakni tentang tindakan sosial (*social action*). Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber,

berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika ia mengambil manfaat dari tindakan itu sendiri dalam tindakannya; memberikan perbedaan makna kepada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu.

Tiga karya Weber tersebut membantu menimbulkan minat para teoritis yang menganut paradigma ini dalam mempelajari cara actor mendefinisikan situasi sosial mereka dan dalam mempelajari pengaruh definisi situasi sosial terhadap tindakan dan integrasi berikutnya. Ada beberapa teori yang masuk dalam paradigma ini, yakni *teori tindakan*, *interaksionalisme-simbolik*, *fenomenologi*, *etnometodologi* dan *eksistensialisme*. Ringkasnya paradigma ini memiliki tiga premis berikut: Manusia adalah aktor kreatif, Fakta sosial memiliki arti subyektif (motivasi & tujuan), Cara aktor mendefinisikan fakta sosial adalah cara mereka mendefinisikan situasi.

Paradigma perilaku sosial, lebih mengacu pada karya psikolog B.F. Skinner sebagai eksemplar. Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Karyanya meliputi spectrum yang sangat luas. Teori, gagasan, dan praktek yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner melihat paradigma fakta sosial dan definisi sosial sebagai perspektif yang bersifat mistik, dalam arti mengandung suatu persoalan yang bersifat teka-teki, tidak dapat diterangkan secara rasional.

Kritik Skinner ini tertuju kepada masalah yang substansial dari kedua paradigma itu, yakni eksistensi obyek studinya sendiri. Menurutnya, kedua paradigma itu membangun obyek studi berupa sesuatu yang terdiri atas struktur sosial dan pranata sosial yang menjadi obyek studi paradigma fakta sosial serta sesuatu yang terjadi

dalam pemikiran manusia berupa “tanggapan kreatif” terhadap suatu rangsangan atau stimulus dari luar dirinya, yang menjadi obyek penyelidikan paradigma definisi sosial oleh Skinner dinilai keduanya sebagai suatu obyek yang bersifat mistik. Menurutnya dengan memusatkan perhatian kepada kedua hal tersebut, berarti menjauhkan sosiologi dari obyek studi berupa barang sesuatu yang konkrit realistik.

Menurut Skinner, obyek studi sosiologi yang konkrit-realistik itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (*behavior of man and contingencies of reinforcement*). Ringkasnya, perhatian utama paradigma perilaku sosial ini tertuju pada hadiah (*rewards*) yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman (*punishments*) yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Metode paradigma ini adalah eksperimen. Dan yang masuk dalam paradigma ini adalah sosiologi behavioralisme dan teori pertukaran (*exchange*).

Paradigma yang terakhir ialah paradigma integratif. Paradigma ini merupakan bagian dari upaya ilmuwan sosial dalam mengatasi ketegangan yang terjadi antara pendukung paradigma yang ada sekaligus mengatasi keberatsebelahan pandangan mereka dalam memandang *subject matter* dari sosiologi. Seperti paradigma fakta sosial yang hanya memusatkan perhatian pada struktur makro, paradigma definisi sosial yang hanya memusatkan perhatian pada tindakan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas. Sedangkan paradigma perilaku sosial terlalu memusatkan pada perilaku saja.

Menurut Ritzer (2004) perlunya paradigma integrasi ini karena teramat sukar untuk memahami fenomena sosial yang beraneka ragam dan saling mempengaruhi, sehingga untuk memahaminya jelas dibutuhkan kemampuan untuk menguraikan dan menjelaskan empat tingkat mendasar analisis sosial dalam satu kesatuan, yakni *makro-subyektif* seperti nilai, *makro-obyektif* seperti birokrasi, *mikro-obyektif* seperti pola interaksi dan *mikro-subyektif* seperti konstruksi sosial. ❁

BAB IV

DAKWAH DALAM INTERPRETASI SOSIOLOGI

Sosiologi dakwah merupakan cabang ilmu yang mengkaji serta membahas dakwah dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Gambaran skema dakwah dalam pandangan sosiologi adalah sebuah sistem tindakan sosial yang nilai-nilainya terlebih dahulu menjadi suatu bagian yang melembaga dari segenap masyarakat dakwah. Sebagai lembaga, nilai-nilai dakwah menjadi sesuatu yang dihormati, dihargai difahami dan ditaati. Sistem nilai tersebut tidak akan dapat diterjemahkan ke dalam realitas sosial tanpa adanya *agent of socialization* yang berperan aktif untuk mentransformasikan nilai-nilainya. Karena itu, nilai normatif dakwah harus melalui proses bekesinambungan yang tertata melalui jalan interaksi dan tindakan. Ada upaya mengkomunikasikan autententik nilai yang tersirat dalam dakwah berupa verbal maupun non-verbal dalam bentuk berbagai tindakan atau kerja nyata untuk menghasilkan suatu kondisi dan tatanan baru dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mobilisasi.

Sebagai sebuah proses dimana masyarakat tidak mudah menerima nilai-nilai baru dan bahkan memiliki tendensi sifat menyimpang dari nilai normatif yang ada, dakwah layaknya seperti sebuah kapal di tengah hamparanlautan bebas yang penuh gelombang ombak yang kerap kali menggoyahkan seluruh penumpangnya. Tidak hanya

mereka para pengemban dakwah atau da'i yang akan mendapatkan teguran sosial dari berbagai lapisan masyarakat berupa resistensi radikal maupun non radikal tetapi masyarakat dakwah yang telah mengazamkan hatinya pada nilai ilahiyah juga akan mengalaminya sebagai sebuah dinamika sosial dakwah. Jadi, dalam sosiologi dakwah tidak hanya melihat bagaimana normatifnya dakwah tetapi juga menilik dakwah dalam dinamika sosial masyarakat. Ekspektasi pandangan kajian ini, bagaimana dakwah tetap berperan aktif dalam pergulatan dinamika sosio kultur suatu masyarakat dalam prosesnya menyampaikan dan menyadarkan masyarakat kepada fitrahnya.

Kegagalan dakwah pada masa kini yang kurang berfungsi untuk memperbaiki umat menjadi bahan evaluasi mendasar ada apa dengan dakwah? Tersebar kegiatannya baik yang ditampilkan pada siaran televisi maupun tidak hanya sebagai sensasi ritual dan rutinitas belaka yang tumpul akan pengaruh untuk mendobrak kerangka berpikir dan bertindak masyarakat agar memperbaiki diri dan keluarganya sesuai dengan nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Maka kajian dan aksi dakwah bukan lagi *unplanned action* yang dijalankan sesuai kehendak dai sebagaimana yang sudah sudah.

Pemahaman dakwah harus bermetamorfosa kepada kekomprehensifan nilai sebagai wujud *rahmatallil'alam*. Dakwah harus masuk kesemua lapisan masyarakat baik tingkat mikro yaitu dalam tingkatan interaksi antar individu dalam masyarakat, tingkat mezo berupa tingkatan antar berbagai hubungan kelompok dalam masyarakat, dan tingkat makro yaitu pada tatanan struktural.

Dakwah bukan hanya tindakan pada tingkatan mikro sebagaimana yang telah eksis saat ini tetapi dakwah juga harus menginternalisasikan diri kepada jenjang yang lebih besar yaitu tatanan struktural. Artinya dakwah tidak hanya sekedar tabligh. Dakwah juga harus masuk ke arena perpolitikan yang selama ini amat canggung dipandang sebagian orang. Dakwah harus ada di

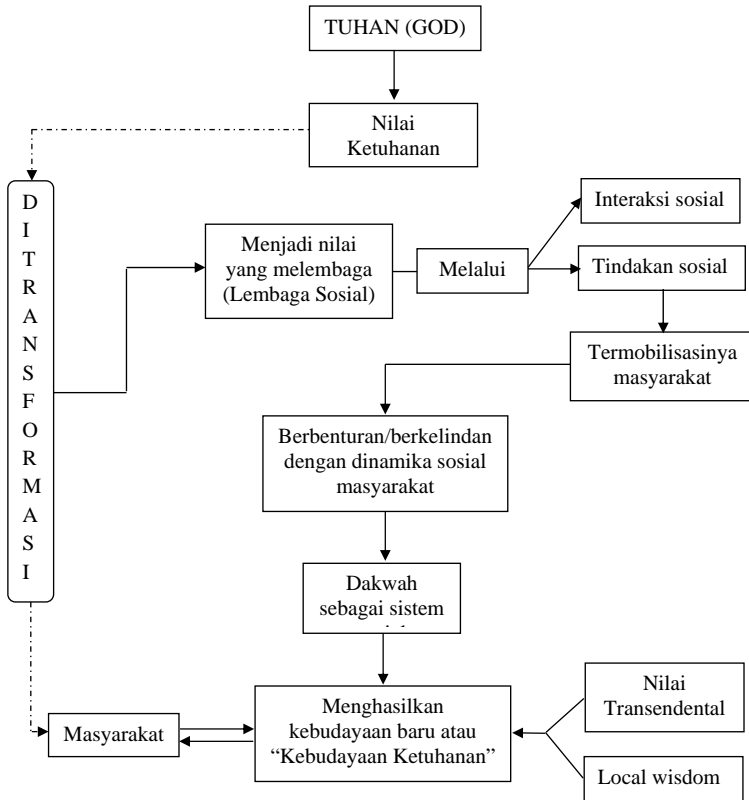
pemerintahan yang pada akhirnya dakwah harus hadir ke dalam kedaulatan negara. Pandangan semacam ini menekankan bahwa adalah kerja terstruktur sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai element saling mendukung dengan segenap fungsinya yang berjalan dengan baik. Ibarat sebuah pesawat, mesinnya tidak hanya bekerja di dalam tetapi menghasilkan turbelensi yang bekerja ke luar untuk bisa terbang mengudara ke angkasa membawa seluruh awak penumpang ke tempat tujuan. Begitu juga dengan dakwah, sebagai sistem tidak hanya memperkuat elemennya bergerak sebagai wadah keseimbangan, tetapi juga memungsiakan segenap elemennya agar berfungsi ke segenap penjuru dan lapisan struktur masyarakat agar dapat membawa penduduk bumi sebagai penumpang di awak dakwah agar sampai kepada tujuan hakiki berupa kebahagiaan sejati.

Ketika dakwah tersistematis sebagai sebuah sistem maka dakwah akan menghasilkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan tersebut terwujud atas dasar kerja harmoni dakwah yang menghasilkan kebudayaan baru di tengah budaya yang ada. Ia tidak membasmi kebudayaan dengan seperangkat nilai yang tumbuh di masyarakat. Tetapi dakwah menyemai dan menyumburkan nilai yang berkembang tersebut sebagai satu kesatuan nilai. Ada perpaduan antara nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan nilai transendental yang normatif. Oleh karenanya, masyarakat yang telah tersentuh dengan dakwah yang demikian tidak akan berpikir segementatif dan parsial bahwa, dikatakan beragama yang taat disaat telah memakai sorban kesana kemari, disebut sebagai hamba yang taat disaat telah memakai jubah dalam kesehariannya. Wujud hamba yang religius tidak dipandang kepada simbol-simbol umum yang melekat pada dirinya tetapi terbukti disetiap helaan nafas, pandangan atau pola pikir, dan disetiap tindakan yang diperbuat.

Disinilah dakwah bermakna sebagai *centre of cultur* yang menghasilkan kebudayaan baru melalui proses akulturasi dan

enkulturasi, dakwah berbudaya dan menghasilkan kebudayaan, dakwah bermoral dan menghasilkan moral, dakwah bernilai dan menghasilkan nilai.

Secara terperinci, untuk memudahkan pemaknaan sosiologi dakwah dapat diamati pada skema di bawah:



(Skema Dakwah Diterjemahkan Ke Dalam Masyarakat)

4.1. Dakwah Sebagai Lembaga Sosial

Lembaga sosial merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, *sosial institution*, yang masih banyak mengandung perdebatan mengenai defenisinya. *sosial institution* juga diterjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan *sosial institution* merujuk

pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga sosial menurut Koentjaraningrat (dalam Soekanto 2001) merupakan suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara menurut Cohen lembaga sosial merupakan sistem pola sosial yang tersusun rapi dan secara berkala relative bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Jadi lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. sifatnya abstrak hanya dapat dipahami dari dimensi paradigma bukan dalam bentuk kongkrit seperti lembaga sosial yang penuh dengan bangunan-bangunan dan struktur kepemimpinannya. Lembaga sosial merupakan sistem nilai yang telah dipahami dan dihargai oleh masyarakat.

Melalui sudut pandang ini, dakwah sebagai lembaga sosial merupakan sistem nilai yang diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat dakwah. Nilai-nilai dakwah menjadi suatu bangunan sistem yang berada dalam paradigma masyarakat berdasarkan fungsinya sebagai khalifah. Lahir sebuah pengertian mengenai esensi kehadiran manusia dalam masyarakat akan kewajiban untuk menyampaikan atau mentransfer nilai ilahiyah demi melahirkan kebudayaan ketuhanan di setiap lapisan masyarakat.

Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekanto (2001) bahwa lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk

mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial.

Meminjam istilah Lawang (1985) *institutionalization*, dakwah sebagai proses internalisasi bagaimana suatu perilaku menjadi berpola dengan alur nilai-nilai dakwah. Dalam perkataan lain, dakwah sebagai lembaga sosial adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan bersama. Esensi dakwah sebagai lembaga sosial ditujukan sebagai perannya menata kehidupan sosial masyarakat, dengan sistem berfikir yang mempengaruhi pikiran orang ke jalan yang benar. Menyadarkan kesadaran semunya tentang kehidupan dunia menjadi kesadaran nyata akan hakikat eksistensinya di tergabung dalam masyarakat.

Dakwah disebut sebagai lembaga sosial manakala dakwah sebagai sistem nilai telah diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat umum sehingga pemaknaan "*ballighu 'anni walau ayah*" inheren dan menjadi tindakan utama oleh kelompok-kelompok manusia dalam masyarakat dengan mematuhi segala bentuk aturan yang terkandung di dalamnya.

Kalaulah dakwah secara konsisten dimaknai tidak hanya aktivitas mengajak, menyeru, menyampaikan, atau yang sering disebut *tabligh*, bahwa dakwah bermakna luas dan dalam, yaitu keniscayaan kehidupan masyarakat muslim. Maka dakwah merupakan sistem nilai. Sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai kelanjutan dari implementasi dan aktulisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat muslim. Aktivitas dakwah dengan begitu berarti segala aktivitas hidup masyarakat muslim yang teratur dan ditata oleh nilai-nilai implemtatif ajaran Islam secara kaffah.

Sebagai lembaga sosial, dakwah merupakan sistem nilai dan norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Mengatur segala tingkah polah dan perilaku masyarakat mislim sebagai kelompok sosial dalam interaksinya. Sistem nilai yang juga mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Tatanan kehidupan yang mengandung nilai-nilai ketuhanan. Kehidupan yang islami. Dengan begitu, memaknai dakwah semestinya dalam fungsinya sebagai sumber pedoman hidup bagi masyarakat dan pengatur tata cara hubungan manusia dengan sesama dan manusia dengan Tuhan.

Di sisi lain, bila dakwah diterjemakan sebagai aktivitas tabligh, maka mesti juga ada sistem nilai dan norma yang mengatur hubungan interaksi antara *da'i* dan *mad'u*. *Da'i* dan *mad'u*, yang keduanya merupakan dan berasal dari masyarakat lokal yang beradat dan berkebudayaan semestinya juga diikat oleh nilai dan norma, dimana aktivitas dakwah berlangsung. Tentunya sepanjang nilai dan norma tersebut bersesuaian dengan prinsip dasar ajaran Islam. Dakwah harus dilakukan secara beradat dan beradab. Oleh karenanya dakwah, dalam berbagai pemahaman dan aktivitasnya, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih dari sekedar perilaku moral. Dakwah haruslah menawarkan suatu “pandangan dunia” dan jawaban atas berbagai persoalan yang membingungkan umat. Bukah, malah semakin membingungkan, melahirkan masalah baru. Dakwah yang bernilai solutif. Dakwah juga mendorong manusia untuk tidak melulu memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan juga memikirkan kepentingan bersama.

Sosiologi tidak berusaha untuk menghakimi dakwah bagaimana adanya, namun sungguh-sungguh berupaya untuk menemukan pengaruh sosial dari berbagai aktivitas dakwah dan menemukan tendensi dari berbagai bentuk dan tradisi aktivitas dakwah yang berkembang dalam kondisi sosial tertentu. Sosiologi bertugas melakukan analisis terhadap berbagai pola tindakan dan pengaruh

dari dinamika dakwah yang sedang berjalan. Bagaimana dakwah dimakanai dan dipraktekkan, juga bagaimana dakwah berpengaruh pada perilaku hidup masyarakat.

Sering terjadi kekeliruan dalam mendefenisikan dakwah sebagai lembaga sosial dengan dakwah sebagai asosiasi. Dakwah sebagai lembaga, berbeda dengan asosiasi dakwah. Lembaga dakwah merupakan sistem nilai, tatanan yang mengandung metode yang dibakukan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Sedangkan sebagai asosiasi dakwah, adalah sekelompok orang yang terorganisir, berkumpul dan beraktivitas bersama, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu berdakwah, seperti DDI (Dewan Dakwah Indonesia). Yang perlu diingat ialah bahwa lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang teorganisasi. Setiap lembaga mempunyai asosiasinya, dan melalui asosiasi itulah norma-norma lembaga dilaksanakan.

Sebagai asosiasi, dakwah mesti dikelola secara profesional, apalagi pada masyarakat yang selalu menuju kearah kehidupan modern, dengan berbagai tipologinya. Dengan makin kompleksnya kebudayaan, banyak hal tidak lagi mudah ditangani sebagaimana biasanya. Keterampilan, kealian (*skill*) menjadi lebih terpesialisasi, dengan adanya “divisi tenaga kerja” pada masyarakat industri modern. Ini berarti bahwa banyak orang sepanjang hari bekerja sebagai pekerja individu yang terspesialisasi dan bukan sebagai bagian dari suatu team kerja masyarakat. Akhirnya organisasi dan pengawasan segaian besar kegiatan kerja individu bergeser kepada pabrik, toko atau kantor, dengan seorang mandor, dan bukan lagi oleh nilai, dan norma yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Sebagai ilustrasi, pergeseran pekerjaan pertanian ke pekerjaan yang bukan pertanian memperkecil wewenang seorang ayah, memperkecil jumlah anggota keluarga karena anak dipandang menjadi beban ekonomi dan bukan sebagai suatu modal dan

mendorong para wanita bekerja di luar rumah. Giliran kerja malam menyebabkan beribu-ribu tenaga kerja mengubah kebiasaan hidup keluarga. Sistem latihan kerja “lihat dan bantu” pada masyarakat pertanian digantikan oleh lembaga pendidikan yang formal.

Maka sebagai asosiasi atau organisasi, dakwah mesti di kelola secara profesional, terorganisir dengan tujuan dan langkah, serta metode yang terencana, terukur dan jelas. Perumusan dan perencanaan kegiatan dakwah yang juga memperhatikan dan didasarkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat. Dakwah tidak mungkin berhasil kepada sasaran dan tujuannya apabila mengabaikan realitas sosial masyarakat, dengan kecenderungan perubahan tipologisnya. Bagaimana dakwah harus mempertimbangkan pola kerja dan perilaku masyarakat yang semakin terspelisasi secara tegas. Dengan begitu, dakwah tidak mungkin lagi dilakukan dengan “cara-cara” lama. Tradisional dan konvensional. Penggalan dan penemuan cara-cara dakwah baru menjadi kemestian yang dilakukan setiap saat, apabila dakwah tidak akan kehilangan esensinya.

Untuk sampai pada tujuan terlembaganya dakwah (*institutionalization*), yaitu terinternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, dimana masing-masing pribadi muslim memandang dirinya sebagai *da'i*, yang setiap perilakunya mengandung nilai dakwah, maka dakwah harus dipandang sebagai proses sosial. Proses menuju terwujudnya masyarakat Islam *kaffah*. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan setiap pribadi muslim (*internalized*).

Oleh karena itu, Islam adalah dakwah. Dakwah menjadi instrumen penting tumbuh kembangnya kehidupan islami dalam kehidupan. Hal ini bermakna, bahwa dakwah bukan lagi sekedar aktivitas rutin para “pendakwah”, akan tetapi merupakan cerminan perilaku setiap pribadi muslim. Dengan begitu, dakwah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kebutuhan akan tatanan

kehidupan yang dinaungi oleh ridha-Nya. Kehidupan yang penuh kedamaian, saling menghargai, kehidupan yang harmonis. Disinilah makna dakwah sudah terlembaga. Dakwah yang bermakna sebagai lembaga sosial.

Sebagaimana sifatnya lembaga sosial, sisi lain yang juga harus difahami ialah, bahwa dakwah sebagai lembaga sosial pun ianya mempunyai dua sisi fungsi, yaitu fungsi *manifest* dan fungsi *latent*. Fungsi manifest lembaga sosial merupakan fungsi untuk tujuan yang direncanakan, yang merupakan tujuan lembaga yang disepakati dan diinginkan. Sementara fungsi *latent*, ialah fungsi yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui, atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan, yang terkadang dampaknya negatif.

Berbagai fungsi yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu sendiri. Misalnya, lembaga keluarga harus memelihara anak, lembaga ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok, sekolah harus mendidik anak-anak. Fungsi manifestnya jelas, diakui dan biasanya dipuji. Pada sisi lain, terdapat berbagai konsekuensi lembaga yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan dan tidak dapat diramalkan. Lembaga ekonomi tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi kadang-kadang juga meningkatkan pengangguran dan perbedaan kekayaan. Lembaga pendidikan tidak hanya mendidik anak-anak, tetapi juga menyelenggarakan hiburan dan menjauhkan orang-orang muda usia dari pasar tenaga kerja, yang menurut beberapa ahli teori konflik, melindungi anak-anak orang kaya dari persaingan dengan anak-anak orang miskin.

Mengambil contoh pada lembaga pendidikan, fungsi manifest yang utama dari pendidikan adalah membantu orang untuk sanggup mencari nafkah hidup dan menolong orang untuk mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pengembangan

masyarakat. Kedua fungsi tersebut saling berkaitan, namun tidaklah sama. Menjadi seseorang yang memiliki pendidikan yang lengkap merupakan suatu hal yang sulit, kecuali jika ia mampu memperoleh nafkah. Di lain pihak, seorang karyawan mungkin akan lebih dihargai, jika berpendidikan tinggi dan bukan hanya sekedar memiliki keterampilan khusus. Namun, pendidikan umum yang baik tidak selamanya menghasilkan keterampilan yang bisa dipasarkan; sedang pendidikan kejuruan yang fokusnya terlalu sempit dapat membuat orang tidak tahu menahu tentang pengetahuan kebudayaan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sukses. Kebanyakan pekerjaan memerlukan kemampuan membaca dan banyak juga yang memerlukan latihan khusus. Revolusi siberatika bersama mesin-mesin komputer dan robot menurunkan permintaan akan tenaga kerja yang terampil, dan menggeser kedudukan beberapa pekerjaan tradisional. Pasaran kerja bagi orang-orang profesional dan semiprofesional serta ahli-ahli tehnik semakin luas.

Masih banyak fungsi manifes pendidikan lainnya seperti: melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya; merangsang partisipasi demokratis melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas; memperkaya kehidupan dengan menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual dan cita rasa keindahan para siswa; meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan berbagai kursus; meningkatkan taraf kesehatan para pemuda bangsa melalui latihan olah raga dan kursus tentang ilmu kesehatan; menciptakan warga negara yang mencitai tanah air melalui pelajaran yang melukiskan kejayaan bangsa; menunjang integrasi antar ras dan suku yang berbeda dan yang terakhir “membentuk kepribadian”.

Namun, pada sisi lain, pendidikan mengandung fungsi laten, yaitu; pertama, menciptakan sikap tidak dewasa dan penguluran masa ketidakdewasaan. Masa pendidikan yang diperpanjang menunda pengalihan peranan orang dewasa kepada anak. Hal ini memperlambat masuknya sang anak ke pasaran kerja. Pendidikan tinggi lebih memperpanjang masa ketergantungan; bahkan para mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan sambilanpun biasanya masih harus memerlukan bantuan dari orang tua mereka. Contoh yang paling nyata adalah mahasiswa “abadi”, yang hanya mengumpulkan bobot kredit sementara ia masih hidup dari pinjaman, honor sebagai asisten atau pekerjaan yang tidak tetap, namun tidak pernah menyelesaikan studi dan ikut bersaing untuk memperoleh pekerjaan tetap.

Kedua, melemahnya pengawasan orang tua. Otoritas orang tua terhadap anak dikurangi oleh sekolah. Beberapa nilai orang tua mungkin saja ditentang atau bahkan diejek sebagai nilai yang aneh dan ketinggalan zaman. Sekolah seringkali mengembangkan perilaku murid dan menggunakan bahan-bahan pengajaran yang menentang standar moral orang tua. Dalam banyak hal, pengawasan orang tua dikurangi oleh sekolah.

Ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga pendidikan mengakui adanya hierarki peranan kedudukan dan status pekerjaan, karena hal tersebut diperlukan dalam mempersiapkan siswa untuk mendudukinya. Sementara itu, para siswa disosialisasikan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan sistem status dan peranan tersebut. Bukanlah merupakan rahasia bahwa jurusan-jurusan di Universitas, yang bertalian erat dengan persiapan kejuruan, seperti bisnis, perdagangan, pertanian dan teknik, mempunyai ciri khas yang secara politis sangat konservatif; sedang jurusan-jurusan yang paling kurang bertalian dengan pekerjaan, seperti ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu

pengetahuan sosial, adalah yang paling tidak konservatif. Beberapa penganut teori konflik berpendapat bahwa lembaga pendidikan dirancang dengan maksud untuk mempertahankan agar sistem kelas sosial tidak berubah. Selebihnya mengatakan bahwa hal tersebut sekedar konsekuensi laten dari latihan kerja.

Analisis terhadap berbagai tipologi masyarakat menunjukkan bahwa adanya muncul secara bersamaan fungsi lembaga sosial, dalam hubungannya dengan fungsi manifes dan fungsi laten. Diantara beberapa contoh kasus ialah, salah satu fungsi laten dari lembaga ekonomi modern dapat merusak kebudayaan tradisional. Kebiasaan pemilikan hak tanah, kepercayaan agama, organisasi keluarga, tempat pemukiman, dan banyak lagi pola kehidupan sosial yang sudah mapan, mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan industri. Mobilitas sosial dirangsang dan salah satu konsekuensinya ialah meningkatkan anomie (kekaburan norma) dan alienasi (rasa keterasingan). Dikaitkan dengan lembaga keagamaan, barangkali banyak orang akan menolak fungsi laten agama, dimana beberapa fungsi laten agama membawa konsekuensi yang seringkali bahkan mengagetkan orang beriman. Pada saat yang sama, mereka mungkin merangsang persetujuan atau perlawanan dari semua orang yang tidak menganggap dirinya sendiri sangat religius. Masjid, sebagai salah satu simbol agama, misalnya, yang merupakan wadah interaksi umat Islam, yang juga merupakan lingkungan beribadat. Kelompok remaja masjid diberi kesempatan untuk mempelajari pola-pola tingkah laku dari pergulatan status dan peran sosial keagamaan yang ada. Masjid juga menghiasi komunitasnya dengan bangunan yang indah dan inspiratif, merangsang kesenian dan musik islami, menyelenggarakan musabaqah, perayaan khatam qur`an dengan pernik-pernik budayanya. Pada sudut lain, fungsi laten masjid, mendorong terbaginya komunitas berdasarkan aliran, kelompok, status sosial dan kelas. Walaupun di masjid dikhotbahkan, di

hadapan Tuhan, semua orang adalah sama, namun terlihat juga di masjid dipamerkan perbedaan kekayaan yang tampak pada para anggota yang berpakaian bagus dan yang sangat sederhana pada setiap kegiatan ritual beribadah, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Perbedaan status sosial, pada realiasnya, sangat kelihatan di masjid.

Mencermati pernyataan di atas, jika dakwah ditempatkan sebagai lembaga sosial, maka munculnya dakwah dalam fungsi manifes dan fungsi laten, merupakan sesuatu yang harus difahami dan mendapat perhatian serius. Fungsi manifes dakwah yang merupakan upaya aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam, penciptaan kehidupan umat yang berakhlak, berperadaban dan keharmonisan kehidupan, akan selalu diiringi oleh fungsi-fungsi lain yang tidak diinginkan, apalagi yang berdampak negatif. Aktivitas dakwah yang memicu terjadinya konflik sosial antar umat muslim, atau dakwah yang menyebabkan masyarakat terkotak-kotak pada aliran-aliran tertentu, harus dihindari.

Oleh karena itu, harus ada upaya secara terus menerus oleh umat Islam, terutama para ulama dan tokoh masyarakat muslim untuk meminimalisir akses negatif (fungsi laten) segala bentuk aktivitas pengaktualisasian ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Islam dengan dakwahnya, semestinya menampakkan wajah yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Berbeda dengan lembaga sosial lain yang tumbuh dan berkembang secara alamiah berdasarkan hasil olah fikir manusia semata, sementara dakwah yang berangkat dari spirit Islam yang tidak hanya merupakan ikhtiar manusia semata, akan tetapi dituntun oleh nilai-nilai transenden, yaitu wahyu Tuhan. Dakwah semestinya diwujudkan sebagai lembaga sosial yang memiliki nilai-nilai ketuhanan.

Fungsi dakwah mencakup kurang lebih tiga jenis lingkup perhatian. Pertama, sistem keyakinan yang disebut doktrin, yang

menentukan hubungan antar manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhan. Kedua, aktivitas yang melambangkan sistem keyakinan dan yang mengingatkan manusia pada doktrin/ajaran tersebut, seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. Dan ketiga, tugas untuk menjelaskan dan membela doktrin, melaksanakan peribadatan dan memperkuat norma perilaku yang diinginkan ajaran Islam, penyiaran agama Islam, karya sosial dan sebagainya, yang memerlukan investasi moral dan materi yang sangat besar, ijtihad dan jihad.

4.2. Dakwah Sebagai Proses Sosial

Perubahan dan perkembangan masyarakat mmm bentuk perorangan maupun kelompok sosial. Sebelum hubungan tersebut memiliki bentuk yang konkrit terlebih dahulu akan dialami suatu proses ke arah bentuk konkrit yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat manakala orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi jika seandainya ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Dengan perkataan lain proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama baik itu antara sosial dan politik, politik dengan ekonomi dan hukum, dan seterusnya. Terjadinya ritme pengaruh timbal balik tersebut dilatarbelakangi karena adanya interaksi, tindakan, dan kemudian mengarah pada mobilitas dalam masyarakat. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan dalam sistem masyarakat yang membentuk terjadinya suatu proses sosial dengan segenap dinamikanya.

Karena telah menjadi keniscayaan, bahwa setiap kelompok maupun anggotanya dalam proses sosial masyarakat senantiasa

terdapat kelompok-kelompok nonkonformis sebagai kelompok yang menyimpang dari sistem nilai-nilai kebenaran ilahiyah, maka dakwah menjadi *centre of sosial engineering* untuk mengarahkan tindakan masyarakat ke arah yang konformis baik dari sistem kearifan nilai budaya lokal (*local wisdom*) yang dalam bahasa alquran disebut sebagai “khair” maupun pada sistem nilai-nilai transendental.

Beragam fenomena kelompok nonkomformis dalam fakta sosial yang keras kepala terhadap nilai ketuhanan, seakan-akan tidak butuh terhadap kabaikan, memperlihatkan taringnya sebagai makhluk buas yang tidak pernah puas yang disebut Khaldun dengan istilah *to rule and to win* sebagai dominasi nafsu mendasar sifat manusia maka disinilah dakwah sebagai proses dalam upaya penyadaran dan penyeimbang agar masyarakat manusia bisa menjadi manusia seutuhnya.

a. Dakwah Sebagai Interaksi Sosial

Interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial dan merupakan dasar proses sosial. Tanpa adanya interaksi maka kehidupan bersama tidak akan pernah terwujud. Pergaulan hidup baru akan terjadi manakala orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, mengadakan hubungan, kompetisi dan lain sebagainya. Jika dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, berbicara atau bahkan berkelahi. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Meskipun orang-orang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara, namun masing-masing sadar adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam perasaan orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh minyak wangi, bau keringat suara berjalan dan lain sebagainya. Kesemuanya akan menimbulkan kesan di dalam pikiran orang yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya.

Begitu halnya dengan dakwah, dakwah sebagai interaksi karena dakwah merupakan suatu proses tindakan sosial yang dengannya merasuk dan merajut hubungan-hubungan sosial yang dinamis baik antar perorangan, kelompok, maupun antar orang dengan kelompok yang melibatkan adanya komunikasi dan kontak sosial⁴ hingga sampai sekarang dakwah bisa mengglobal dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Komunikasi dan kontak sosial menjadi syarat utama dan bahkan menjadi indikator kesuksesan dalam pelaksanaan dakwah. Nabi dan juga generasi penerusnya tidak akan pernah mampu menyebarkan dakwah yang syarat dengan sistem nilai manakala dakwah disampaikan dengan proses komunikasi yang tidak baik dan tidak didukung dengan adanya kontak sosial.

Sebagai proses, dakwah yang terjalin melalui proses interaksi syarat dengan perangkat nilai mengenai kehidupan bermasyarakat untuk ditransformasikan oleh komunikator agar nilai tersebut bisa dipahami oleh manusia demi terciptanya keseimbangan sistem sosial kehidupan. Namun dalam proses pengequilibruman sistem sosial masyarakat tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masyarakat tidak mudah menerima nilai-nilai baru yang datang dari luar karena setiap masyarakat dimanapun berada sudah memiliki suatu sistem norma dan nilai-nilai tertentu yang dijadikan sebagai basis ideologi pandangan hidup. Dan dari sinilah, dalam interaksi dakwah dengan masyarakat akan terwujud dua hal yang disebut dengan proses asosiatif dan proses diasosiatif. Gilin dan Gilin (dalam Soekanto, 2001) merinci proses asosiatif kedalam tiga bentuk khusus yaitu akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Sedangkan proses disasosiatif dirinci kedalam bentuk persaingan, kontravensi dan pertentangan atau konflik.

Akomodasi menurut Gilin dan Gilin (dalam Soekanto, 2001) merupakan pengertian yang digunakan untuk menggambarkan

4. Kontak sosial dan komunikasi adalah dua syarat yang mesti ada dalam proses interaksi.

suatu proses hubungan sosial yang artinya sama dengan adaptasi (*adaptation*) yang digunakan oleh ahli ilmu biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana makhluk hidup hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar. Dengan pengertian tersebut dimaksudkan agar orang-perorangan serta kelompok masyarakat manusia yang semula berada dalam kondisi bertentangan saling menyesuaikan diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada.

Jadi, dakwah dalam makna akomodasi adalah upaya dakwah untuk meredakan suatu pertentangan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan, menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan kelompok masyarakat yang kontra sehingga mereka tidak kehilangan kepribadiannya. Dengan adanya akomodasi juga ditujukan untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer, memungkinkan terwujudnya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, dan mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah.

Sedangkan asimilasi merupakan bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Mereka tidak lagi merasa sebagai kelompok yang berbeda sebab mereka lebih mengutamakan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai bersama yang dilandasi nilai-nilai ilahiyah. Bila kedua kelompok masyarakat telah mengadakan asimilasi, batas antara kedua kelompok masyarakat itu dapat hilang dan keduanya berbaur menjadi satu kelompok. Dan disinilah yang merupakan perwujudan konsep rahmatulilalamin atau universalitas Islam.

Dalam proses wujud dakwah yang asosiatif, proses asimilasi ini timbul karena beberapa faktor pendukung yakni proses dakwah dalam dinamika kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, para pengemban dakwah saling bergaul secara langsung dan intensif dalam kurun waktu yang lama menyatu sebagai warga kelompok masyarakat sehingga dapat merasakan aroma dan bagaimana kondisi masyarakatnya sebagaimana Nabi Muhammad (dalam Sodikin: 2008) pada historis sirahnya. Ia adalah orang yang terlahir dalam komunitas Arabia, tepatnya suku Quraisy suku yang paling dimuliakan dan menjadi *trading centre* dan pusat berkumpulnya berbagai suku Arabia dari berbagai penjuru sehingga Nabi Muhammad sudah memahami bagaimana karakteristik masyarakatnya. Bentuk-bentuk tradisi kesukuan yang berlaku dan pranata-pranata sosial yang dibentuk juga sudah dikenalnya. Hal ini mendukung bagi upaya melakukan transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap risalah yang diterimanya. Strategi yang dijalankan juga memperlihatkan kejeliannya dalam melihat pola kehidupan masyarakatnya. Sebagai efeknya seprangkat nilai kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Bentuk terakhir proses asosiatif dalam proses dakwah ialah akulturasi yaitu proses sosial yang timbul oleh karena percampuran nilai-nilai dakwah dengan kebudayaan lain saling bertemu dan saling memengaruhi. Sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan masyarakat dan sebagiannya ditolak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan nilai kemanusiaan sebagaimana perbauran kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia.

Bertolakbelakang dari dakwah sebagai interaksi sosial dalam bentuk yang asosiatif, maka proses diasosiatif merupakan resistensi dari nilai dakwah yang ditransformasikan kepada masyarakat. Proses interaksi dakwah diasosiatif sebenarnya merupakan masalah judul

yang tetap eksis dalam sejarah dinamika masyarakat. Bermula dari Adam dengan kelompok sosial iblis, Nuh dengan komunitas masyarakatnya Bani Israil, Ibrahim dengan anggota masyarakat Namrud, dan bahkan sampai kepada utusan terakhir yaitu Muhammad. Proses disasosiatif menjadi suatu anugrah keniscayaan tak diinginkan yang tetap ada hingga sampai bumi ini extrovet sifanya dari pancaran cahaya matahari untuk tidak menyinarinya lagi.

Nabi Muhammad, pasca dakwahnya yang terbatas pada lingkaran domestik yaitu keluarga dekatnya, pada tahun 615 mulai menginteraksikan nilai-nilai transendental hasil dari pengembaraan spiritualnya secara terang-terangan di kabilahnya sendiri yaitu Bani Hasyim dengan tujuan agar mendapatkan dukungan dan perlindungan dengan mengumpulkan empat puluh tokoh kabilah Quraisy dan mengajak mereka berasimilasi baik dari sisi keduniaan terkhusus kepada aspek ubudiyah ternyata menuai kegagalan. Diasosiasi interaksi inilah kemudian melahirkan pertentangan dan kontravensi.

Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan paham dan kepentingan. Hal ini dapat menimbulkan semacam *gap* atau jurang pemisah yang dapat mengganggu interaksi sosial di antara pihak-pihak yang bertikai. Kontravensi ialah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan kontravensi ditandai dengan gejala adanya ketidakpuasan terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap tersebut dapat terlihat jelas atau tersembunyi. Sikap tersembunyi tersebut dapat berbuah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian dan sebaliknya dengan sikap kekecewaan yang sifatnya jelas.

Masyarakat Arabia saat itu menganggap nilai-nilai baru yang coba ditransferkan Muhammad sangat bertentangan dengan martabat mereka dan juga dianggap sebagai tantangan terhadap bentuk tatanan paganisme yang sejak lama mereka anut. Mereka melakukan tindak anarkis dengan menganiaya pengikut-pengikut Muhammad. Hal ini dikarenakan keterbatasan cara pikir masyarakat Arabia yang tidak mampu berinteraksi komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan lewat argumentasi yang provokatif.

Dengan melihat rantai perjalanan proses dakwah yang berkesinambungan sebagaimana juga sekilas historis awal mula dakwah yang dilakukan Muhammad di atas, interaksi disasosiatif dakwah dalam bentuk pertentangan akan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat individu atau kelompok, mulai dari lingkungan kecil sampai masyarakat luas dikarenakan; pertama, perbedaan pendapat, prinsip, aturan antar individu. Kedua, perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial agama. Keempat, perubahan sosial, disorganisasi, dan disintegrasi.

Sementara kontravensi ditandai dengan reaksi tindakan penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana kegiatan dakwah. karena itu dakwah menuntut keterorganisasian. Selain tindakan penolakan, interaksi disasosiatif dalam bentuk kontravensi juga ditandai dengan; pertama, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain. Kedua, intensif berupa penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak-pihak lain. Ketiga, rahasia yaitu mengumumkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat. Keempat, taktis yaitu mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan

pihak lain, memaksa pihak lain dengan kekerasan, provokasi, dan intimidasi.

Ekspansi di atas menegaskan bahwa dakwah sebagai interaksi sosial ingin mewujudkan masyarakat yang komunikatif. Ia kritis terhadap masyarakat yang telah mapan sejauh mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan kemampuan belajar kebudayaan yang tersedia bagi mereka, melainkan membenamkan diri ke dalam sebuah pertumbuhan kompleksitas yang tak terkendali. Akan tetapi ia juga kritis terhadap pendekatan-pendekatan lain yang tak mampu menjelaskan paradoks rasionalisasi agama terhadap kemasyarakatan karena pendekatan tersebut membuat sistem sosial yang kompleks dalam masyarakat sebagai objek semata.

Artinya, ada proses pengaktualisasian nilai dalam hubungan antar masyarakat, antar *da'i* dan *mad'u*. Kearifan bagi pelaku dakwah berbaur dan berkelindan dengan masyarakat. Tidak terdapat jarak sosial antara pelaku dakwah dan masyarakat. Masyarakat bukan kumpulan manusia-manusia kosong yang tak punya apapun. Bukan seperti gelas kosong. Tetapi mereka telah memiliki seperangkat konsepsi nilai yang dijadikan sebagai dasar ideologi. Karenanya nilai-nilai ilahiyah yang ditransformasikan tidak boleh mengabaikan nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, mengakumulasikan antara nilai budaya lokal dengan nilai Ketuhanan yang nantinya melahirkan nilai baru tanpa menghilangkan nilai-nilai masyarakat yang ada. Dalam perkataan lain dakwah harus berbudaya dan melahirkan kebudayaan, dakwah harus bernilai dan melahirkan nilai-nilai, serta dakwah harus bermoral dan melahirkan moral.

Dalam proses dakwah bermoral dan melahirkan moral, berbudaya dan melahirkan kebudayaan ada beberapa hal yang menjadi bahan perhatian yang digolongkan ke dalam beberapa faktor yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi.

Faktor imitasi merupakan tindakan sosial dengan cara meniru baik itu sikap, tindakan, perilaku (*behaviour*), *performance*, maupun gaya hidup (*life style*) suatu kelompok masyarakat dengan tidak mengabaikan yang ma'rif dan mungkar demi mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai dari dakwah yang disampaikan. Faktor sugesti ialah penyampaian pengaruh yang diberikan oleh pendakwah baik berupa rangsangan, pandangan, sikap, maupun perilaku sehingga masyarakat dakwah akan mengikutinya tanpa pikir panjang, rasional, dan kritis. Faktor identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditirunya sehingga tidak hanya melalui serangkaian proses peniruan atau imitasi tetapi juga melalui proses kejiwaan yang mendalam.

Faktor simpati merupakan proses kejiwaan seorang individu yang merasa “tertarik” kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan wibawa, maupun perbuatannya. Melalui perasaan simpati dapat menjadi dorongan yang sangat kuat pada diri seseorang untuk melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain. Faktor empati yaitu proses kejiwaan seseorang untuk ikut “larut” dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka. Empati merupakan kelanjutan rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Sedangkan faktor motivasi berupa dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Motivasi dalam diri seorang muncul disebabkan faktor atau pengaruh dari orang lain sehingga individu melakukan kontak dengan orang lain.

b. Dakwah Sebagai Tindakan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya interaksi. Interaksi adalah kebutuhan yang dengannya

akan menimbulkan kesan di dalam pikiran orang untuk kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Oleh karena itu tindakan sosial merupakan lanjutan dari interaksi sosial. Dalam pandangan Weber suatu tindakan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna subjektif bagi perilakunya. Manakala tindakan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan dan berorientasi pada perilaku orang lain maka itulah yang disebut sebagai tindakan sosial.

Dalam wacana dakwah sebagai tindakan sosial, dakwah dimaknai sebagai aksi nyata - memiliki dimensi sosial- yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap masyarakat. Tindakan tersebut sebagai respon atau jawaban atas problema masyarakat yang bergejolak dalam dunia sosial. Sehingga ada dialektis antara banyaknya jumlah da'i berbanding lurus dengan perbaikan kondisi masyarakat. Bukan sebaliknya, banyak jumlah da'i justru tidak berbanding lurus terhadap perbaikan masyarakat. Atau lebih ironinya, banyak da'i yang bertebaran di muka bumi justru semakin menambah angka kebingungan masyarakat untuk memahami makna agama.

Hal ini menjadi fenomena kekinian. Lahir da'i dadakan, muncul da'i kondang yang terlalu berambisi menyampaikan pituah agama yang menjadikan nilai autentik ketuhanan menjadi luntur. Kegiatan keagamaan hanya menjadi ritual atau hanya sebagai pelepas rasa penat atas kejenuhan pekerjaan rumah tangga semata. Dakwah bukan lagi solusi melainkan sudah beralih fungsi sebagai rutinitas biasa yang tidak dapat menyentuh sensitifisme hati dalam hubungannya secara vertikal atau persoalan pemantapan tauhid dan hubungannya secara horizontal atau hubungannya sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Dakwah sebagai tindakan sosial memiliki asas penting sebagai perwujudan tugas mulia dari Tuhan untuk merealisasikan apa yang diinginkanNya terhadap masyarakat manusia dalam wujud kerja nyata. Kinerjanya rasional, menggunakan akal sehat, dan

mampu pula diterima akal sehat serta mampu meretas suatu bentuk kehidupan yang terasing.

Kehidupan terasing sempurna dalam masyarakat ditandai dengan adanya ketidakmampuan kelompok atau individu dalam masyarakat untuk mengadakan interaksi dengan pihak lain, tidak memiliki akses. Sudah tentu orang yang hidup terasing sama sekali tidak dapat melakukan tindakan sosial. Hal ini bisa disebabkan dua hal yaitu struktural dan kultural. Faktor struktural mengisyaratkan bahwa keterasingan kelompok masyarakat lebih disebabkan oleh faktor yang berada diluar dirinya. Terdapat pengaruh hegemoni dan rekayasa sistem yang menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya ia penuhi sebagai hak yang mesti didapatkan.

Secara fungsional, struktural ditujukan pada proses equilibrium. Tetapi dalam prosesnya, struktural justru menghasilkan penyimpangan-penyimpangan yang tak terelakkan. Sebagaimana menurut teori Merton (dalam sunarto, 1993: 78) yang menyatakan bahwa struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap kehidupan sosial dan menekan orang-orang tertentu ke arah nonkonform sehingga muncullah kehidupan terasing. Sedangkan faktor kultural lebih disebabkan faktor yang berada dalam diri kelompok atau individu pada sebuah masyarakat. hal ini bisa berupa faktor *heritage* dan juga bisa faktor budaya malas dalam diri masyarakat.

Kedua hal inilah yang menjadi sentuhan utama dakwah sebagai tindakan. Sebagaimana pemaknaan "*ta'muruuna bil ma'ruf, watan hauna 'anil mungkar watu'minuna billah*", dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian dalam konteks dakwah sebagai tindakan sosial yaitu proses humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Segala bentuk tindakan menyeru kepada yang ma'ruf atau yang baik berdasarkan nilai-nilai maka tiada lain tiada bukan hal itu sebagai

tindakan humanisasi atau memanusiakan manusia. *Watanhauna 'anil mungkar* merupakan konsep liberalisasi atas fenomena sosial yang berkaitan dengan struktural yang menjadikan pemiskinan, pembodohan dan pengasingan kelompok yang dianggap tidak dapat berbuat apa-apa (*proletar*). Oleh karenanya dakwah sebagai tindakan sosial diarahkan untuk menggempur sistem sturktur yang demikian sehingga tidak adanya dominasi antara yang kaya dan yang miskin demi membetuk serta mewujudkan masyarakat yang dalam istilah Habermas masyarakat yang komunikatif. Sedangkan *tu'minuuna billah* adalah konsep transendesi yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual kepada Allah dengan peningkatan kualitas kepercayaan batin (tauhid).

c. Dakwah Sebagai Mobilitas Sosial

Secara etimologis, kata mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu *mobilis* yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Mobilitas terjadi ketika seseorang berpindah statusnya dari suatu posisi ke posisi lain, dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, baik antarlapisan sosial yang berbeda maupun dalam lapisan sosial yang sama. Perpindahan tersebut bisa saja kepada status yang lebih tinggi (*sosial climbing*) dan bisa juga kepada status yang lebih rendah (*sosial sinking*). Tentu dakwah sebagai mobilitas sosial memainkan perannya sebagai mobilisator untuk memindahkan status masyarakat maupun individu dari *sosial sinking* kepada *sosial climbing*. Sebagaimana kisah Bilal Bin Rabbah, seorang budak yang hina, status rendahan dikalangan kasta bangsa Arabia, namun dengan adanya dakwah statusnya sebagai budak beralih menjadi manusia bebas yang mengangkat kehormatan dirinya.

Dalam makna lain kata mobilitas juga merupakan terjemahan dari kata *mobility* yang berkata dasar *mobile* (bahasa Inggris). Kata *mobile* berarti aktif, giat, gesit, sehingga *mobility* adalah gerakan.

Secara harfiah, *sosial mobility* berarti gerakan dalam masyarakat. Pada makna ini, mobilitas tidak saja diartikan sebagai perpindahan status sosial, akan tetapi merupakan gerak dinamis masyarakat. Berbagai aktivitas masyarakat yang muncul dalam upaya mengolah dan mengelola kehidupannya. Dalam konteks ini, mobilitas yang akan melahirkan kebudayaan. Gerak masyarakat berfikir dan bertindak dalam menyempurnakan kebutuhan kehidupannya.

Pada intinya, dakwah sebagai mobilitas sosial menekankan bahwa dakwah adalah mobilisator pemutus mata rantai adanya dominasi status dan kelas dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang terlanjur “ditakdirkan” sebagai masyarakat yang terasing mesti diangkat statusnya dengan mengakui eksistensi dan kehormatannya. Sedangkan masyarakat kelas sosial atas yang kehilangan kehumanisasiannya mesti dicegah agar tercipta keseimbangan sosial kehidupan.

Dakwah merupakan aktivitas pergerakan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Yaitu, suatu kondisi yang mengangkat status manusia dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Dakwah secara prinsip merupakan gerak dinamis dari masyarakat menuju harkat kemanusiaan yang sesungguhnya.

Sebagai sebuah aktivitas, dakwah harus bertumpu pada tujuan lahirnya gairah kehidupan manusia menuju kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, sebagai khalifah Allah swt. Dan, sebagai khalifah, manusia dituntut untuk menjadi insan kamil, manusia yang memiliki keupayaan diri mengendalikan alam lingkungannya untuk kebahagiaan kehidupan. Dengan demikian, diharapkan iapun memiliki keupayaan untuk membahagiakan orang lain.

Oleh karena itu, dakwah harus bersifat dinamis, *mobile*, tidak statis apalagi monoton, baik metode dan meterinya. Dinamisasi aktivitas dakwah sjatinya menggambarkan tindakan yang terencana untuk tujuan:

a. Perubahan standar hidup

Kenaikan penghasilan tidak secara otomatis menaikkan status tetapi akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini yang akan mempengaruhi peningkatan status. Untuk itu, dakwah harus mampu mendorong umat dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Materi-materi dakwah, untuk tujuan ini, mesti merupakan solusi, pemberi spirit kepada masyarakat untuk perubahan standar hidup.

b. Perubahan tingkah laku

Kelanjutan dari keinginan untuk peningkatan kualitas hidup, maka harus diiringi dengan tindakan (*action*) dan sikap atau perilaku (*attitude*). Aktivitas dakwah, merupakan upaya yang gigih dalam menciptakan tindakan dan perilaku yang mencerminkan keinginan masyarakat (umat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Atau, pada saat lain, dakwah pun adalah kegigihan untuk merubah cara pandang, sikap dan tindakan masyarakat dari yang bersifat destruktif menuju kondisi yang kondusif, konstruktif. Tindakan, sikap dan perilaku yang cenderung permanen, menjadi kebiasaan, pembiasaan menuju budaya-budaya yang bernilai positif.

Bukan tindakan, semu, instrumental temporer, apalagi tindakan atau perilaku manipulatif, yang merupakan identifikasi orang atau status sosial orang lain. Misalnya, seseorang yang mengubah tingkah lakunya agar diteima dalam lingkungan sosial tertentu. Agar penampilannya meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan kelas atas, ia berusaha memanipulasi dirinya dengan mengenakan pakaian yang rapi dan terkesan mewah.

Dalam pandangan ini, maka dakwah tindakan terencana yang bertujuan untuk mendorong masyarakat berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah kepada

status sosial yang lebih baik. Dan, dakwah juga merupakan suatu penciptaan keodisi yang memberi kesempatan, peluang dan harapan kepada masyarakat untuk mampu bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata yang lebih tinggi dan terhormat. Dakwah sebagai mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan akan terjadi lebih cepat jika didukung oleh sumber daya yang berkualitas baik. Kondisi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas dakwah. Termasuk juga perubahan sikap dan cara pandang terhadap dakwah.

4.3. Dakwah dalam Dinamika Sosial

Dinamika sosial menekankan arti bahwa manusia dan masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan, yang dalam prosesnya berlangsung secara cepat maupun lambat. Setiap kelompok sosial dalam masyarakat akan mengalami suatu keniscayaan perkembangan dan perubahan seiring dengan sifat dasar manusia sebagai basis dari masyarakat yang tidak puas terhadap apa yang didapatkannya. Pada beberapa hal, terdapat bagian dalam masyarakat yang tidak mengalami perkembangan dan perubahan, dalam artian sifatnya lebih statis. Namun pada sisi lain justru arus perubahan dan perkembangan itu terlihat lebih drasis. Cepat atau lambatnya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat akan menyisakan masalah yang butuh penyelesaian. Dan dakwah diharapkan sebagai hati dari *problem solver* terhadap gejala yang ada.

Dalam sebuah diskursus sejak awal mulanya dakwah dijalankan, adakalanya dakwah diterima dengan baik dan disambut dengan senang hati oleh masyarakat namun pada beberapa kasus justru dakwah ditolak karena dianggap berbenturan terhadap nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat bersangkutan. Proses penolakan tersebut tidak jarang melahirkan tindak anarkis dari pihak yang tidak menerima dakwah. Tidak menutup kemungkinan terhadap da'i yang

telah lama berkincah dan berbaur dalam masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad (dalam Sodiqin, 2008), yang secara geneologis ia terlahir dari suku Quraisy, suku yang paling dimuliakan di kota Makkah. Ayahnya Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang merupakan keturunan Bani Hasyim, salah satu suku dari suku Quraisy. Hasyim sendiri adalah anak dari Abdul Manaf dan cucu dari Qushay Bin Kilab, pendiri suku Quraisy. Sementara Ibunya, Aminah, merupakan anak dari pedagang terkemuka dari suku Zuhrah.

Berdasarkan sistem patriarkal yang berlaku, maka Muhammad adalah orang yang membanggakan. Terlebih ia lahir di tanah daerah yang sangat dihormati dan dimuliakan. Sejatinya dakwah Nabi Muhammad berhasil dan dengan mudah diterima oleh masyarakatnya, ditambah lagi Nabi Muhammad telah memahami kondisi sosial budaya masyarakatnya. Namun dalam dinamika sosial masyarakatnya justru betolak belakang. Ia ditolak dan bahkan tidak sedikit pengikutnya dianiaya oleh kaum yang enggan menerima perubahan tersebut. Tidak hanya dianiaya, para pengikut Nabi Muhammad juga diboikot dan embargo ekonomi yang berlangsung sejak 616-618 M. Kabilah Bani Hasyim dan keturunan Abdul Muthalib juga menjadi sasaran boikot ini. Mereka tidak dapat menikah, berdagang, dan bahkan membeli makanan dari pasar-pasar Mekah. Kondisi ini menyebabkan gerakan dakwah Nabi Muhammad terhenti dan kemudian hijrah ke Abyssinia.

Perjalanan dakwah, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dengan berbagai peluang dan tantangannya, juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang sekaligus memberi inspirasi menuju gerakan dakwah yang dinamis. Dakwah kontekstual, yaitu dakwah yang memiliki kemampuan menjawab beberapa persoalan kehidupan yang ada pada masyarakat.

Diantara beberapa persoalan itu ialah; pertama, munculnya konflik sosial keagamaan. Walaupun agama menjunjung tinggi

sikap damai, tetapi tidak jarang juga membagi manusia ke dalam kubu-kubu yang saling berperang. Kadang-kadang kelompok mengidentifikasi diri dengan agama, misalnya konflik antar umat beragama. Benturan antara gerakan misionaris Kristen yang terkadang menciderai nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Begitupun dengan berbagai aktivitas keagamaan umat Islam yang kadang terlihat menindas kaum minoritas, untuk kasus Indonesia. Termasuk juga dengan dan antar umat agama yang lain. Terjadinya konflik antar masyarakat bangsa, sering dipicu oleh gesekan antar umat beragama, konflik Poso misalnya. Konflik itu biasanya tidak secara langsung berhubungan dengan doktrin agama, tetapi diboncengi oleh kepentingan sosial politik dan kekuasaan di antara kelompok yang membawa label-label keagamaan.

Di lain pihak, adanya perbedaan pemahaman dan ritual keagamaan sesama umat, yang memunculkan kelompok-kelompok aliran atau sekte-sekte dalam Islam, tidak jarang juga menjadi alasan persaingan, perdebatan, konflik politik, perselisihan dan bahkan tindakan anarkis antar umat Islam. Ini dipicu oleh suatu keyakinan yang menciptakan kelompok sendiri (*in group*) dan kelompok luar (*out group*) yang menyulitkan tercapainya saling pengertian. Keyakinan yang malahirkan sikap-sikap tidak toleran terhadap keyakinan orang lain. Sikap yang memandang bahwa kelompoknya yang benar, tindakannya sudah benar, yang mengenyampingkan penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Konflik agama semacam ini, semakin terbuka pada umat Islam Indonesia kini.

Kedua, bermunculannya berbagai aliran kepercayaan yang berlebelkan Islam. Kelompok aliran kepercayaan, yang sudah di cap sesat, yang pernah muncul dan menghebohkan di Indonesia, seperti aliran Lie Eden, Ahmadiyah, Isa Bugis, Satrio Piningit Wateng Buwono. Atau aliran yang berbentuk gerakan pemikiran yang keluar dari *mainstream* pemahaman keagamaan yang ada, seperti Jaringan Islam Liberal, yang cukup menghebohkan.

Kelompok aliran kepercayaan dapat saja menyatakan kecemasan total terhadap nilai-nilai yang berlaku, dan para anggotanya seringkali setia secara fanatik, meskipun beberapa waktu kemudian mereka acapkali pindah ke kelompok aliran kepercayaan lain. Aliran kepercayaan diduga lahir dalam masyarakat yang goyah pada masa terjadinya perubahan sosial yang cepat. Tampaknya kelompok-kelompok itu berkembang baik di daerah-daerah yang hubungan sosial masyarakat beragamnya lemah, ditambah dengan lembaga-lambaga keagamaan yang kehilangan jati diri fungsinya. Masjid misalnya, yang tidak lagi berperan merekat nilai-nilai ukhuwah antar umat Islam. Masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata. Malah terkadang, masjid memperlihatkan fungsinya sebagai “pemecah” umat. Begitupun para ulama, yang tidak lagi menjadi sosok teladan yang memiliki kharisma di tengah masyarakat.

Kelompok aliran kepercayaan menekankan kepatuhan terhadap pemimpin yang magnetis dan karismatik. Intensitas kesetiaan terhadap pemimpin kelompok itu, yang terkadang ditunjukkan secara mengerikan. Para anggota aliran kepercayaan seringkali memiliki kadar kesetiaan yang setara, sehingga kegiatan para penganut aliran itu dapat disamakan dengan upaya melepaskan diri dari alam sadar, sebagaimana yang terjadi dalam alam halusinasi para pecandu obat bius.

Kelompok-kelompok aliran kepercayaan memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda-beda namun sama dalam arti fungsi. Mereka menawarkan introspeksi dan penemuan diri yang disertai dengan kehangatan kelompok yang menunjang. Mereka menekankan kesucian jiwa, bukannya penalaran ilmiah dan logika, bahkan bukan pola cara pemikiran yang tradisional. Dalam dunia yang membingungkan, mereka menawarkan kepastian. Dalam masyarakat yang impersonal, mereka memberikan keakraban. Pada masyarakat yang menganut paham materialistis, mereka menganjurkan kepada orang agar mau mengacuhkan pemilikan harta pribadi.

Aliran kepercayaan terkadang mencoba untuk mengubah lembaga-lembaga sosial, tetapi aliran tersebut lebih sering mendorong orang untuk menarik diri dari masyarakat. Bahkan, para orang tua acapkali merasa kecewa bilamana melihat anak-anak mereka kehilangan segenap gairah hidup atau kesetiaan terhadap keluarga, karena mengikuti pemimpin kelompok aliran kepercayaan tertentu. Keadaan ini tampaknya mirip cerita purba tentang kisah peniup alat musik piper dari Hamelin, yang irama pipernya memancing anak-anak untuk meninggalkan rumah. Banyak orang tua berupaya menjauhkan anak remajanya dari aliran kepercayaan, dan berharap agar ada orang yang mampu berpikir kritis, kharismatik yang dapat membina kembali anak remaja mereka, serta dapat pula menunjukkan tentang kesalahan dari cara-cara pemujaan aliran kepercayaan.

Ketiga, ketika dakwah ditujukan untuk upaya-upaya perubahan pada masyarakat, namun di lain sisi perubahan masyarakat menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial yang bersifat problematik. Ada sejumlah faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi perubahan masyarakat, yang biasa disebut sebagai proses sosial, seperti modernisasi, industrialisasi, globalisasi, demokratisasi, sekularisasi, dan lain-lain. Beberapa permasalahan umat dewasa ini yang bersifat problematik, antara lain:

- a) Terjadinya marginalisasi dan atau disfungsi peran dalam masyarakat, baik pada tataran keluarga maupun komunitas.
- b) Terjadinya despiritualisasi (kemiskinan fungsi agama) dalam kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, komunitas maupun masyarakat.
- c) Berkembangnya perilaku anti-sosial.
- d) Merosotnya nilai kemanusiaan (*dehumanisasi*).
- e) Merosotnya kepercayaan diri umat terhadap norma, nilai-nilai, ajaran baik yang mereka miliki, sebagai akibat dari perang psikologis dan opini.

Ini menggambarkan betapa dakwah dalam dinamika masyarakat senantiasa berada dalam dua kondisi, yaitu resistensi dan aseptensi, tantangan, peluang dan harapan. Keseluruhannya akan melahirkan pula sebuah dinamika yang berakhir dengan adanya berbagai perubahan-perubahan sebagai efek dari keterkaitan dengan interaksi, dimana interaksi mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat baik secara progresif ataupun retrogresif. Dakwah dalam dinamika sosial setidaknya memiliki fungsi; pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup sebab bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Kedua, memudahkan segala pekerjaan karena ada banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Hal ini beranjak dari asas bahwa setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Iklim seperti ini akan mewujudkan terpenuhinya hak-hak dasar manusia sebagai anggota masyarakat yang dihargai, dihormati, dan diakui eksistensinya dalam masyarakat.

Maka untuk sampai kepada fungsi ideal dakwah seperti di atas, diperlukan sosok da'i sebagai *agent of change* yang berkeprtibadian kokoh. Sosok da'i ini mencerminkan sikap dan keperibadian, antara lain:

- a) Tingkat upayanya dalam mendekatkan diri kepada Allah sangat intens dan konsisten melalui pendekatan proses *islam*, *iman* dan *ihsan* (*ahl al-ibadāh*).
- b) Taraf pengetahuan dan pemahamannya tentang syari'at Islam luas dan atau mendalam.

- c) Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungannya (masyarakat).
- d) Menjadi sumber inspirasi, yaitu menjadi panutan dalam lingkungan masyarakatnya.

Disamping itu, ada beberapa penting hal yang dapat dijadikan sebagai pandangan dalam dakwah sebagai sebuah proses dalam dinamika sosial masyarakat, yaitu perubahan struktur kelompok sosial, pergantian anggota kelompok, dan perubahan situasi sosial dan ekonomi. Artinya, dakwah dalam konteks dinamika sosial harus melalui alur yang tertata untuk mewujudkan *baladatul tayyibatun ghafur*. Sasaran pertama dakwah ialah pada tingkat mikro, objeknya ialah memperbaiki individu-individu dan keluarga dalam kelompok masyarakat dengan memperbaiki aspek perekonomian terlebih kepada aspek moral. Pada tahap selanjutnya ialah tingkatan mezo, dimana sasarannya ialah pada aspek perbaikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tahap akhir ialah pada tingkatan makro, dimana dakwah berkincah pada bagian struktural untuk memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai ilahiyah. Sehingga wujud konkrit dari dinamika sosial dakwah antara lain, adanya perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, dan perubahan mata pencaharian berbasis pada yang halal dibawah bingkai nilai universalitas Islam.

4.4. Dakwah Sebagai Sistem Sosial

Beranjak dari pengertian sistem sebagai interdependensi antar bagian, komponen dan proses yang mengatur hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain, dimana interdependensi berarti tanpa satu bagian/komponen maka akan sistem akan mengalami guncangan. Ada hubungan yang saling keterkaitan, berinteraksi dan saling ketergantungan sebagaimana yang teori sibenertika Parson bahwa

sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Dakwah sebagai sistem dimaknai sebagai sebuah keterpaduan dari berbagai unsur yang mendukung terjalannya proses dakwah. Dakwah dalam bagian sistem masyarakat memiliki unsur keterkaitan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu sama lain. Ia bersatu dalam rangkaian elemen masyarakat, karena dakwah adalah bentuk interpretasi kerja manusia dan ditujukan untuk manusia dalam masyarakat yang lengkap dengan nilai dan norma.

Meminjam istilah Parson dalam merumuskan syarat fungsional dalam sebuah sistem, maka dakwah dapat setidaknya memiliki empat hal untuk mencapai keberhasilan dakwah dalam mentransformasikan nilai ke dalam masyarakat yaitu *adaptation* atau adaptasi, *goal attainment* atau pencapaian tujuan, *integration* atau integrasi, dan *latent pattern maintenance* atau pemeliharaan pola latent.

Adaptasi mengisyaratkan bahwa dakwah merupakan proses penyesuaian dengan lingkungan dimana ia akan ditransformasikan dengan tidak mengabaikan kesucian nilai yang terkandung dalam dakwah. Hal ini lebih disebut sebagai proses enkulturasi yaitu proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam suatu kebudayaan dalam masyarakat. Dalam istilah bahasa Indonesia diartikan “pembudayaan” yakni dakwah sebagai proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan normatif ketuhanan dalam kebudayaannya.

Pada proses ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya berikut juga adat-istiadat, sistem norma, serta peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya dengan nilai dakwah sehingga ada internalisasi nilai qurani dalam kepribadiannya.

Proses adaptasi dalam dakwah merupakan proses yang cukup panjang yang dimulai dari generasi anak dalam sebuah keluarga sebab anak-anak menghabiskan masa-masa awal kehidupan bersama keluarga dan memperoleh refleksi nilai dan pola perilaku keluarganya. Selanjutnya, kepada mereka ditunjukkan nilai-nilai dan pola-pola perilaku masyarakat. Anak-anak mempelajari norma-norma masyarakat melalui keluarga dan teman-teman bermain.

Adaptasi nilai dakwah dalam arti luas, pendidikan termasuk ke dalam proses umum, di mana seseorang bertumbuh diinisiasikan ke dalam cara hidup dari masyarakatnya. Pendidikan mencakup setiap proses, kecuali yang bersifat genetic, yang menolong membentuk pikiran, karakter, atau kapasitas fisik seseorang. Proses tersebut berlangsung seumur hidup. adaptasi tersebut juga berbentuk penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dalam menggunakan pranata-pranata sehingga sistem dakwah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi dengan kokoh.

Goal attainment merupakan proses pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu tujuan dakwah terbentuknya pribadi-pribadi yang muslim yang tangguh. Dalam hal ini dakwah berfungsi sebagai “fungsi memaksa” agar masyarakat dakwah yang telah tersentuh hatinya terhadap nilai ilahiyah harus menyesuaikan dengan segenap kemampuannya dengan tujuan sosial yang lebih besar yaitu tujuan dakwah dengan memperhatikan nilai budayanya yang tidak bertentangan dengan syariat demi menghindari adanya benturan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Disamping fungsi memaksa dakwah juga harus mampu memotivasi seluruh anggota masyarakat agar dapat terpengaruh dengan berbagai cara baik melalui proses motivasi, imitasi, simpati maupun dengan cara-cara berempati.

Selanjutnya *integration* yang menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya

masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Dakwah dalam hal ini menjadi proses untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menuju *kalimatun sawa*'. Satu akidah, satu kepercayaan, dan satu keyakinan. Sementara perbedaan sosial budaya hanya menjadi kekuatan untuk mendukung integrasinya kalimatun wahidah.

Sedangkan *latent pattern maintenance* atau pemeliharaan pola laten. Sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Dasar nilai-nilai tersebut adalah iman yang akan menyatukan seluruh kekuatan yang ada dalam diri masyarakat dakwah yang terwujud dalam bentuk ukhwah antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan bahkan masyarakat pada tatanan yang lebih besar dalam skala makro.

Para ahli sosiologi mengemukakan bahwa setiap orang merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Dari sudut pandang ini, dakwah bukanlah sekedar suatu perkumpulan yang terdiri dari pelaksana dakwah, da'i dan jama'ah (*mad'u*) dengan segala sifat dan karakteristik masing-masing. Lebih dari itu, dakwah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan yang menentukan apa yang terjadi dalam kegiatan dakwah. Ciri-ciri pembawaan para individu tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan pola-pola interaksi. Memang pembawaan para individu mempunyai pengaruh terhadap kemampuan mereka menjalankan peranan, namun tidak menentukan peranan itu sendiri. Individu yang terlibat dalam aktivitas dakwah hanya bisa mengetahui sedikit tentang dakwah, jika kita sekedar mempelajari kepribadian para individu di dalamnya. Sebaliknya, akan mengetahui banyak

hal tentang dakwah, jika mempelajari harapan-harapan dari masing-masing orang terhadap satu sama lainnya dalam peranannya yang berbeda. Oleh karenanya dakwah sebagai sistem dapat dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang menjalankan beberapa peranan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan dakwah itu sendiri.

4.5. Dakwah Dalam Konteks Kebudayaan

Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak* yang artinya masyarakat adalah suatu jaringan yang menjalin hubungan-hubungan antar individu yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Dalam kajian dakwah, umat atau masyarakat dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya dakwah, bukan sebagai objek dakwah. Oleh sebab itu, harus difahami bahwa keseluruhan faktor-faktor dakwah (tujuan, sasaran, da'i, materi, metode, media) adalah sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam wadah yang disebut umat atau masyarakat.

Sedangkan “kebudayaan” atau budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan

disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin “*colere*”, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Masyarakat dan budaya dalam hal ini sebagai keseluruhan sistem gagasan atau tindakan dari hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar.

Oleh karena itu hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia yang berasal dari naluri tanpa melalui proses belajar. kebudayaan sering diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan kebudayaan juga sering diartikan sebagai semua hasil karya rasa dan cipta. Masyarakat karya menghasilkan kebudayaan benda yang menjadikan norma dan nilai sosial untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adapun cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berfikir manusia yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan rasa dan cipta disebut juga kebudayaan spiritual.

Berdasarkan pengertian diatas jelas dapat dipahami bahwa masyarakat dan budaya merupakan sebuah satu kesatuan tingkah laku, perbuatan dan kegiatan yang dilakukan seiring dengan proses dan tahapan belajar yang disertakan dengan adat dan kebiasaan yang membaur dengan masyarakat yang kelak akan menjadi sebuah budaya yang indah. Artinya, masyarakat yang terdiri dari individu-individu adalah *manufacture* sebagai penghasil kebudayaan. Tanpa ada manusia maka kebudayaan tidak akan pernah ada.

Masyarakat dengan segenap kebudayaannya memiliki relasi sentral terhadap dakwah sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial dakwah tidak akan pernah dianjurkan oleh Tuhan manakala manusia tidak tercipta. Objek dakwah adalah masyarakat manusia dengan seperangkat kebudayaan yang dimilikinya. Maka dakwah merupakan sistem nilai yang inherent dalam diri masyarakat yang

berbudaya. Hal itu berdasarkan dua dimensi kebudayaan immateril berupa ide, gagasan, dan dimensi materil yang merupakan wujud dari pikiran tersebut akan menghasilkan tindakan atau wujud materi. maka disini, dakwah sebagai pusat kebudayaan masyarakat yang beragam yang melahirkan kebudayaan dan peradaban baru yaitu kebudayaan Ketuhanan. Dengan munculnya wujud kebudayaan Ketuhanan ini masyarakat dunia tidak harus menjadi satu dari sistem nilai-nilai sosialnya. Masyarakat bebas berkreasi dengan penuh seni melalui pembumisasian kearifan nilai budaya lokal yang dimilikinya. Sehingga tidak mesti pakai jubah, jenggot panjang, atau simbol-simbol lain yang bukan menjadi simbol kebudayaannya sendiri, untuk dikatakan sebagai manusia yang berkebudayaan ketuhanan. Oleh karenanya, keuniversalan dakwah terletak pada “nilai” ajaran Islam itu sendiri. Bukan pada simbol-simbol yang terkadang dimaknai secara sempit.

Aktivitas dakwah dengan beragam bentuk dan caranya merupakan upaya pembelajaran masyarakat akan nilai-nilai kehidupan yang hakiki berdasar pada nilai-nilai Islam, yang selanjutnya mewujudkan dalam setiap perilaku dan tindakan. Perilaku dan tindakan individu atau masyarakat yang didorong oleh pemahaman keislaman yang universal dan komprehensif, yang dilakukan secara berulang dan terbiasakan. Inilah yang disebut dengan bahwa dakwah telah menciptakan kebudayaan, yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Dalam pandangan sosiologi, oleh karena manusia dengan kemampuan akal atau budinya telah mengembangkan berbagai macam sistem tindakan demi keperluan hidupnya sehingga ia menjadi makhluk yang paling berkuasa dimuka bumi ini. Manusia mempunyai berbagai macam gagasan dan ide yang dapat membuat berkembangnya kebudayaan dan bertambah maju dalam berpikir untuk mengembangkan kebudayaan. Ide-ide dan gagasan manusia

banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan dan ide-ide itu saling berkaitan menjadi satu sistem yang saling berkaitan. Kebudayaan biasa juga disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini juga terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lainnya dari waktu ke waktu menurut pola tertentu berdasarkan tata adat kelakuan atau sikap tingkah laku. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat kongret dan terjadi disekeliling kita sehari-hari.

Maka dakwah dengan berbagai bentuk dan metodenya semestinya menuju ke arah penciptaan kebudayaan ideal dan adat istiadat yang mampu mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Numun bukan membangun kebudayaan fisik yang membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola perbuatannya dan cara berpikirnya. Akan tetapi menciptakan sistem nilai budaya merupakan nilai yang paling tinggi dalam adat istiadat. Karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga ianya dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat.

Walau nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai suatu konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Tapi karena sifatnya yang umum, luas dan tak kongret itu, maka nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam emosional dari alam

jiwa dari pada individu yang menjadi warga dari suatu kebudayaan itu. Nilai-nilai dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat. Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dalam kebudayaan yang memberi dorongan kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.

Suatu sistem nilai budaya sering juga berupa pandangan hidup bagi manusia yang menganutnya. Pandangan hidup biasanya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat itu. Tiap-tiap unsur kebudayaan mengandung unsur berupa sistem sosial dan unsur kebudayaan fisik. Banyak kebudayaan mempunyai suatu unsur-unsur kebudayaan yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan. Suatu kebudayaan sering memancarkan keluar suatu watak khas tertentu yang tampak dari luar yang dapat dilihat oleh orang lain. Watak khas itu sering tampak pada gaya tingkah laku warga masyarakatnya, kegemaran mereka dan berbagai benda budaya hasil karya mereka. Sistem budaya merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan konsep-konsep. Dengan demikian sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang lebih lazim disebut adat istiadat. Diantara adat istiadat ada sistem nilai budayanya, sistem normanya, yang secara lebih khusus lagi dapat dirinci ke dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fungsi dari budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Sistem sosial terdiri dari aktivitas manusia atau tindakandan tingkah laku berinteraksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial itu

bersifat lebih kongret dan nyata daripada sistem budaya, dalam arti tindakan manusia itu dapat dilihat. Interaksi manusia ditata dan diatur oleh sistem budaya, juga dibudayakan menjadi pranata oleh nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kepribadian individu dalam suatu masyarakat, berbeda satu dengan lainnya, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem budayadan oleh tingkah laku alam sistem sosial yang telah melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidupnya sejak kecilnya.

Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat berwujud sebagai suatu komunitas, bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat yang bersangkutan. Seorang warga dari suatu kebudayaan yang telah hidup dari hari ke hari dalam lingkungan kebudayaannya biasanya tidak lagi melihat corak khas itu. Tetapi terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya terutama mengenai unsure-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas dari suatu kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus atau karena ada suatu pola yang khusus, atau dapat juga karena warganya menganut suatu tema budaya yang khusus.

Untuk itu dakwah semestinya berada pada konsep pengokohan nilai-nilai budaya lokal yang mengandung nilai-nilai universal, yaitu Islam. Dakwah semestinya bergerak pada ranah budaya lokal, membumi. Artinya, tujuan dakwah harus bergerak kearah pembentukan karakter masyarakat lokal yang islami. Dakwah yang melahirkan kebudayaan islami atau islamisasi kebudayaan. Berbagai kegiatan dan tindakan dakwah hendaknya berada dekat dengan realitas kehidupan masyarakatnya (*mad'u*). Tema-tema dakwah yang bergerak pada wilayah “arabisasi”, baik cara fikir, perilaku maupun

simbol-simbol kehidupan, tidaklah sejatinya tujuan dakwah. Dakwah semestinya ditujukan untuk penciptaan “masyarakat lokal” yang islami.✿

BAB V

DAKWAH DAN GERAKAN SOSIAL

Secara sejarah gerakan sosial merupakan fenomena universal. Masyarakat mempunyai berbagai alasan untuk melakukan atau bergabung dengan kelompok tertentu untuk mencapai matlamat kolektif mereka. Terjadinya pemberontakan dan letupan ketidakpuasan hati masyarakat, kemunculan gerakan keagamaan di abad pertengahan, pembaharuan dan gerakan budaya sejak zaman Renaisans, adalah petikan kecil dari fenomena gerakan sosial. Berbagai gerakan yang timbul sebagai respon kepada tantangan zaman merupakan penyumbang kewujudan modernitas di saat revolusi besar di Inggris, Perancis, Amerika Serikat, begitu juga di negara-negara berkembang seperti gerakan reformasi di Indonesia (Sztompka 2007).

Gerakan sosial mengalami perkembangan, baik dari sudut kuantitas maupun kualitas, ketika masyarakat memasuki era modern sebagai respon terhadap kompleksitas tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan dinamik. Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan tumbuhnya kesadaran kemanusiaan. Masyarakat semakin sedar akan kedudukan dan peranannya dalam dinamika kehidupan, namun di sisi lain realitas kehidupan modern juga melahirkan berbagai masalah kemanusiaan. Untuk itu, kemodernan merupakan keadaan yang paling subur untuk tumbuhnya bermacam

gerakan sosial, dalam berbagai bentuk dan isu. Gerakan sosial merupakan ciri dari masyarakat modern.

Berbagai kompleksitas krisis kehidupan masyarakat modern telah menjadi daya dorong yang sangat kuat munculnya gerakan sosial. Terjadinya atomisasi dan isolasi individu dalam *gesellschaft* yang bersifat impersonal, Riesman (1961) menyebutnya dengan “kerumunan yang kesepian”, yaitu terjadinya proses keterasingan, kesepian dan penjungkir balikan nilai yang dapat mengancam komunitas, perpaduan dan kebersamaan (Sztompka 2007). Perbedaan kekayaan, kekuasaan dan kedudukan yang sangat tajam membentuk ketimpangan sosial yang selanjutnya menimbulkan pengalaman dan kesan eksploitasi, penindasan, ketidakadilan dan pencabulan hak yang menggerakkan konflik kelompok. Oleh karena masyarakat modern mengalami peningkatan kualitas pendidikan membuka peluang bagi kesadaran, imajinasi, kepekaan moral dan perhatian terhadap masalah-masalah umum dalam darjat tertentu, serta kemampuan menghimpun pengalaman pribadi dan lingkungan sosial untuk memperluaskan tumpukan potensi gerakan sosial. Perasaan adanya masalah bersama dan perpaduan yang melampaui batas ini merupakan syarat sosio-psikologi kemunculan gerakan sosial.

5.1. Gerakan Sosial; Sekilas Pemahaman

Banyak pakar ilmu sosial memandang gerakan sosial sebagai salah satu cara masyarakat menata ulang sistem kehidupannya. Gerakan sosial merupakan manifestasi dari ekspresi masyarakat menjawab bermacam tantangan kehidupan. Gerakan sosial (*social movement*) menjadi pokok bahasan yang populer bagi kalangan ahli sosiologi Barat, khususnya di Amerika Serikat. Kajian yang telah dilakukan mengenai gerakan hak-hak sipil di kalangan Kulit Hitam di Amerika Serikat tahun 1950an dan 1960an, serta kajian

mengenai berbagai gerakan, seperti gerakan mahasiswa tahun 1960an dan 1970an, gerakan alam sekitar, gerakan keamanan dan gerakan perpaduan maupun gerakan perempuan pada tahun 1970an dan 1980an, kesemuanya membawa akibat lahirnya bermacam-macam pendekatan dan teori tentang gerakan sosial (Fakih 2004). Gerakan sosial yang kerap terpilih untuk dijadikan bahan kajian adalah gerakan sosial yang terjadi di negara-negara berkembang, baik perjuangan untuk tujuan peningkatan keadaan hidup maupun berkenaan dengan pemerataan distribusi sumber daya ekonomi.

Khusus untuk gerakan sosial yang ada di negara-negara membangun, seringkali berkaitan secara tidak langsung dengan pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*), yaitu suatu perubahan sosial yang direncanakan oleh negara, melalui apa yang disebut sebagai “pembangunan” (*development*). Pembangunan seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai penyebab kesesakan ekonomi, krisis ekologi, serta berbagai kesengsaraan masyarakat di negara-negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan dan kritikan terhadap skenario pemodernan, yang menganggap dan merancang untuk membawa kemajuan dan kemakmuran masyarakat di negara berkebang. Menurut pendapat Bonner (dalam Fakih 2004), dalam konteks negara-negara berkembang, kajian tentang gerakan sosial dan transformasi sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan. Kajian tersebut bermaksud untuk mencari alternatif terhadap gagasan pembangunan yang selama beberapa tahun ini telah menjadi suatu “agama sekular baru” bagi berjuta-juta masyarakat di negara-negara membangun. Dalam aplikasinya, pembangunan kerap dianggap sebagai satu-satunya tujuan negara. Pembangunan banyak diterima oleh kalangan birokrat, akademisi maupun penggerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tanpa mempersoalkan landasan ideologinya. Beberapa pertanyaan yang perlu menjadi bahan kajian terhadap ide pembangunan bukanlah semata-mata

mengenai metodologi, pendekatan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Tetapi secara teori justeru pembangunan itu sendiri dianggap sebagai idea kontroversi, yaitu apakah pembangunan benar-benar merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah bagi berjuta-juta masyarakat atau semata-mata hanya sebagai alat untuk menyembunyikan permasalahan atau penyakit yang sebenarnya yang lebih azasi. Banyak pakar ilmu sosial secara kritis telah mengkaji dampak pembangunan, dan menganggap bahwa pembangunan telah menciptakan kesengsaraan dari pada menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kajian tentang gerakan sosial dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertentangan. Pendekatan pertama ialah teori yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai suatu “masalah” atau disebut sebagai gejala penyakit sosial. Teori ini berakar dan dipengaruhi oleh teori sosiologi dominan, yaitu fungsionalisme atau kerap disebut sebagai fungsionalisme struktural. Fungsionalisme melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem dimana semua bahagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini “keseimbangan” merupakan unsur kunci utama dengan menekankan pentingnya kesatuan masyarakat dan sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota-anggotanya. Oleh kerana itu, gerakan sosial dianggap sebagai sesuatu yang “negatif” kerana akan dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kedamaian dalam masyarakat.

Teori struktural fungsional berpandangan bahwa terjadinya perubahan pada satu struktur sosial yang diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial, akan berproses secara bertahap dan evolutif yang akan berpengaruh kepada struktur-struktur sosial yang lain. Untuk kajian tentang perubahan sosial ini, Talcott Parsons (dalam Ritzer 1996) mengembangkan pendekatan paradigma perubahan evolusi. Seterusnya Parsons menjelaskan bahwa perubahan sosial

akan terjadi melalui proses diferensiasi, integrasi dan perubahan sistem nilai. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekelompok subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya, maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem baru terdiferensiasi. Subsistem baru ini harus memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi dari subsistem lama. Proses ini dikenal sebagai aspek peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dari lingkungan evolusi. Pada masa masyarakat berubah, maka masyarakat itu akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Parsons menjelaskan lagi bahwa proses diferensiasi akan menimbulkan sekelompok masalah integrasi baru bagi masyarakat. Sistem nilai dari masyarakat sebagai satu kesatuan akan mengalami perubahan, serentak dengan perubahan struktur dan fungsi sosial yang tumbuh lebih terdiferensiasi. Menurut Parsons, dengan bervariasinya sistem nilai baru maka akan menyulitkan sistem nilai lama mengontrolnya. Masyarakat yang semakin terdiferensiasi memerlukan sistem nilai yang lebih tinggi yang mampu mengawal dan meligitimasi berbagai tujuan dan fungsi-fungsi struktur sosial yang bertambah luas dan kompleks.

Pendekatan kedua adalah teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, dan dikenal dengan “Teori Konflik”. Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga andaian mendasar, yaitu: 1) rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar di mana mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya, 2) kekuasaan adalah inti dari struktur sosial, dan hal ini menciptakan perjuangan untuk mendapatkannya, dan 3) nilai dan idea adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, selain sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat (Hardiman 1990).

Teori konflik berakar dari fahaman Marxisme tradisional yang menyatakan bahwa revolusi adalah suatu keperluan yang disebabkan oleh memburuknya hubungan produksi yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. Marxisme tradisional tersebut banyak mendapatkan kritikan dari generasi Marxisme baru, terutama terhadap pendekatannya yang bersifat mekanistik. Generasi Marxisme baru, dipengaruhi oleh pemikiran Antonio Gramsci, menyatakan bahwa peranan manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis dan pendidikan, dalam mengubah krisis ekonomi menjadi krisis umum. Mereka menolak bahwa ekonomi adalah sesuatu yang penting dan faktor penentu bagi perubahan sosial, serta menolak gagasan determinisme bersejarah yang mengagungkan manusia sebagai faktor penting di antara banyak faktor lain yang saling bergantung secara dialektik. Mereka mengajukan hujah bahwa gerakan sosial yang berlaku pada tahun 1970an dan 1980an sama sekali tidak menekankan ke arah gerakan perjuangan kelas, seperti yang maknai oleh penganut Marxisme tradisional. Gerakan spiritual, gerakan feminisme, gerakan hak azasi manusia dan hak-hak sipil, gerakan anti perang dan anti nuklir, gerakan sosial berazaskan komunitas dan gerakan pecinta lingkungan, serta gerakan lembaga swadaya masyarakat (NGO) merupakan gerakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas pekerja.

Thomas Bernard (1983), mencoba meletakkan teori fungsionalisme struktur dan teori konflik dalam konteks perbincangan yang lebih luas. Teori konsensus (yang salah satunya adalah fungsionalisme struktur) memandang norma dan nilai sebagai landasan masyarakat, menumpukan perhatian kepada keteraturan sosial berazaskan atas kesepakatan diam-diam, dan memandang perubahan sosial berlaku secara lambat dan teratur. Sebaliknya, teori konflik menekankan kepada dominasi kelompok sosial tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial didasarkan atas

manipulasi dan kawalan oleh kelompok dominan, dan memandang perubahan sosial berlaku secara cepat dan mengikut cara yang tidak teratur ketika kelompok subordinat menggulingkan kelompok yang semula dominan (Ritzer 2005). Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan penganut teori konflik melihat pertaikaian dan konflik dalam sistem sosial. Golongan fungsionalis menyatakan bahwa setiap unsur masyarakat berperan dalam menjaga kestabilan, sementara penganut teori konflik melihat berbagai unsur kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.

Ralf Dahrendorf (dalam Ritzer 2005), tokoh utama teori konflik, berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, dan oleh kerana itu teori sosiologi terbahagi menjadi dua bahagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus untuk menguji nilai integrasi dalam masyarakat, dan teori konflik untuk menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf turut mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang satu sama lain saling berkaitan. Jadi, dalam kenyataannya konflik akan muncul pada satu kelompok atau masyarakat setelah terjadinya konsensus lebih dahulu. Artinya, terjadinya konflik dalam masyarakat atau kelompok sosial setelah terjadinya hubungan sosial, integrasi dan interaksi sosial terlebih dahulu. Bagitupun sebaliknya, konflik pun boleh mencipta konsensus dan integrasi sosial.

Meskipun ada hubungan timbal balik antara teori konsensus dan teori konflik, menurut Dahrendorf, mustahil menyatukan teori untuk menerangkan satu masalah, kerana perbezaan paradigma dan pendekatan berfikir masing-masing teori dalam menjelaskan satu fenomena sosial (Ritzer 2005). Perbezaan sudut pandang teori dalam menganalisis satu fenomena sosial akan sangat berpengaruh kepada rangka dan struktur berfikir dalam memahami realitas yang ada,

yang nantinya berpengaruh kepada cara pengambilan kesimpulan terhadap fenomena yang diamati.

Perbedaan paradigma berfikir kedua teori ini, teori struktural fungsional dan teori konflik, berpengaruh kepada pemahaman dan pendekatan konseptual gerakan sosial. Gerakan sosial yang berakar pada teori struktural fungsional menampilkan wajahnya dalam bentuk perubahan yang teratur, sistemik, perlahan-lahan secara evolutif. Sementara gerakan sosial yang berakar pada teori konflik membuat perubahan sosial secara cepat, kadang-kadang kelihatan radikal, dipaksakan, merosakkan sistem untuk menciptakan sistem yang baru, dan revolutif. Hal ini berlaku kerana, menurut Ralf Dahrendorf (dalam Ritzer 2005), para fungsionalis melihat masyarakat secara formal diikat oleh norma, nilai dan moral, sementara para pakar teori konflik melihat apapun aturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan oleh kelompok dominan. Para fungsionalis menumpukan perhatian kepada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat, dan para pakar teori konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Gerakan sosial biasanya difahami sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat yang terancang dan bersifat lintas kelompok untuk menentang atau mendorong terjadinya perubahan. Banyak versi dan dimensi dari definisi gerakan sosial itu, tetapi Diani (dalam Nash 2000), misalnya, menekankan pentingnya empat unsur utama, yaitu (1) rangkaian yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak berstruktur. Dengan kata lain ada ikatan idea dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu walaupun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dan lain-lain; (2) ada perkongsian kepercayaan dan perpaduan di antara mereka; (3) ada aksi bersama-sama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau

desakan terhadap perubahan tertentu; (4) aksi tuntutan itu bersifat berkelanjutan, tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama, misalnya.

Tarrow (1994), mendefinisikan bahwa gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang mempunyai tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berterusan dengan kelompok elite, kelompok lawan dan pihak penguasa. Tarrow melakukan elaborasi terhadap definisi tersebut dengan menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut (a) menyusun aksi mengacau (*disruptive action*) melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain dan peraturan-peraturan budaya yang tertentu, (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan elite, (c) berakar pada perpaduan atau identitas kolektif, dan (d) terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial. Penekanan serupa, dijelaskan pula oleh beberapa pakar dengan berbagai definisi, antara lain; usaha kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru (Blumer 1951), usaha bersama untuk menukar susunan sosial (Lang & Lang 1961), usaha untuk menukar norma dan nilai (Smelser 1962), dan tindakan kolektif untuk mengelakkan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi sebahagian masyarakat itu (Turner & Killian 1972).

Gerakan sosial yang mempunyai berbagai status penyebab berkenaan dengan perubahan. Di satu pihak, gerakan ini dapat dianggap sebagai tujuan utama perubahan dalam arti sebagai syarat-syarat yang diperlukan dan cukup untuk menimbulkan perubahan. Gerakan sosial harus terjadi dalam lingkungan sosial yang kondusif, berhadapan dengan struktur yang menguntungkan, atau secara metafora, menunggangi kepada kekuatan sosial yang lain. Artinya, gerakan sosial hanya akan berhasil jika beriringan dengan faktor sosial lain. Gerakan sosial jarang menjadi kekuatan dominan

perubahan sosial, biasanya kehadirannya hanya sebagai pelengkap, tidak pernah menjadi faktor utama perubahan sosial. Gerakan sosial pada kebiasaannya juga sering menjadi fenomena yang menyertai proses sosial yang sedang berlangsung, bahkan sering juga sebagai pengaruh dari fenomena sosial yang sedang terjadi.

Gerakan sosial adalah perubahan manifes yang berasal dari bawah, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam berbagai tingkat kebersamaan. Sebagai tujuan gerakan sosial, perubahan sosial dapat bersifat positif, yaitu memperkenalkan hal-hal baru, seperti negara, penguasa politik, adat, undang-undang, dan institusi baru. Perubahan sosial sebagai tujuan gerakan sosial juga boleh bersifat negatif, yaitu menghentikan, mencegah, dan mengembalikan arah perubahan dari proses yang tidak berkaitan dengan gerakan sosial itu sendiri, seperti kerusakan alam sekitar, penurunan kadar kelahiran, peningkatan kriminalitas, atau dari aktivitas gerakan sosial yang lain.

Gerakan sosial yang mempunyai pengaruh kepada terjadinya perubahan sosial. Pertama, gerakan sosial bisa menjadi penyebab hakiki perubahan sosial. Dalam hal ini gerakan sosial harus terjadi pada lingkungan sosial yang kondusif dan gerakan sosial perlu berkesan dengan faktor-faktor lain. Kedua, gerakan sosial dapat sebagai kesan atau gejala yang mendampingi terjadinya perubahan sosial, misalnya, kerana urbanisasi dan modernisasi. Dalam hal ini, gerakan sosial mempengaruhi jalannya perubahan sosial, mengubah arah kecepatannya. Ketiga, gerakan sosial sebagai prantara dalam rantai kausal sosial praktis. Oleh kerana itu, gerakan sosial merupakan produk dari perubahan sosial sebelumnya dan menjadi penyebab transformasi sosial seterusnya sehingga menjadi wahana, pembawa, dan transmitter (Sztompka 2007).

Dengan demikian, gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya. Walaupun selalu

diperlukan kepemimpinan di dalam semua gerakan sosial tersebut, tetapi keuntungan (*value-added*) dan capaiannya selalu harus kembali kepada konstituen gerakan dan bukan kepada pemimpinnya. Tulisan-tulisan tentang gerakan sosial baru di Indonesia cenderung memberikan penekanan pada peranan pemimpin dan keuntungan yang kembali kepada mereka. Sedikit sekali keberhasilan, jika ada, dari gerakan itu langsung memberikan keuntungan kepada konstituen gerakan itu.

5.2. Beberapa Bentuk Gerakan Sosial

Gerakan sosial sebagai sebuah fenomena proses sosial merupakan gerakan kolektif masyarakat untuk menata kembali sistem sosial mereka. Terjadinya berbagai krisis kemanusiaan yang menimpa individu maupun kelompok masyarakat merupakan kesan dari perkembangan masyarakat modern. Perkembangan masyarakat modern yang dinamik dan kompleks melahirkan keberbagaian bentuk gerakan sosial, sebagai respon terhadap berbagai krisis sosial yang ditimbulkan dunia modern.

Ada berbagai jenis pergerakan sosial. Walaupun semua ini dikategorikan sebagai jenis gerakan yang berbeda, jenis-jenis pergerakan ini boleh jadi bermakna serupa, dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung unsur-unsur lebih dari satu jenis pergerakan. Pertama, gerakan protes, adalah gerakan yang bertujuan menukar atau menentang sejumlah keadaan sosial yang sedia ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebahagian besar negara industri. Di Indonesia, misalnya, gerakan ini diwakili oleh gerakan hak-hak sivil, gerakan feminis, gerakan menentang kebijakan pemerintah atau gerakan menentang kelompok ahmadiyah. Gerakan protes sendiri masih boleh diklasifikasikan menjadi dua, gerakan reformasi atau gerakan revolusi. Sebahagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi, kerana tujuannya hanyalah untuk

mencapai reformasi terhad tertentu, tidak untuk merombak semula seluruh masyarakat. Gerakan reformasi merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan ini, misalnya, menuntut adanya kebijaksanaan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnik, bangsa, atau agama tertentu. Gerakan mahasiswa tahun 1998 di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Sedangkan gerakan revolusi bertujuan merombak semula seluruh masyarakat, dengan cara melenyapkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi yang baru. Gerakan revolusi berkembang ketika sebuah kerajaan berulang kali mengabaikan atau menolak keinginan sebahagian besar warganegaranya atau menggunakan apa-apa yang oleh rakyat dipandang sebagai cara-cara haram untuk membendung perbedaan pendapat. Seringkali, gerakan revolusi berkembang sesudah serangkaian gerakan reformasi yang berkaitan gagal mencapai matlamat yang diinginkan.

Kedua, gerakan regresif atau disebut juga gerakan pertahanan (resistensi). Gerakan regresif ini adalah gerakan sosial yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Misalnya, adalah gerakan antifeminis yang menentang perubahan peranan dan status perempuan. Contoh lain adalah gerakan moral, yang menentang trend ke arah kebebasan seksual yang lebih besar. Bentuk gerakan regresif yang paling ekstrem adalah berbagai kelompok neo-Nazi, yang percaya pada supremasi kulit putih dan menyokong dipulihkannya segregasi perkauman yang lebih ketat.

Ketiga, adalah gerakan agama. Gerakan agama dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang ghaib (supernatural), yang menentang atau mencadangkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan budaya yang dominan (lihat Lofland 1985; Zald &

As-1966; Zald & McCarthy 1979). Kategori luas ini merangkumi banyak bahagian, bahkan merangkumi sejumlah gereja yang relatif terlembagakan, yang juga menentang beberapa elemen dari agama atau budaya yang dominan.

Keempat, gerakan komunal, atau ada juga yang menyebut gerakan utopia. Gerakan komunal adalah gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan melalui contoh-contoh, dengan membina sebuah masyarakat model di kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menentang masyarakat konvensional secara langsung, namun lebih berusaha membina alternatif-alternatif terhadapnya. Ini boleh dilakukan dengan berbagai cara. Seperti membina rumah kolektif, yang secara popular dikenali sebagai komune (*communes*), di mana orang tinggal bersama, berkongsi sumber dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada prinsip persamaan (*equality*).

Kelima, gerakan perpindahan. Orang yang kecewa mungkin saja melakukan perpindahan. Ketika banyak orang pindah ke suatu tempat pada masa yang sama, ini disebut gerakan perpindahan sosial (*migratory sosial movement*). Contohnya: kembalinya orang Yahudi ke Israel, yang dikenali dengan istilah Gerakan Zionisme.

Keenam, Gerakan ekspresif. Jika seseorang tidak mampu berpindah secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah, mereka mungkin mengubah sikap. Melalui gerakan ekspresif, orang menukar reaksi mereka terhadap realitas, bukannya berupaya mengubah realitas itu sendiri. Gerakan ekspresif dapat membantu orang untuk menerima kenyataan yang biasa muncul di kalangan orang tertindas. Meski demikian, cara ini juga mungkin menimbulkan perubahan tertentu. Banyak ragam gerakan ekspresif, mulai dari musik, busana, sampai bentuk yang serius, semacam gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan. Lagu-lagu protes pada masa pemerintahan “orde baru” merupakan ekspresi kekecewaan

masyarakat kepada sistem politik dan sistem pemerintahan yang sedang terjadi, dan boleh jadi turut menunjang dan menjadi inspirasi timbulnya gerakan reformasi di Indonesia.

Ketujuh, kultus personal. Kultus personal biasanya terjadi dalam kombinasi dengan jenis-jenis pergerakan lain. Gerakan sosial jenis ini berpusat pada satu orang, biasanya adalah individu yang kharismatis, dan diperlakukan oleh anggota-anggota gerakan seperti dewa. Pemusatan pada individu ini berada dalam tingkatan yang sama seperti berpusat pada satu gagasan. Kultus personal ini nampaknya umum di kalangan gerakan-gerakan politik revolusi atau agama.

Rumusan lain dengan tipologi yang sama dikemukakan oleh Neil J. Smelser (1963), yang membedakan antara gerakan yang berorientasikan norma dan yang berorientasikan nilai. Gerakan sosial berorientasikan norma adalah tindakan memobilisasi massa atas nama keyakinan umum (ideologi bersama) yang bertujuan untuk menata ulang norma sosial yang akan dibentuk. Gerakan sosial berorientasikan nilai adalah tindakan bersama masyarakat untuk tujuan penyusunan nilai. Menurut Smelser (1963), nilai menyediakan garis panduan fundamental untuk bertindak. Nilai menetapkan dan mengatur tujuan usaha manusia, contohnya keadilan, pengetahuan, demokrasi dan kemerdekaan. Norma adalah alat untuk memilih cara yang tepat dalam mencapai tujuan akhir, misalnya disiplin, kesopanan, belajar dan bekerja. Norma lebih khusus dari nilai umum, kerana secara khusus menetapkan prinsip tertentu yang diperlukan apabila nilai hendak diwujudkan (Buechler 1997).

Gerakan sosial yang memberi tumpuan kepada perubahan struktur sosial masyarakat, sesungguhnya terdapat andaian tersirat bahwa dengan mengubah struktur sekaligus akan menyediakan lingkungan sosialisasi baru bagi individu dan selanjutnya akan membentuk kembali keperibadian mereka. Begitu pula dengan

gerakan sosial yang berorientasikan individu terdapat andaian tersirat bahwa kualitas individu yang maningkat akhirnya akan membentuk tatanan sosial yang lebih baik. Biasanya terdapat kesadaran tentang kaitan antara pengaruh perubahan di tingkat struktur dan di tingkat individu. Tetapi perioritasnya berbeda, gerakan tertentu menemukan kunci perubahan dalam struktur yang berubah, sedangkan gerakan lain menemukan kunci perubahan pada diri individu yang berubah.

Dengan menggabungkan kriteria sasaran dan kriteria bidang perubahan, David Aberle (1966) mengemukakan klasifikasi rangkap empat gerakan sosial, yaitu; (1) gerakan transformasi, yang bertujuan perubahan total struktur sosial, (2) gerakan reformasi, yang bertujuan perubahan sebahagian struktur sosial, (3) gerakan penyelematan, yang bertujuan mengubah total individu anggota masyarakat, dan (4) gerakan alternatif, yang bertujuan mengubah sebahagian keperibandian individu anggota masyarakat (McAdam 1997).

		Locus of Change	
		Individual	Social Structure
Amount of Change	Partial	alternative	reformative
	Total	redemptive	transformative

Jenis gerakan sosial (dalam Mc Adam & David A. Snow 1997)

Gambaran aktivitas gerakan boleh berbeda antara berbagai masyarakat. Kesatuan paling luas cakupannya gerakan sosial, oleh Garner dan Zald (1981), disebut sektor gerakan sosial (*sosial movement sector*), yakni struktur gerakan sosial, struktur antagonis,

gerakan pertentangan dan bekerjasama yang selanjutnya menjadi sebahagian dari struktur tindakan lebih luas, birokrasi negara, media massa, , gereja atau masjid dan berbagai jenis faktor organisasi yang lain dalam masyarakat (dalam Sztompka 2007). Ciri khas sektor gerakan sosial adalah bahwa unsur-unsur utamanya mempunyai kegiatan khas masing-masing, yang menentukan derajat kegiatan menyeluruh dalam masyarakat tertentu.

Masyarakat yang ingin mengambil keuntungan penuh dari potensi kreativitasnya sendiri, yang ingin membentuk kembali dirinya sendiri untuk keuntungan anggota-anggotanya, harus membenarkan bahkan mendorong sektor gerakan sosial yang banyak dan berubah-ubah itu. Inilah yang disebut dengan masyarakat aktif atau masyarakat dinamis. Masyarakat yang menghalang, menindas atau membasmi gerakan sosial berarti menghancurkan mekanisme peningkatan diri dan kemajuan diri yang dimilikinya. Tanpa adanya gerakan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat atau gerakan sosial yang sempit cakupannya akan melahirkan suatu masyarakat pasif, dengan anggota-anggota yang bodoh, acuh tak acuh dan lemah, yang cenderung tidak berpeluang memperhatikan nasib masyarakatnya, dan akibatnya saling tidak memperhatikan satu sama lain. Keadaan ini akan perlahan pasti menuju kehidupan masyarakat yang stagnasi, monoton atau malah menghancurkan sistem sosial yang sudah ada.

5.3. Islam dalam Terma Gerakan Sosial

Agama dalam perspektif sosiologi diartikan sebagai sistem keyakinan, yang timbul sebagai usaha memberikan makna terhadap pengalaman-pengalaman spiritual masyarakat. Emile Durkheim (dalam Turner 1991) mengartikan agama sebagai suatu sistem yang dianut, serta tindakan-tindakan yang direalisasikan oleh sekelompok masyarakat dalam mentafsirkan dan memberi respons terhadap apa

yang dirasakan dan diyakini sebagai yang sakral. Landasan keyakinan keagamaan adalah pada konsep yang sakral (suci), yang dibedakan dari yang profan (duniawi). Menurut Durkheim, benda yang sakral adalah gambaran simbolik kekuatan masyarakat (Cuzzort & King 1987).

Agama sebagai sistem kepercayaan menjadi sebahagian yang penting dalam pembentukan sistem-sistem nilai yang ada pada masyarakat, dan menjadi pendorong atau penggerak, serta sebagai pengawal tindakan masyarakat untuk tetap berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat moral (*one single moral community*). Agama menjadi sumber pedoman bagi tindakan dan tingkah laku masyarakat. Kerana agama sebagai sistem kepercayaan mengandungi ajaran tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka agama berperanan dalam mengarahkan penganutnya untuk berorientasikan ke masa hadapan, yaitu masa hadapan dunia dan akhirat secara seimbang. Dengan demikian agama berfungsi sebagai sumber motivasi bagi penganutnya untuk bekerja, berjuang dan beramal untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Sistem keyakinan peribadi tentang rasa keagamaan direalisasikan dalam tindakan-tindakan keagamaan secara berkelompok dalam bentuk kegiatan-kegiatan peribadatan dan upacara-upacara ritual, sehingga membentuk suatu sistem sosial keagamaan dalam proses interaksi dinamik masyarakat beragama. Melalui bangunan sistem sosial keagamaan yang sentiasa menjadi azas poses dinamik masyarakat, maka agama akan tetap bertahan dalam sejarah perkembangan kemanusiaan. Dengan demikian agama tidak akan pernah tergantikan dan hilang dalam sistem sosial kehidupan sekular (Robertson 1995).

Secara fungsional agama melayani keperluan-keperluan manusia untuk mencari kebenaran dan menetralkan pengalaman-pengalaman buruk yang dialami. Semua agama menyajikan formula-

formula tertentu yang bersifat mendasar dan umum berkenaan dengan kewujudan dan perjalanan hidup manusia, yang masuk akal dan rasional sesuai dengan keyakinan agamanya, penuh dengan muatan-muatan emosi dan perasaan yang manusiawi (Geertz 1966).

Terdapat berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku keagamaan secara rasional. Antara perspektif tersebut yang paling dominan dan banyak dianut oleh para pakar sosiologi dalam menjelaskan hubungan antara agama dengan masyarakat adalah teori struktur fungsional. Kinsley Davis (1965) memaknai analisis sosiologi sebagai analisis fungsional, sebagaimana dikatakannya; (1) ujian atas peran (fungsi) yang dijalankan oleh satu institusi atau tingkah laku tertentu dalam masyarakat, serta cara-cara peran tadi berkaitan dengan gejala sosial lainnya; dan (2) penjelasan mengenai “makna sosial”. Hal ini menurut Davis merupakan hakikat dari analisis fungsional. Dalam pada itu setiap muslim, terikat oleh kewajiban moral untuk memandang dan melayani masyarakat sebagai satu “jasad yang tunggal” (*al-jasad al-Waahid*).

Wacana agama dan perubahannya hari ini menjadi lebih pendek dari garis sejarah tamadun. Hubungan agama dengan negara-negara; hubungan Islam dengan demokrasi; islamisasi ilmu atau hindunisasi ilmu; ekonomi Islam; fundamentalisme agama dan pembaharuan pemikiran boleh jadi merupakan senarai asesoris dari grand wacana hubungan panjang dan (mungkin) tidak pernah selesai antara agama dengan perubahan sosial. Hubungan tersebut dibina dari rumusan pertanyaan dan ragam tesis mengenai letak agama dalam perubahan sosial hari ini.

Max Weber dipandang sebagai tokoh sosiologi yang membuka jalan bagi terbentuknya paradigma “definisi sosial”, dengan konsepnya tentang tindakan sosial (*sosial action*) dan antar hubungan sosial (*sosial relationship*), yang kemudian dijadikan rujukan dalam

studi-studi sosiologi agama. Walaupun sebahagian besar perhatian Weber tercurah kepada tindakan sosial dan antar hubungan sosial, namun ia telah menghabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mempelajari fakta sosial. Pengajian sejarah perbandingan yang dilakukannya tentang pengaruh agama (Protestan) terhadap perkembangan ekonomi (kapitalisme) kebudayaan, adalah fakta sosial. Menurutnya, agamalah yang berjasa melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam sejarah tamadun manusia. Weber memulakan analisisnya dari tindakan sosial, tapi menumpukan pada tingkatan fakta sosial. Setelah pengikut Weber dari Amerika, Talcot Parson, menterjemahkan karya Weber kedalam bahasa inggris dalam “The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism”, buku Weber ini menjadi bacaan wajib bagi para penggemar sosiologi. Baik Durkheim, maupun Weber, bahkan juga Marx dan Talcot Parson, karya mereka telah mampu menyatukan dan mengintegrasikan antara paradigma dalam sosiologi (Ritzer & Goodman 2005)

Namun Weber, bukanlah manusia “hari ini”, tesisnya mengenai agama sebagai motor perubahan sosial itu dilahirkan sekitar seratus empatpuluhan tahun yang lalu. Hari ini kelihatannya yang terjadi sebaliknya, agama (utamanya) melalui instrumen teologinya harus mengejar “kebaharuan” pola interaksi sosial. Kapitalisme yang dulu dilahirkan oleh semangat agama, tapi kapitalisme yang jaya hari ini tidak lagi memerlukan dukungan agama. Tesis ini berangkat dari sebuah teori kritis yang menyeruak sekitar tahun 60-an utamanya melalui mazhab Frankfurt. Atau, pada peringkat epistemologi menjadi sebuah alternatif atas metodologi positivistik.

Sehingga paling tidak hingga hari ini, terdapat tarik-menarik yang begitu besar pada wacana yang berpengaruh dalam hubungan antara agama dengan perubahan sosial. Pertama, pendapat yang meletakkan agama (harusnya) berubah mengikut arus keadaan interaksi manusia.

Kedua, pendapat yang mengatakan keadaan hari inilah yang harus (dirubah) menyesuaikan (teks-teks) agama. Hal ini terjadi disebabkan oleh “kegelisahan” terhadap perkembangan keadaan interaksi manusia hari ini yang semakin membangun jarak terhadap kontrol agama, (Abdullah 1983; Purwoko & Sobary 1998; Madjid 1989).

Pendapat yang pertama tersebut meletakkan agama sebagai suprastruktur sosial. Agama bukanlah sebuah entitas otonomi yang vakum dari interaksi sosial diluarnya. Bahkan entitas “luar agama” itu boleh jadi mengendalikan (perubahan) agama. Agama terus berubah mengikuti pergeseran struktur ekonomi dan struktur budaya (Turner 1983). Karen Armstrong (2001) bahkan menggunakan term Tuhan (*God*) sebagai “a history of God” dalam menggambarkan betapa agama terus berubah, berdialektika dengan alam dan struktur sosialnya.

Sebuah buku terbitan Cross Cultural Publication tahun 1994 yang disunting oleh George B. Grose dan Benjamin J. Hubbart, “The Abraham Connection: A Jew, Cristian and Muslim in Dialogue”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bertajuk “Tiga Agama Satu Tuhan” oleh Penerbit Mizan, tahun 1998 persis menguatkan tesis Karen Armstrong dalam cara penuturan yang jauh berbeda. Buku ini disambut “biasa” saja oleh pemerhati perilaku keagamaan atau para agamawan. Buku hasil dialog ketua tiga agama, yaitu antara David Gordis (Yahudi), George Grose (Kristian) dan Muzammil Siddiq (Islam) ini luar biasa. Kerana titik temu agama-agama yang selama ini didengungkan melalui wacana teologi, atau lebih dari itu melalui semacam etika, moral agama yang dikandung, maka buku ini merupakan eksplorasi serius “kesatuan” agama-agama melalui sejarah yang otentik. Mengutip Kitab Suci masing-masing malah semakin menunjukkan otentisitas “kesatuan” agama itu. Kesan yang dapat ditangkap, polarisasi menjadi tiga agama adalah persoalan tafsiran dibalik struktur sosial yang mendasarinya.

Ketika Karen Amstrong (2001) mengeksplorasi bahagian “Kematian Tuhan” menuliskan, kaum muslim tidak mempunyai banyak masa atau tenaga untuk membangunkan pemahaman tradisional mereka tentang Tuhan. Mereka sibuk dalam usaha mengejar ketertinggalan dari Barat. Di Barat, “Tuhan” dipandang sebagai suara keterasingan. Di dunia Islam suara tersebut berasal dari proses penjajahan kerana tertinggal dari akar budaya sendiri. Orang-orang merasa kehilangan arah dan putus asa. Sebahagian pembaharu Muslim berupaya mempercepat langkah kemajuan dengan cara paksa meletakkan Islam pada kedudukan minor.

Tesis yang dikembangkan Karen Amstrong tersebut menyelaraskan agama dengan idea, falsafah, seni, undang-undang dan ideologi berada pada kedudukan super struktur dari infrastruktur material. Secara substantif tesis ini bukan baru, bahkan jauh melampaui masa kelahiran Karl Marx (1818), tesis itu diperkenalkan oleh saintis muslim kelahiran Tunisia, Ibn Khaldun (1332-1406). Khaldun mengkaji pengaruh lingkungan fisik terhadap bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, hubungan antara kelompok dan berbagai fenomena budaya yang berkenaan dengan kesenian, kerajinan, ilmu pengetahuan, perpaduan atau kohesi sosial (lihat Ibnu Khaldun 1967). Sungguhpun demikian dalam sejarah khasanah intelektual Islam tesis seperti ini dipersoalkan sebagai sebuah masalah teologik, bukan sebuah persoalan keilmuan yang positif dalam matra epistemologis atau metodologis. Sehingga aktivitas keilmuan yang bertumpu pada kaedah induktif di kalangan Muslim terhenti kerana kajian empirik (induktif) yang lahir dari pendekatan Ibn Khaldun dihampiri secara deduktif-teologis. Kritikan terhadap perspektif Khaldun ini secara keilmuan (bukan bentuk kritik teologisnya) sukar ditemui dikalangan ilmuwan muslim. Kritik yang relevan hanya dapat dijumpai pada perspektif idealistik yang bermuara dari pandangan Alfred North Whitehead yang menyatakan “idea umum selalu mengancam aturan yang ada”.

Kemudian Auguste Comte, Frederich Hegel dan kajian induktif secara monumental bermuara pada Max Weber dalam pelajarannya mengenai hubungan agama dengan perkembangan ekonomi.

Perang dingin teologi di kalangan Muslim terjadi dalam menanggapi implikasi perspektif materialisme. Perspektif materialisme meletakkan agama hanya sebagai sebahagian dari ragam institusi yang ada di dalam masyarakat dan terletak diujung mata rantai ketika terjadi perubahan sosial. Ilyas Ba.Yunus (1985), anggota sosiologi dari The State University, New York mengkritik tajam pendekatan yang disebutnya sebagai bias Barat ini dari ranah epistemologis. Bahwa kesalahan besar pandangan ini adalah menempatkan agama sebagai segmen atau bahagian kecil saja dari masyarakat. Tangkisan untuk menolak tesis mengenai agama sebagai supra-struktur dari infrastruktur material adalah bahwa tesis tersebut hanya belaku pada pengalaman sejarah Barat-Kristian. Unsur pengalaman Barat seperti sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan um um tidak berlaku dalam masyarakat muslim.

Kemudian sekularisme seperti sontak tiba-tiba menjadi tema utama yang menantang sejak proses perubahan struktur pada masyarakat dunia ketiga pada tahun 60-an. Pergeseran struktur sebagai sebuah data empiris ke arah diferensiasi struktur yang gelagatnya menyamai sistem sosial Barat sukar diingkari sebagai sebuah kenyataan. Meminjam istilah Anthony Giddens gerak itu ibarat Jugernout, bus besar yang melaju secara tidak terkendali.

Tesis yang menempatkan agama sebagai suprastruktur, sama dengan penonjolan aspek “antroposentris” dibandingkan aspek “teosentrisnya”. Terma antroposentris difahami bahwa agama kemanfaatannya selalu pada aspek-aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan sebagai dasar segala aktivitas, maka spiritual maupun ritual akan selalu disandarkan dalam konteks kemanusiaan. Aspek humanitarian ini kehadirannya hanya bisa wujud pada aktualisasi

interaksi sosial. Sementara aspek teosentris memandang Tuhan diatas segalanya. Ketundukan manusia adalah dalam rangka ketundukan itu sendiri tanpa perlu difahami sebagai prosesi imanensi.

Agama bagaimanapun selalu menampilkan dua sisi tersebut, antroposentris dan teosentris. Pada masyarakat Islam didapati pemaknaan ajaran agama yang terdapat dalam al-Qur'an secara antroposentris (humanetarian) ketika memandang al-Quran yang kehadirinya semata-mata sebagai petunjuk manusia. Maka tidak ada ayat yang begitu saja tersembunyi tanpa dimaknai dalam konteks interaksi antar manusia.

Walaupun perlu catatan khusus perbedaan keberlakuan tesis ini dalam komuniti Islam Sunni dan Islam Syiah. Dikalangan Sunni pembaharuan pemikiran Islam terasa lebih progresif, barangkali watak teologinya yang 'meminimalkan' perlunya kemaksuman keturunan. Ini maknanya kalangan Suni akan lebih adaptif terhadap ide demokrasi. Dengan demikian dalam Suni doktrin kuasa atas tafsir, hampir dapat berubah, dalam pengartian ini doktrin Sunni lebih bernuansa antroposentris dibandingkan dengan sahabatnya kalangan Syiah.

Tulisan-tulisan tentang gerakan Islam yang terjadi sebelum 1980 hampir selalu dikaitkan dengan gerakan Komunisme atau Sosialisme yang berkelindan dengan isu-isu atau aspirasi kelompok tertentu yang menuntut perbaikan nasib atau pergantian pemerintahan seperti kaum pekerja, kaum tani, dan kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara tertentu, seperti GAM di Aceh dan pembebasan Muslim Moro dan sebagainya (Burke and Lapidus 1998). Sedangkan sebahagian besar tulisan tentang gerakan Islam yang terjadi sejak 1979, tahun di mana Revolusi Iran terjadi, apalagi setelah peristiwa terorisme di gedung *World Trade Centre* (WTC) Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2002, dikuasai oleh radikalisme, fundamentalisme, atau bahkan kekerasan Islam dan perebutan kekuasaan dengan atas nama agama. Secara

akademik gerakan sosial seperti ini disebut “*old sosial movements*”, yaitu gerakan sosial yang memperjuangkan tema yang bersifat kepentingan kelompok seperti pekerja, petani dan sebagainya. Dan disebut “*new sosial movement*” biasanya gerakan yang mengambil isu-isu lingkungan, kesetaraan perempuan, hak-hak politik yang bersifat lintas kelompok, termasuk paham keagamaan.

Jarang sekali tulisan tentang gerakan Islam yang dikaitkan dengan pembebasan tertentu, misalnya pembebasan dari kemiskinan atau ketertindasan, kebebasan berfikir dan sebagainya. Pengecualian mungkin di Afrika Selatan yang ditulis sendiri oleh aktivisnya, yaitu Farid Esack (1997), di mana sebahagian kaum Muslim di sana menjadi sebahagian dari gerakan pembebasan dari politik apartheid. Fakta ini bertolak belakang dengan tulisan-tulisan tentang gerakan agama lain. Kenyataannya, masyarakat dengan mudah dapat mencari suatu gerakan pembebasan dari ketertindasan seperti Martin Luther King Jr. di AS; Sulak Civaraksa di Thailand; Desmond Tutu dan Nelson Mandela di Afrika Selatan; Kardinal Sin di Pilipin; Uskup Bello di Timor Timur; Romo Mangun dan Ibu Gedong Oka di Indonesia, untuk beberapa contoh.

Gerakan Islam hampir selalu berupa Islam Fundamentalis seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Al-Islamy di Pakistan; belakangan muncul Taliban dan Mujahidin di Afghanistan; FIS di Al-Jazair; revolusi Mullah di Iran dan seterusnya. Pemikiran yang konspiratif akan mempersoalkan kemungkinan adanya rekayasa pemunculan gerakan-gerakan dan para tokohnya itu sebagai penentang Barat atau Amerika Serikat khususnya, serta penentang pemodernan, dan kerana itu sebagai gerakan antagonis. Sebaliknya, gerakan dan tokoh di luar Islam sebagai penyelamat manusia dari penindasan kuasa dan kezaliman.

Tetapi pemikiran jernih akan memberikan kemungkinan bagi penilaian betapa capaian Islam atas pandangannya tentang dunia

dan manusia begitu terbatas dan sempit. Seperti juga dalam revolusi Komunisme, maka dalam Islam gerakan sosial dan revolusi cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi meraih tujuan “kejayaan agama” (baca: kekuasaan). Dengan demikian, ada problematik secara ideologi dan mungkin teologi bagi pandangan Islam dalam melihat pembebasan dalam dimensi-dimensi kemanusiaan. Perbedaan azas di antara teologi pembebasan dalam Katolik misalnya, ia secara langsung melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil arus lain dari *mainstream*. Penyadaran atau *conscientization* dalam bahasa. Bahasa Paulo Freire, kepada masyarakat telah mengukuhkan kesadaran yang bersifat massa. Kepemimpinan dan pelibatan para pemimpin Katolik untuk kasus di Amerika Latin misalnya, mampu menggoyahkan struktur Gereja yang hirarkis, dan sekaligus menggoyahkan struktur negara. Tetapi dalam masa yang sama para pelaku itu sendiri tidak mengambil alih struktur hirarkis kembali, maupun struktur negara. Melainkan masyarakatlah yang mengambil keuntungan dari proses tersebut (Levine 1992).

Teologi pembebasan Islam seperti yang dirintis oleh Engineer (1990) di India sukar untuk tidak dikatakan berhenti pada sekadar perdebatan dan perbincangan. Memang ada satu dua pemikirannya memberikan pengaruh untuk tafsir praksis seperti kesamaan perempuan dan anti-diskriminasi tetapi sukar untuk dikatakan ia merupakan akibat langsung dari gerakan itu. Ini pun mengabaikan keputusan capaian yang terukur, misalnya bagi perempuan dan non-Muslim di negara mayoritas Muslim hingga saat ini. Sebaliknya, gerakan Islam yang terukur dan mampu menggerakkan kesadaran orang, justeru mengarah kepada ketidakbebasan dan penerapan ajaran agama atau *nash-nash* secara tekstual.

Revolusi Iran 1979 adalah tonggak dimana gerakan Islam fundamentalis atau radikal mengambil pusat tengah (pusat kekuasaan) dan kemudian menguasainya dalam konteks nation-state,

setelah sebelumnya berdiri di pinggiran dan bersandar kepada petani, buruh dan sebagainya melalui ideologi sosialisme atau komuniasme. Revolusi itu juga menyiram konfidensi yang sangat tinggi bahwa untuk melakukan gerakan dan merebut kekuasaan, Islam tidak diperlukan lagi mendompleng ideologi sosialisme dan komunias, apalagi kapitalisme (Armstrong 2001). Agama di situ benar-benar menjadi pusat kekuasaan yang dapat menentukan nasib semua orang di wilayah negara itu. Fenomena yang sama kemudian disusul oleh berbagai konflik kekuasaan dengan misi penguatan Syariah Islam, seperti di Sudan, Pakistan dan sebagainya, yang bukan tidak mungkin orang Islam sendiri yang menjadi korban.

Gerakan sosial baru Islam di Indonesia sepadan dengan kenyataan dan penjelasan gerakan sosial baru tersebut. Sukar untuk mencari penjelasan tentang gerakan sosial baru Islam di Indonesia yang tidak berhimpitan dengan “lembaga sosial masyarakat” (NGO) dan organisasi sosial masyarakat. Dari sudut orientasi dan komitmen, ada dua bentuk gerakan sosial Islam di Indonesia. Pertama, gerakan yang bersifat sederhana dalam arti secara politik tidak menawarkan alternatif radikal terhadap kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung. Kedua, mereka yang secara radikal menawarkan alternatif landasan dan kenyataan sosial politik yang sedang berlangsung, serta cenderung konfrontatif terhadap lawan dan kelompok moderat. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok radikal atau fundamentalis. Kedua bentuk tersebut menampakkkan ciri-ciri yang sama, yaitu berhimpitan dengan “lembaga sosial masyarakat” (NGO) dan organsasi sosial kemasyarakatan atau bahkan dengan partai politik.

Yang terjadi kemudian adalah bahwa gerakan sosial tersebut cenderung bukan mewakili keinginan dari masyarakat pengikut melainkan sebaliknya, ia merupakan bentuk penundukan atau titipan dari struktur politik negara atau kekuasaan tertentu. Gejala

demikian dalam kesusasteraan gerakan sosial disebut *contra sosial movements* atau *contra movements*, yaitu cara-cara negara atau kekuasaan menundukkan tuntutan gerakan soaial untuk menolak atau menghalang perubahan yang dipaksakan atau dengan kata lain cara memaksakan dasar penguasa kepada kelompok tertentu (Cunningham 2003). Gerakan sosial Islam yang radikal pun di Indonesia menmpakkan banyak bukti merupakan perencanaan dari penguasa tertentu.

Padahal sesungguhnya, kecenderungan umum gerakan sosial adalah merupakan bentuk alternatif atau semacam terobosan dari demokrasi perwakilan formal melalui tiga tiang utama demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Makin mapan sebuah demokrasi, makin memberikan peluang terjadinya gerakan sosial, ketika terjadi hambatan aspirasi dalam mewakili formal (Goldstone 2003). Oleh itu, memang hubungan gerakan sosial dan partai politik dalam demokrasi yang sudah mapan tidak selalu bersifat antagonis, melainkan boeh jadi merupakan perikatan strategik dan saling menopang ketika ada titik temu. Pertanyaannya, seberapa jauh aspirasi dari kelompok gerakan sosial mempengaruhi keputusan dan polisi, bukan sebaliknya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah tertentu. Yang hendak dikatakan di sini adalah, bahwa persoalan kedudukan gerakan sosial terhadap partai politik dan kuasa bukanlah persoalan hubungan itu sendiri, melainkan bentuk dan kualitas dari hubungan, serta esensi dari aspirasi dalam hubungan tersebut.

Bagi proponen gerakan sosial moderat, maka kenyataan demikian merupakan hal yang wajar. Sebaliknya, bagi proponen gerakan radikal, menunjukkan dukungannya bahwa seolah hanya gerakan Islam radikal yang relevan saat ini, terutama jika dikaitkan dengan merajalelanya neoliberalisme dan dominasi Amerika Serikat atas dunia. Fariz Noor (2006) misalnya, mengatakan bahwa gerakan

radikal atau fundamentalisme Islam adalah satu-satunya bentuk gerakan yang mampu memberikan respon terhadap kecenderungan tersebut.

Dalam situasi dominasi neoliberalisme dan Amerika Serikat yang menguasai dunia saat ini, pendekatan sederhana memang tidak akan mampu memberikan kontribusi cukup untuk mengubah situasi ketidakadilan global dan juga secara lokal dan nasional yang saling berkaitan. Namun kecenderungan kalangan radikal atau fundamentalis Islam yang hanya memberikan satu-satunya pilihan, anti intelektualisme serta penafsiran tekstual terhadap agama dan dalam beberapa perkara menghalalkan kekerasan, harus diberikan perhatian kritis. Sama perhatian kritisnya terhadap kecenderungan dengan membiarkan ketidakadilan dan pengabaian kalangan moderat terhadap penindasan dan kepincangan.

Radikalisasi dimaksud adalah ukuran capaian atas idealisme gerakan dan cara-cara yang tidak konvensional dalam membangun gerakan, serta mengandalkan *local resources* dalam rekrutmen dan pembiayaan gerakan. Itu semua tidak dengan sendirinya menolak untuk kontekstualisasi dan kompromi dalam hal-hal tertentu dengan peta politik dan sosial yang sedang berlangsung. Beberapa contoh gerakan relatif ideal, yaitu gerakan yang dilakukan “SMP Alternatif” Qurriyah Thoyyibah yang dipimpin Bahruddin di Salatiga dan Pengajian Rutin untuk kesetaraan perempuan dalam Islam pimpinan Ruqoyyah di Bondowoso (Bruinessen 2006) dan Komunitas Seniman yang dipelopori Aceh Zamzam Noor di Tasikmalaya (Ahmad Suaedy 2005).

5.4. Dakwah Sufistik; Satu Alternatif Gerakan Dakwah

Keberadaan sufisme di Indonesia difahami sebagai gerakan amalan ajaran Islam yang menyimpang dan memisahkan diri dari “ortodoksi” atau “mainstrim” (aliran induk) yang berlaku.

Untuk menentukan mana yang “sufisme”, pertama-tama harus mendefinisikan “mainstrim” yang ortodoks itu. Dalam kasus Islam Indonesia masa kini, ortodoksi barangkali dapat dianggap diwakili oleh badan-badan ulama yang berwibawa seperti; terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syuriah Nahdatul Ulama, dan sebagainya. Kelompok keagamaan yang terdiri dari beberapa tokoh agama (ulama) yang mempunyai kuasa-legitimatif dalam memberikan tafsiran kontekstual terhadap beberapa teks (nash) ajaran agama bila berkenaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pada perkembangan kehidupan beragama pada masyarakat Buddha di Thailand dikenal dengan lahirnya sebuah badan *Ecclesia* (lihat Ishii 1993).

Untuk menganalisa fenomena gerakan sufisme secara lebih jernih, mungkin ada baiknya kalau kita merujuk kepada kajian sosiologi agama yang sudah ada, untuk melihat apakah ada penemuan yang relevan untuk situasi Indonesia. Hanya saja, kerana sosiologi agama adalah salah satu disiplin ilmu yang lahir dan dikembangkan di dunia Barat, sasaran kajiannya lebih kerap terdiri dari umat Kristian dibandingkan dengan penganut agama-agama lain. Oleh kerana itu, belum tentu penemuannya benar-benar relevan untuk dunia Islam. Beberapa konsep dasar yang digunakan barangkali sangat bergantung pada konteks budaya Barat, yang berbeda dengan budaya atau fenomena keagamaan masyarakat Indonesia. Namun begitu, tidak ada salahnya konsep sosiologi agama “Barat” dijadikan dasar analisis fenomena sufisme Indonesia, yang kemudian dijadikan alat pembanding berbagai fenomena keagamaan masyarakat Islam Indonesia, termasuk fenomena sufisme dan gerakan kebudayaannya.

Dua sosiologi agama Jerman mempunyai pengaruh besar terhadap kajian mengenai sekte selama abad ini, mereka adalah Max Weber dan Ernst Troeltsch. Weber terkenal dengan tesisnya mengenai peranan sekte-sekte Protestan dalam perkembangan

semangat kapitalisme di Eropah, dan dengan teorinya mengenai kepemimpinan karismatik. Troeltsch, teman dekat Weber, mengembangkan beberapa gagasan Weber dalam pelajarannya mengenai munculnya gerakan sempalan di Eropah pada abad pertengahan (Abdullah 1979). Troeltsch memulai analisisnya dengan membedakan dua jenis umat beragama yang secara konseptual merupakan dua kubu bertentangan, yaitu “jenis gereja” dan “jenis sekte”. Contoh paling murni dari jenis gereja adalah Gereja Katolik abad pertengahan. Organisasi-organisasi jenis gereja biasanya berusaha menguasai dan mendominasi seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Sebagai kelompok yang mapan (*established*), mereka cenderung konservatif, formalistik, dan berkompromi dengan penguasa serta elit politik dan ekonomi. Padanya terdapat hierarki yang ketat, dan ada golongan tilit agama yang memonopoli akan ilmu dan karamah, di mana orang umum bergantung kepada mereka.

Jenis sekte, sebaliknya, selalu lebih kecil dan hubungan antara sesama anggotanya biasanya egaliter. Berbeda dengan jenis gereja, keanggotaannya bersifat sukarela, orang tidak dilahirkan dalam lingkungan sekte tetapi masuk atas kehendak sendiri. Sekte biasanya berpegang lebih kuat (atau kaku) kepada prinsip, menuntut ketaatan kepada nilai moral yang ketat, dan mengambil jarak dari penguasa dan dari kenikmatan material. Sekte biasanya berpendirian bahwa ajarannya lebih murni, lebih konsisten dengan wahyu Tuhan. Mereka cenderung membuat perbedaan tajam antara para penganutnya yang suci dengan orang luar yang um um dan penuh kekurangan serta dosa. Seringkali, kata Troeltsch, sekte muncul pertama-tama di kalangan yang berpendapatan dan pendidikan rendah, dan baru kemudian meluas ke kalangan yang lain. Mereka sering cenderung memisahkan diri secara fizikal dari masyarakat sekitarnya, dan menolak budaya dan ilmu pengetahuan sekular (Robertson 1995).

Selain sekte, Troeltsch menyoroti suatu jenis gerakan lagi yang muncul sebagai pembangkang terhadap gereja (atau ortodoksi yang lain), yaitu gerakan “misticisme” (tasawuf). Sementara sekte memisahkan diri dari gereja kerana mereka menganggap gereja telah kehilangan semangat asalnya dan terlalu berkompromi, gerakan-gerakan misticisme merupakan reaksi terhadap formalitas dan “kekeringan” gereja. Gerakan misticisme, menurut Troeltsch, memusatkan perhatian kepada penghayatan rohani-individu, terlepas dari sikapnya terhadap masyarakat sekitar. Oleh itu, Troeltsch juga memakai istilah “individualisme keagamaan”. Penganutnya boleh sahaja dari kalangan mapan (*establishment*), boleh juga dari kalangan yang tak setuju dengan tatanan masyarakat yang berlaku. Mereka biasanya kurang tertarik kepada ajaran agama yang formal, apalagi kepada institusi-institusi agama (gereja, dan sebagainya). Yang dipentingkan mereka adalah hubungan langsung antara individu dan Tuhan (atau alam ghaib pada umumnya).

Analisa Troeltsch ini berdasarkan pengetahuannya tentang sejarah gereja di Eropah, dan tidak boleh dilaksanakan begitu sahaja atas budaya lain. Organisasi “jenis gereja” tidak terdapat dalam setiap masyarakat, tetapi tanpa kehadiran suatu gereja pun sekte boleh sahaja muncul. Ortodoksi Islam Indonesia seperti diwakili oleh MUI dan sebagainya, tentu sahaja tidak sama dengan Gereja Katolik abad pertengahan; ia tidak mempunyai kuasa atas kehidupan peribadi orang seperti Gereja.

Gerakan sosial sejatinya adalah sebuah gerakan yang boleh saja merupakan gerakan keagamaan, gerakan kebudayaan, atau gabungan keduanya. Artinya, boleh jadi gerakan keagamaan melalui pendekatan kebudayaan, atau sebaliknya. Atau boleh jadi juga gerakan keagamaan yang melahirkan atau membentuk budaya yang tertentu, dan sebagainya. Sufisme dalam realitas perkembangan dan penyebarannya, serta pengaruhnya dalam pembentukan struktur sosial dan kebudayaan masyarakat sesungguhnya juga adalah gerakan sosial.

Agama merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling kokoh. Agama merupakan ajaran simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia, dan yang memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang semua realitas. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari situasi kekacauan. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tartinggi dan mutlak tentang kewujudan manusia patunjuk-petunjuk untuk hidup selamat dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, bertamadun dan berperikemanusiaan, yang berbeda dari cara-cara hidup haiwan atau makhluk yang lain. Agama sebagai sistem kepercayaan dapat menjadi bahagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta kawalan bagi tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

Pada keadaan pengaruh ajaran agama-agama sangat kuat terhadap sistem nilai dari kebudayaan masyarakat, maka sistem nilai kebudayaan itu terwujud sebagai simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agama yang menjadi rujukannya. Keadaan ini secara langsung atau tidak langsung, etos yang menjadi pedoman dari kewujudan dan aktivitas berbagai pranata yang ada dalam masyarakat seperti keluarga, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, dipengaruhi, digerakkan dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya adalah agama, kemudian terwujud dalam kegiatan anggota masyarakat sebagai tindakan yang dibungkus oleh simbol-simbol suci. Keyakinan agama yang sifatnya peribadi dan individu dapat terwujud sebagai tindakan kelompok. Keyakinan itu menjadi bersifat sosial oleh sebab utama, bahwa hakikat agama itu sendiri yang salah satu penekanan ajarannya adalah hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Kegiatan keagamaan dalam bentuk berjemaah, atau upacara keagamaan dalam kelompok amat penting

dalam setiap agama. Dalam kelompok yang dilandasi oleh satu ajaran agama, keyakinan keagamaan dari anggota kelompok menjadi kuat dan mantap. Tidak akan ada kesimpangsiuran dalam pemahaman mengenai pedoman dan landasan yang menentukan arah keyakinan keagamaan yang telah ditetapkan di dalam kitab suci agamanya.

Kehidupan manusia, di mana-mana, tidak selamanya mulus, selalu dibayangi oleh kegagalan, frustrasi, dan rasa ketidakadilan. Agama menjadi fungsional dalam struktur kehidupan manusia dalam usaha mengatasi dan menetralkan bayangan-bayangan buruk tersebut. Usaha-usaha meneutralkan dan mengatasi hal-hal buruk dalam kehidupan manusia yang dilakukan dalam kelompok dirasakan sebagai lebih berkesan dan meyakinkan, dibandingkan dengan usaha-usaha secara peribadi. Kerana dalam kelompok, usaha-usaha tersebut boleh diletakkan dalam suatu konteks sistem yang lebih besar, yaitu kegiatan kelompok dengan beban yang dipikul bersama. Pada sistem yang lebih besar ini, penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal buruk dalam kehidupan manusia, dilihat sebagai suatu bahagian dari sistem mekanisma dunia ghaib yang turut campur dalam kehidupan duniawi. Hal ini menimbulkan harapan kepada kebaikan kehidupan, yang tumbuh melalui kebersamaan dan perlindungan dari Tuhan, dari segala malapetaka dunia dan akhirat.

Berbeda dengan kehidupan masyarakat modern yang ditandai oleh proses diferensiasi institusi. Institusi-institusi yang dahulu memainkan peranan majmuk dalam arti tertentu yang monopolistik akan terpaksa menerima peranan khusus dan terhad. Diferensiasi berarti suatu proses di mana peranan, status dan organisasi keagamaan menjadi terpisah dari peranan, status dan organisasi politik, pendidikan, profesi serta sistem undang-undang. Dengan diferensiasi sekular, tatanan kehidupan sosial berpisah dengan nilai-nilai keagamaan (Johnson 1990).

Para ahli antropologi dan sosiologi pada pertengahan dan akhir abad ke-19 cenderung menulis mengenai agama, terutama tentang ketidaksesuaiannya dengan masyarakat industri. Agama dianggap sebagai gejala yang makin hilang maknanya pada saat masyarakat berkembang semakin maju. Bentuk pemikiran evolusi ini ditolak habis-habisan oleh sejumlah anggota sosiologi yang menulis dalam tahun 1920-an. Menurut mereka, derasnya pengaruh modernisasi akan mengurangkan peranan politik agama akan mengurangkan keterikatan individu terhadap nilai-nilai keagamaan. Mereka menyatakan bahwa terbukanya peluang pendidikan, fenomena kehidupan perkotaan, adanya lapangan kerja modern, teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta bentuk organisasi sosial yang baru dan lebih kompleks menyebabkan tersebarnya sekularisasi, pluralisme, dan diferensiasi sosial di seluruh kehidupan. Modernisasi menyebabkan lembaga-lembaga keagamaan tradisional berkurang atau lenyap, dan pengaruh agama terhadap berbagai budaya dan masyarakat menjadi melemah. Agama hanya akan menjadi urusan individu, tidak lagi menjadi sebuah kekuatan kolektif, kontrol sosial dan mobilisasi sosial (Robertson 1995).

Modernisasi dengan seluruh dimensinya ternyata memunculkan persoalan baru yang krusial dan akut. Ia seringkali dituduh sebagai akar masalah yang menyebabkan teralienasinya manusia. Menurut Seyyed Husein Nasr (1991), kenyataan bahwa modernitas membawa pengaruh negatif yang destruktif terhadap kewujudan manusia, disebabkan kerana modernisme tidak berakar pada dimensi transenden. Ia hanya mampu membawa manusia untuk mengetahui separuh dari hakikat kehidupan dunia. Kerana itu pula, ia gagal untuk membantu manusia mencari “rangkaiian besar kehidupan” (*the great chain being*). Tamadun modern telah menelantarkan serta mreduksi nilai-nilai kemanusiaan yang penting, sehingga manusia modern teralienasi dari kewujudannya, dari keterasingan raga lalu mengalami keterasingan jiwa.

Pada saat kepercayaan orang terhadap modernisme semakin lemah pada sejumlah kelompok masyarakat, tumbuh kembali keyakinan keagamaan yang semakin kuat, yang menyatakan bahwa agama adalah satu-satunya media yang dapat memberikan alternatif jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam berbagai dimensinya. Maka tidak mengherankan, jika para ahli memberikan ramalan yang cukup “meyakinkan” tentang kebangkitan agama. John Neisbitt dan Patricia Aburdene (1990) misalnya, mengatakan bahwa menjelang fajar milenium ketiga, tidak dapat diragukan lagi terdapat tanda-tanda kebangkitan agama. Kenyataan Neisbitt ini dikaitkan dengan adanya penunjuk menaikinya spiritualisme, terutama dikalangan masyarakat Amerika. Sebagian dari masyarakat Amerika mulai percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan spiritual yang positif dan aktif.

Kenyataannya, kebangkitan kembali agama tersebut bukan pada agama konvensional atau formal. Kecenderungan dari masyarakat mengelakkan agama-agama utama, yang mereka anggap telah mengalami kemapanan, oleh kerana itu tidak mampu memberikan jawaban terhadap carian spiritual mereka. Sebaliknya, mereka kemudian masuk ke dalam aliran-aliran spiritual, sekte-sekte keagamaan, atau kultus-kultus yang menawarkan ritual kontemplatif eksklusif yang memberikan nilai lebih bagi kehausan spiritual mereka.

Dalam konteks seperti ini, sebagaimana kecenderungan yang terjadi di Indonesia, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini aliran-aliran keagamaan spiritual, seperti faham sufistik, mengalami perkembangan yang pesat, khususnya di daerah perkotaan. Pada keadaan ini, modernitas menjadi faktor pendorong, sekaligus faktor penarik bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk mengikuti kelompok ajaran sufistik, yang sebelumnya berada di luar perkotaan.

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kota, hidup dalam sistem materialistik dan sekularistik. Kebendaan menjadi ukuran

kejayaan dan kebahagiaan. Setiap orang berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang terkadang tidak terkendali, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai matlamat. Akibatnya, nilai-nilai kemanusiaan semakin surut, toleransi, perpaduan sosial, serta nilai-nilai kebersamaan semakin hilang, kehidupan semakin bercorak individu. Kehidupan modern menyebabkan memudarnya ikatan sosial yang tradisional, yang menyebabkan suatu kekosongan emosional dan moral di kalangan masyarakat kota.

Kehidupan modern menciptakan kerinduan kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang dapat menuntun manusia menuju fitrah kehidupannya. Sufisme dan aliran mistisime lain dapat memenuhi keperluan yang dirasakan orang banyak. Organisasi formal seperti itu menawarkan suasana emosional dan spiritual yang semakin sukar dicari dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu proses depolitisasi Islam beberapa dekad ini menyebabkan sebahagian umat tidak lagi menaruh perhatian pada cita-cita politik Islam, tetapi kepada pengalaman rohani dan akhlak peribadi. Dalam arti ini, ajaran sufistik menjadi faktor penarik bagi penyelesaian krisis moral yang dialami oleh masyarakat modern Indonesia.

Gejala sosial masyarakat sufi telah lama menarik perhatian ahli ilmu sosial saat ajaran sufi begitu populer bagi masyarakat. Kunci keberagamaan sufi terpusat pada usaha memperoleh keredaan Tuhan melalui takdir-Nya dengan tata laku yang boleh beragam dan berbeda. Keredaan Tuhan adalah kunci sukses duniawi dan ukhrawi yang boleh menjadi pembuka peluang bagi orang-orang khusus menduduki kedudukan sebagai orang tengah bagi hubungan orang dan Tuhan, yang disebut “guru” atau “mursyid”. Persoalannya terletak pada konsep tauhid sebagai akar dan azas kepercayaan dimana Tuhan dipercayai sebagai pelaku tunggal dan terlibat dalam semua peristiwa yang boleh mencipta model mistik melalui “orang

suci”. Popularitas sufi sebagai reaksi formalisasi tauhid dan syariah lisan yang menghargai pengalaman religius, memberi ruang luas bagi pembangunan kesolehan batin, di saat Tuhan tak pernah boleh diru! muskan secara jelas. Tuhan yang transenden dan abstrak itu telah membuka tafsiran tempatan sesuai pengalaman personal yang boleh dimanipulasi siapa saja yang “berjubah Tuhan”. Muncullah peranan perantara hubungan manusia-Tuhan yang seringkali menjadi teras amalan-amalan sufi atau sufistik.

Faktanya, amalan syariah atau sufi memerlukan jasa orang-orang khusus yang disebut guru mursyid, orang alim atau orang pintar di dalam beragam kedudukan; imam, guru mengaji atau khatib. Pada tahap lanjut, fungsi sosial orang khusus ini terlembaga dalam organisasi Islam atau tempat dan kegiatan ibadah sebagai pimpinan. Melalui “orang suci” itulah umat menghubungkan diri secara kekal dengan Tuhan dan berharap mendapatkan kebaikan di dunia dan sesudah kematian. Kerana itulah mengapa ulama mempunyai kedudukan istimewa sebagai pelanjut fungsi kenabian dan kedudukan sentral Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatukan ekstrimitas Tuhan yang sakral dan suci dengan manusia yang profan. Tuhan Satu itu sekaligus ada di semua tempat, keadaan, waktu dan meliputi segala hal. Lahirlah idea “*mujassimah*” (panteisme) sebagai akar idea “*wihdatul wujud*” (menyatu dengan Tuhan) dalam tradisi sufi.

Oleh sebab itu, gerakan sosial sufistik lebih bermakna menciptakan masyarakat atau individu yang mempunyai kearifan, kecerdasan moral dan kecerdasan sosial. Solidaritas sosial yang terbentuk melalui aktualiasi ajaran sufistik ke dalam realitas kehidupan sehari-hari, menciptakan kedamaian individual maupun kedamaian kehidupan sosial. Proses pencerahan kehidupan batiniah kelompok sufistik, yang selanjutnya berpengaruh kepada kehidupan masyarakat luas, membentuk watak sosial melalui mencipta sistem sosial tertentu. Sistem sosial yang bernuansa sufistik ini yang

kemudian melahirkan norma-norma sosial yang mengikat anggota masyarakat melalui berperilaku.

Inilah sesungguhnya gerakan dakwah sufistik itu. Gerakan yang bukan berbentuk gerakan protes, anarkhis atau gerakan revolusioner melawan suatu kekuatan penguasa. Gerakan dakwah sufistik bersifat humanis, evolutif dan alamiah, mempengaruhi atau membina kehidupan sosio-budaya masyarakat yang bermaruah, di mana ajaran Islam dipraktekkan. Gerakan dakwah sufistik, bukan saja bermakna terciptanya perubahan sosial. Gerakan dakwah sufistik juga boleh diberi makna sebagai kemampuan untuk mempertahankan identitas budaya yang sudah ada dari pengaruh budaya luar yang cenderung merusakkan pola kehidupan individu, maupun pola hidup masyarakat. Mempertahankan nilai-nilai religiusitas kehidupan masyarakat dari serangan sekularisme dan penyakit modernisme, yang terbukti merusakkan nilai falsafah “hidup bermasyarakat”, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling tolong, menuju kedamaian sebagai fitrah kehidupan.

5.5. Kebudayaan Ketuhanan; Tujuan Hakiki Gerakan Dakwah

Kesadaran keagamaan adalah jangkar bagi apresiasi kebudayaan dan sikap jernih atas problem sosial masyarakat Islam. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan organisasi atau partai Islam memperoleh dukungan mayoritas dalam setiap pemilihan umum di Indonesia, di tengah pemilih yang mayoritas Muslim, yang sukar difahami oleh aktivis Islam. Demikian pula harapan-harapan politik Islam yang hampir selalu gagal diwujudkan. Kesukaran ini merupakan akibat budaya yang tidak dipadukan dalam kesalehan. Kebudayaan dan kesolehan bukan difahami sebagai proses sosial yang berjalan bersama. Di sini pula letak kesukaran bangsa yang dikenali religius ini keluar dari multi krisis sesudah beberapa tahun berlangsung.

Kurang disadari bahwa kebudayaanlah sebenarnya yang memperterang wujud Tuhan dan membuat kehadiran-Nya dikenal manusia di muka bumi. Ironinya, justru budaya dipandang bertentangan dengan ajaran Tuhan, dan selanjutnya membuat Tuhan mati dalam kehidupan. Nilai-nilai ketuhanan tidak tercermin dalam proses sosial budaya masyarakat beragama. Inilah yang menjadi salah satu faktor penting menyebabkan gerakan keagamaan kesukaran untuk peduli kepada permasalahan kemanusiaan. Oleh kerana kesalehan diletakkan di luar sistem kebudayaan, menjadikan gerakan Islam gagal memperoleh dukungan signifikan dari umatnya sendiri.

Keyakinan agama sebagai ajaran Tuhan yang mutlak benar dan yang universal, tidak sama sekali terganggu ketika kebudayaan difahami sebagai wujud empirik dan rasional ajaran Tuhan. Manusia saleh atau kafir sekali pun, tidak boleh hidup tanpa kebudayaan. Ironinya, bagi yang saleh, kebudayaan dipandang sebagai penyebab kesengsaraan hidup di dunia dan sesudah kematian. Kebudayaan dipandang sebagai anti-tesis kesalehan.

Pengamalan ajaran Tuhan mustahil tanpa kebudayaan dan pemeluk Islam boleh mengetahui Kitab Suci al-Quran dan Sunnah Rasul hanya dengan kebudayaan. Hal ini mengandaikan kesalahfahaman pada kebudayaan, terhadap wahyu dan agama itu sendiri. Kurang disadari Tuhan hadir dengan wahyu-Nya melalui kebudayaan, hanya dengan kebudayaan pulalah manusia boleh memahami Tuhan dan ajaran-Nya. Dari sini penting secara jujur diakui bahwa “kebudayaan adalah jalan mencapai Tuhan”.

Masalahnya, apakah semua kebudayaan bisa diletakkan sebagai jalan mencapai Tuhan, ketika kebudayaan juga dapat menjadi “jalan syetan”. Oleh sebab itu perlu dibuat klasifikasi, pembedaan dan peta kebudayaan, kapan agama itu dari Tuhan dan kapan ia mewujud dalam kebudayaan. Strategi kebudayaan Islam hanya mungkin

disusun berdasarkan pemahaman bahwa ajaran Tuhan itu tidak pernah boleh disentuh manusia kecuali dalam wujud kebudayaan.

Walaupun sangat menyakitkan, namun krisis yang pernah, bahkan sampai sekarang dihadapi bangsa Indonesia, bisa menjadi titik tolak untuk menjadikan Indonesia pusat kajian perkembangan peradaban baru dunia. Peradaban di mana Kitab Suci sebagai sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosio kultural. Di sinilah pentingnya, dicari pola baru hubungan agama dan ilmu pengetahuan, teknologi atau kebudayaan. Jika hal ini dapat dilakukan, akan lahir paradigma baru peradaban negeri seribu pulau ini di tengah perkembangan dunia global.

Masalah di atas telah lama dirasakan oleh masyarakat Barat. Sayang penyelesaiannya parsial, dengan meletakkan agama dan ilmu pengetahuan secara bertentangan, tanpa hubungan berarti. Sekularisme memang membuat Barat mencapai kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa penting bagi kebudayaan. Namun, hanya menunda penyelesaian masalah yang muncul sejak masa renaissance. Ungkapan “kematian Tuhan” justru melahirkan istilah baru “kematian manusia” dalam kesemarakkan “spiritualisme baru”, ketika manusia bukan hanya hendak bebas dari doktrin keagamaan, juga dari segala sistem ilmu pengetahuan. Paradigma baru itu boleh disebut sebagai “jalan ketiga” yang menghidupkan kembali Tuhan sekaligus manusia. Jalan ketiga ini signifikan sebagai tonggak penegakkan hak azasi manusia, praksis demokrasi dan pembangunan yang berterusan bagi kesejahteraan kemanusiaan.

Runtuhnya Soviet telah melunturkan supremasi politik Marxsisme, sumber inspirasi komunisme atau sosialisme, tetapi tidak menjadikan teori konflik usang. Tidak pula meletakkan teori kapitalisme tanpa saingan. Peradaban dunia tetap berada pada alur dua rangka teori sosial ini. Gagasan “spiritualisme baru” dari postmodernisme belum “mendamaikan” pertentangan Sosialisme

atau Komunisme dan Marxisme di satu pihak dengan Kapitalisme di pihak lain dengan segala perkembangan pemikiran di kedua-dua belah pihak.

Pertentangan paradigmatis dan praksis sosial kedua pandangan di atas semakin peka ketika dimasukkan soal keagamaan. Berbagai konflik di negeri ini mengiringi krisis kebangsaan dan reformasi, dapat diletakkan dalam peta pertentangan keduanya. Dalam pertentangan teori sosial, yang dalam banyak hal juga melibatkan masalah keagamaan, menjadi penting untuk mengkaji semula hubungan agama dan kebudayaan.

Adakah agama itu kebudayaan, merupakan pertanyaan yang hingga kini belum pernah terjawab dengan tuntas. Para elite agama-agama besar dunia, terutama Kristian dan Islam, mendakwa bahwa agama yang mereka peluk datang dari Tuhan dan kerana itu menolak disebut kebudayaan. Sementara itu, para saintis nampak dengan kukuh mempertahankan teorinya tentang agama sebagai kebudayaan.

Pandangan saintis secara *de facto* hampir selalu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Hal ini nampak dari “teknologi kloning” yang menjadi perdebatan luas awal tahun 1990-an seiring penemuan spekulatif Stephen Hawking tentang asal-muasal dunia dan masa. Selain itu, konsep Darwin tentang asal-muasal manusia yang hingga kini tetap menjadi dasar falsafah ilmu biologi, belum bisa digugurkan elite agama. Walaupun, saintis pula yang selalu menjadi korban tuntutan-tuntutan kebenaran keagamaan. Kisah dramatik dapat dilihat dari apa yang dialami Socrates, Galile-Galileo, Al-Hallaj atau Seh Siti Jenar dalam kasus Indonesia yang harus tewas menghadapi kekerasan tuntutan elite agama yang memegang hegemoni politik.

Masalah ini menimbulkan berbagai tragedi kemanusiaan yang hingga kini belum pernah ditemui jalan penyelesaian yang

berarti. Masalah ini pula yang kini tengah kita saksikan sedang berlangsung di negeri ini sebagai suatu perubahan kehidupan yang sukar difahami. Dalam lingkup kenasionalan inilah ramalan akan munculnya benturan peradaban berpuncak dari masalah hubungan agama dan kebudayaan.

Memperhatikan mayoritas warga Indonesia memeluk Islam, menjadi penting melihat masalah tersebut sebagai masalah hubungan Islam sebagai agama dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selama ini, Islam nampak begitu sukar mengapresiasi kebudayaan, apalagi mengembangkan kebudayaan, kerana Islam yang dikhutbahkan dan dipelajari, adalah “Islam yang anti kebudayaan”. Kurang disadari bahwa sebenarnya Islam tidak boleh dipelajari, dikhutbahkan dan diamalkan melainkan dengan dan dari kebudayaan itu sendiri.

Masalah itu akan terjernihkan jika elite Muslim bersedia secara jujur membedakan antara Islam yang wahyu dan Islam sebagai kebudayaan. Jika masyarakat Muslim meyakini dalam iman bahwa Islam adalah ajaran dari wahyu Tuhan, harus secara jujur difahami bahwa bahasa Arablah yang digunakan mendokumentasikannya ke dalam suatu narasi perkataan dan menyampaikan wahyu itu oleh Tuhan sendiri kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad s.a.w. Keyakinan wahyu Tuhan itu memang mutlak dalam kebenaran dan keberlakuan, tidak perlu diganti. Namun harus disadari bahwa wahyu tekstual itu menjadi terbuka atas pemaknaan (tafsir) yang berbeda-beda mengikuti pengalaman hidup dalam konteks sejarah dan sosiologis ulama penafsirnya.

Oleh sebab itu, pembinaan keyakinan yang disusun dari teks wahyu dan juga teks sunnah Rasul, harus diletakkan dalam peta kebudayaan yang kebenarannya harus bersifat relatif kerana berdimensi sejarah dan sosiologis. Dalam hubungan itu menjadi terbuka untuk menyusun kembali tentang pokok-pokok keyakinan

iman dan ritual di dalam Islam yang boleh jadi sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini tentang Islam. Dari sinilah, Islam sebenarnya telah memasuki tahap kebudayaan, sehingga harus diletakkan dalam dimensi kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan dapat difahami sebagai bentuk atau pola tindakan yang mencerminkan proses dinamik penyadaran atas realitas. Jika pada puncak realitas itu, dipercayai Tuhan berada, maka kebudayaan adalah proses penyadaran tentang Tuhan itu sendiri. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan adalah media utama menyedari dan mencapai Tuhan. Melalui kebudayaan pula, Tuhan berhubungan dengan manusia ketika wahyu-Nya dituangkan dalam kebudayaan, yaitu bahasa. Oleh itu, kebudayaan adalah bentuk dan cara Tuhan berhubungan dengan manusia, juga merupakan wahyu itu sendiri.

Dari situ pula wahyu Tuhan boleh dibedakan dalam dua cara, yaitu al-Quran yang dibacakan lewat teks (bahasa Arab) dan alam yang diciptakan. Alam sebagai wahyu kauliyah dengan sunnatullah lebih asal dari al-Quran sebagai wahyu yang disampaikan melalui pembacaan dengan alat bahasa. Di sinilah mengapa al-Qur`an selain berkali-kali mengajarkan arti pentingnya mempelajari, dan membaca alam, juga menyatakan melalui pembacaan atas alam itu, manusia boleh mencapai kesadaran tentang Tuhan.

Jika budaya dalam bentuk seni merupakan ekspresi kesadaran paling jelas, maka seni adalah pintu paling penting bagi usaha menyedari realitas tertinggi yaitu Tuhan. Berbeda dengan ilmu sebagai bentuk kebudayaan rasional tertinggi yang mengandungi proses perwujudan dan pengasingan, kebudayaan realitas disadari dan dihubungi secara langsung. Dengan kebudayaan manusia menerobos segala batas untuk sampai dan berhubungan secara langsung kepada Tuhan. Dan, Tuhan sendiri pun berhubungan dengan manusia dengan kebudayaan tersebut. Dari sini, kebudayaan

harus diletakkan dalam fungsinya sebagai bentuk menjelajah batas-batas realitas, sehingga Tuhan dan manusia terhubung, dan manusia boleh mendekati Tuhan penciptanya.

Sayangnya, justru kebudayaan yang paling sukar difahami dan dimengerti pemeluk Islam (juga agama lain) sebagai tahap lanjut agamanya. Masyarakat Islam, dari um um hingga elite, secara konsisten menyatakan kebudayaan sebagai anti-tesis dan lawan Islam, hingga amalan Islam cenderung anti kebudayaan. Sementara, tidak ada pengamalan Islam yang boleh dilakukan tanpa kebudayaan. Al-Quran yang dibaca dan disikapi penuh hormat, kadang didahului berwuduk dan dibawa di atas kepala itu adalah kebudayaan. Hampir tidak ada ajaran Islam yang difahami, dipelajari, dikhutbahkan dan diamalkan pemeluk Islam yang bukan kebudayaan.

Pandangan di atas semestinya dan harus menjadi dasar dalam berbagai aktivitas dakwah, sebagai wujud kepedulian pada nilai kemanusiaan. Dan dengan demikian dialog agama dan kebudayaan atau ilmu pengetahuan menjadi mungkin. Hal ini akan membuka peluang bagi perundingan sosio kultural di antara pemeluk agama berbeda, dan perumusan kembali ajaran agama yang lebih memihak penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan.

Kritik pada pengamalan keagamaan bukanlah sebuah penodaan pada kesucian Tuhan dan ajaran-Nya. Demikian pula, kritik pada elite agama sebagai pemimpin; partai atau negara (presiden) boleh ditempatkan sebagai sebahagian dinamika sosial-budaya, bukan sebagai kritikan terhadap kebenaran agama. Dari sini, penegakkan demokrasi dan hak-hak azasi manusia boleh mendapatkan penguatan dalam kesalehan, bahkan kesalehan itu sendiri menjadi sebuah amalan penegakkan hak azasi manusia dan demokrasi.

Kegiatan dakwah harus dikembangkan sebagai proses sosial di mana konsensus menjadi media penguatan ajaran agama sesuai tahap kebudayaan dan kepentingan sosial umat pemeluk di dalam

masyarakat luas dengan beragam agama, fahaman agama dan politik. Sayangnya, doktrin “kembali pada al-Quran dan Sunnah” difahami sebagai anti bid’ah, diterjemahkan dengan penghancuran semua tradisi yang hidup di masyarakat hanya kerana tidak dijumpai dalam tradisi kenabian Muhammad S.A.W. Gerakan Islam yang ingin konsisten melalui jargon pemurnian, kemudian berkembang menjadi gerakan “anti tradisi rakyat” yang selama ini dapat menjadi menjadi roh kehidupan mayoritas pemeluk Islam.

Ke masa depan, gerakan dakwah semestinya dapat memainkan peranan sejarahnya yang terbebas dari perangkap anti kebudayaan dan tradisi rakyat, tetapi mencerahi dan mengubahnya. Strategi kebudayaan paling signifikan jika gerakan dakwah secara dinamis dan dialektis mengembangkan tradisi dan kebudayaan sebagai proses bertahap penterjemahan wahyu al-Quran dan Sunnah Rasul. Misi utamanya ialah memaknai dan membudayakan ajaran Islam, sehingga benar-benar berfungsi pragmatis dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan, kemiskinan dan penderitaan, penindasan, perbidakan, korupsi, dan lain sebagainya yang sangat kompleks.

Dari situlah kebudayaan Islam menjadi proses transendensi menerobos segala batas sistem-sistem, kelas, etnik, dan batas natural. Di sini pula letak al-Quran sebagai hudan dan *furqan linnaas* serta *bayyinah min al-huda* yang dengannya manusia tumbuh menjadi berperikemanusiaan, peduli membela yang tertindas. Islam bukan sekadar ritual yang sibuk memuja Tuhan, tapi agama yang benar-benar mampu membebaskan manusia dari segala penderitaan dan dari segala macam “berhala”. Kebudayaan adalah kretativitas manusia menemui *syirath al-mustaqim* untuk mencapai suatu titik dimana Tuhan bersemayam sebagai sebuah aksi makrifat.❀

BAB VI

DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6.1. Apa Itu Pemberdayaan?

Pemberdayaan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek pembangunan atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat justru mematikan kreatifitas masyarakat, bahkan menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan.

Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya - *self help* - masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan partisipatif adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Antara dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki keterkaitan yang cukup signifikan bahkan secara terperinci dapat juga dikatakan bahwa dakwah sebenarnya adalah proses pemberdayaan masyarakat.

Dakwah sebagaimana yang telah dibahas secara detail pada bagian sebelumnya merupakan sebuah proses berkesinambungan dan bermakna perubahan sebagai prinsip dasar equilibrium dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara alamiah terdiri dari pengklasifikasian kelas atas dan kelas bawah. Kelas bawah sebagai masyarakat yang mengalami kehidupan terasing mejadi sasaran utama dakwah untuk memberdayakannya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan tidak menafikan masyarakat yang berada pada kelas atas. Karena itulah, dakwah sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat sebab ia berhubungan dengan proses di mana seseorang bisa terbebaskan untuk berpikir dan bertindak atas dasar kematangan berpikir dan sanggup melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain yang dalam istilah Kant disebut sebagai pencerahan, dan juga proses mengangkat derajat serta menyelamatkan masyarakat yang kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya.

Penerjemahan makna dakwah sebagai sebuah pemberdayaan tidak terlepas dari tiga dimensi dakwah yaitu makro, mezo, dan mikro. Tingkatan makro berupa hidayah yang muatannya masih orisinil berupa Al-Quran dan Sunnah. Tingkatan mezo merupakan integral tingkatan makro sebagai hasil penelaahan secara seksama dari apa yang terkandung dalam alqur'an dan sunnah berupa metodologi yaitu konsep, teori, dan kebijakan-kebijakan. Sedangkan tingkatan mikro berupa tindakan, aktivitas, program kegiatan, dan lain sebagainya yang berupa kerja nyata.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penginstalan fungsi sosial dalam diri masyarakat agar masyarakat ataupun anggota kelompoknya dapat kembali berfungsi. Menurut Robinson (1994) pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; sebuah pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang

berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan sebuah standar kehidupan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud tidak dilihat pada batas-batas minimum berupa kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Akan tetapi kebutuhan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan akan eksistensinya, dan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa ciri masyarakat yang berdaya antara lain mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, miliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan bertanggungjawab atas tindakannya. Berikut skema dakwah dan pemberdayaan dalam sebuah proses pada manusia sebagai anggota masyarakat yang mewujudkan masyarakat berdaya.



Gambar di atas menjelaskan bagaimana kinerja pemberdayaan bersinergi dengan dakwah sebagai satu kesatuan yang paralel mentransformasikan nilai terhadap masyarakat yang telah memiliki *local wisdom* baik dari sistem nilai maupun lembaga sosial lain. dakwah dengan proses akulturasi dan enkulturasi dikukuhkan dengan program kegiatan pemberdayaan sebagai tindakan sosial dakwah melalui proses yang cukup besar perlahan tapi pasti menghasilkan masyarakat berdaya dilandasi dengan nilai kebersamaan sebagai masyarakat madani.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memperlakukan manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang, adaptif, dan semakin lama semakin meningkat kualitasnya. Asumsi ini didasarkan pada pemaknaan bahwa; pertama, masyarakat merupakan subjek yang dapat berpikir dan bertingkah laku secara rasional. Kedua, pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat adalah hasil dari suatu proses belajar terus menerus atau berkesinambungan. Ketiga, proses belajar dan perilaku tersebut terjadi dalam interaksi sosial. keempat, masyarakat dapat mengambil keputusan dan memberikan arah atas perilakunya sendiri dan kelima, masyarakat mampu menciptakan dan mempengaruhi lingkungannya. Berangkat dari asumsi ini, maka prinsip pemberdayaan ialah:

- a. Pemutusan mata rantai ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah ajang pemberian dari pihak yang

miliki modal kepada yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman pemberdayaan merupakan proses memberi akan mewujudkan semacam ketergantungan untuk menanti dan mental peminta. Pemberdayaan harus dimakanai sebagai upaya memungsikan fungsi sosial manusia secara individu dan kelompok dalam masyarakat. Sehingga ia dapat memahami potensi apa yang ia miliki untuk dijadikan sebagai basis usaha terus- menerus tanpa harus bergantung dengan orang lain sehingga ia dapat menjadi manusia seutuhnya. Sederhananya, prinsip pemberdayaan ialah memanusiakan manusia.

- b. Proses pembelajaran berkesinambungan. Pemberdaayaan dengan meminjam istilah Soedjatmoko (dalam Halim, 2005) merupakan *sosial learning* yang melibatkan unsur kolektif berupa keluarga dan lingkungan secara terus-menerus sehingga muncul wujud kemandirian dalam diri masyarakat. Prinsip ini melibatkan mekanisme pendampingan mental dalam upaya mewujudkan insan kamil sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Pengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat sebenarnya telah memiliki separangkat nilai dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraannya. Karena itu, pemberdayaan menstimuli masyarakat agar dapat aktif berpartisipasi membebaskan ketertinggalan mereka. Mereka dapat mengetahui dan merumuskan apa yang sangat dibutuhkan dan apa pula yang menjadi biang persoalan penghambat kemajuan mereka. Dalam hal ini, masyarakat dengan bebas memiliki peluang untuk memberikan pendapat dan menentukan keputusan demi kesejahteraan mereka. Memiliki hak untuk menolak dan juga menciptakan lingkungan dimana mereka berada serta mampu bekerja sama secara kolektif untuk membina dan memperbaiki apa yang mesti diperbaiki.

United Nations (1956), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) *Getting to know the local community*
Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- b) *Gathering knowledge about the local community*
Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- c) *Identifying the local leaders*
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d) *Stimulating the community to realize that it has problems*
Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e) *Helping people to discuss their problem*
Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

- f) *Helping people to identify their most pressing problems*
Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- g) *Fostering self-confidence*
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h) *Deciding on a program action*
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i) *Recognition of strengths and resources*
Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j) *Helping people to continue to work on solving their problems*
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- k) *Increasing people's ability for self-help*
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

6.2. Dakwah Komunitas; Pemberdayaan Umat Dalam Perspektif

Isu pemberdayaan masyarakat pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan international. Kesimpulannya mempersoalkan: sikap apatis masyarakat terhadap gerakan pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa usaha pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif. Faktor utama penyebab permasalahan itu adalah rendahnya sumberdaya manusia (SDM). Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi dakwah partisipatif perlu mendapat perhatian. Oleh karena dakwah memegang peranan kunci dalam mencetak

manusia berkualitas, baik kualitas spritual maupun kualitas material. Tentunya makna dakwah bukan lagi sekedar penyampaian pesan agama, tetapi dakwah dalam makna hakiki, yaitu dakwa emansipatoris-partisipatif.

Kegiatan dakwah merupakan bentuk gerakan keagamaan yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, dan sistem pemerintahan tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa adanya peran serta pemantapan perilaku keagamaan warga bangsa. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis moral atau akhlak. Terpuruknya perekonomian negara ditambah semakin merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara langsung membuat masyarakat menjadi tidak berdaya. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat, pengangguran nyata sudah mencapai 40 juta, keluarga jalanan dan anak jalanan menjadi masalah sosial yang menonjol di perkotaan, anak-anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan makin bertambah, masalah kriminalitas yang makin meningkat, ditambah dengan masalah sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak berdaya memenuhi kebutuhan pokoknya. Upaya pemerintah memberikan bantuan darurat dalam bentuk materi, baik melalui program ekonomi kerakyatan ternyata belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tentu saja masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan bantuan semacam ini. Akan tetapi, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan yang seharusnya menjadi porsi dan hak masyarakat lapisan bawah justru sebaliknya dinikmati mereka yang tidak berhak.

Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya *top-down intervention* yang tidak menjunjung tinggi

aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda, dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri. Masalah timbul akibat rendahnya tingkat kesadaran. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian terhadap pentingnya pendekatan nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan bangsa dan negara. *Core idea* dari implementasi otonomi masyarakat adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Inti permasalahannya adalah apakah masyarakat sudah siap melaksanakan pembangunan sesuai tuntutan? Kalau belum siap usaha-usaha apa yang perlu dilakukan untuk memberdayakan mereka sebagai insan pembangunan? Dan bagaimana peranan agama dalam melahirkan sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas yang siap melaksanakan pembangunan? Memaknai topik tulisan dan permasalahan di atas, masalah yang menjadi bahan kajian difokuskan pada urgensi pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, aktualisasi dakwah yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan mengkaji teknik atau pola partisipasi masyarakat yang *applicable* di dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama yang menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat.

6.3. Aktualisasi Dakwah Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat (*Community Development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja “*doing for the community*”, tetapi mengadopsi metode kerja “*doing with the community*”. Metode kerja *doing for*, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - *real needs, felt needs* dan *expected need*. Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar konsep “pemberdayaan masyarakat” yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.

Dakwah adalah proses aktualisasi dan realisasi salah satu fungsi kodrati manusia, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian agar masyarakat mengetahui, memahami dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dengan ungkapan lain, hakekat dakwah ialah suatu upaya untuk mrubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolok ukur ajaran Islam.

Terdapat beberapa terminologi yang harus difahami untuk mengerti berbagai persoalan dakwah dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang ideal, yaitu (a) proses pengkondisian, (b) perubahan yang menumbuhkan kesadaran internal, dan (c) pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan (Mulkhan, 1995). Inilah tiga istilah kunci dalam memahami dan menganalisis dinamika dakwah.

Dakwah merupakan proses perubahan sosial, yaitu proses perubahan terhadap pemahaman (pengetahuan), sikap dan tindakan individu menuju arah yang lebih baik dan sempurna. Oleh karena dakwah merupakan sebuah proses perubahan sosial, maka dakwah tidak boleh hanya dipahami sebagai “dialog lisan”, tetapi juga perlu upaya konkrit yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, “dialog amal”. Dakwah yang betul-betul berhasil membangun kehidupan masyarakat.

Membangun masyarakat dari wacana berpikir yang statis tradisional menjadi dinamis rasional adalah syarat mutlak dalam proses dakwah. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pembangunan masyarakat (*community development*) itu memerlukan “dakwah komunitas”. Bentuknya bervariasi, mulai kegiatan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, penyuluhan kesejahteraan keluarga, demokrasi, dan lain-lain. Pada umumnya segala kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu usaha dakwah yang bertujuan untuk menciptakan perbaikan “kualitas hidup” masyarakat. Inilah sesungguhnya tujuan azazi tugas kerasulan Nabi Muhammad, yaitu sebagai inisiator dan kreator yang bersama-sama sahabat bertugas mensejahterakan ummat manusia. Dia berupaya menjadikan umat manusia bebas dari ketertindasan, berwawasan luas, berfikiran cerdas, sehingga tugas-tugas kekhalifahan manusia di muka bumi betul-betul berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan. Kehadiran

manusia bukan mendatangkan bencana dan mendatangkan masalah, akan tetapi menjadi rahmat bagi sesama dan lingkungannya (Q.S. 21:107).

Kata kunci dari tujuan aktivitas dakwah adalah adanya perubahan perilaku - *behavior* -. Komponen-komponen perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh masyarakat (*knowledge*), apa yang dapat mereka lakukan (*skills*), apa yang mereka pikirkan (*attitudes*) dan secara nyata apa yang mereka kerjakan (*action*).

Secara sederhana, perilaku terdiri dari 3 domain atau kawasan yaitu domain perilaku pengetahuan - *knowing behavior* -, domain perilaku sikap -*feeling behavior*- dan domain perilaku keterampilan -*doing behavior*-. Apabila lebih disederhanakan maka, perilaku terdiri dari 2 unsur yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan Intelektual -KI- (masyarakat Barat yang rasional dan individualistis) cenderung mendengarkan “Kata Kepala” sedangkan Kecerdasan Emosional - KE -, termasuk budi pekerti (masyarakat Timur yang masih terikat pada tradisi) mendengarkan “Kata Hati”. Hasil penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam berprestasi ditentukan oleh hanya 20 persen dari KI-nya, sedangkan 80 persen oleh faktor lain, terutama KE-nya.

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa.

Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu *Right of Self-Determination* dan *Right for Equal Opportunity*. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Karenanya pola pemberdayaan masyarakat apapun yang kita pilih, maka pola tersebut harus bebas dari perlakuan-perlakuan diskriminasi, prejudice, dan subjektif terhadap masyarakat. Dengan begitu, metode dakwah konvensional yang diskriminatif, menghujat, menyalahkan dan sebagainya adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Apalagi jika dakwah hanya dilakukan dengan pola tabligh semata, tanpa berusaha menyelami, memahami persoalan umat, yang lalu dengan ini bersama masyarakat melakukan upaya-upaya pemecahannya. Pendapat ini sesuai dengan *core idea* dari pembangunan/pemberdayaan masyarakat yang berbunyi: “*Accept the community as they are*” and “*Begin the community development work, where the community is*” (Burton E. Swanson 1988: 25). Terimalah perlakukan masyarakat sebagaimana mereka adanya tanpa membandingkan dengan masyarakat lain, dan mulailah kegiatan pembangunan masyarakat dimana masyarakat berada. Artinya rencana pembangunan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dan kebutuhan mana yang menjadi prioritas dipenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

6.4. Pola Dakwah Pemberdayaan

Pengalaman menunjukkan bahwa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang berkembang subur di Indonesia bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dengan kualifikasi mutu sumber daya manusia rendah, sedangkan Jepang memiliki sumber daya alam yang kurang serta tantangan alam yang berat dengan mutu sumber daya manusia

yang tinggi. Ternyata Jepang sudah tergolong negara industri maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia.

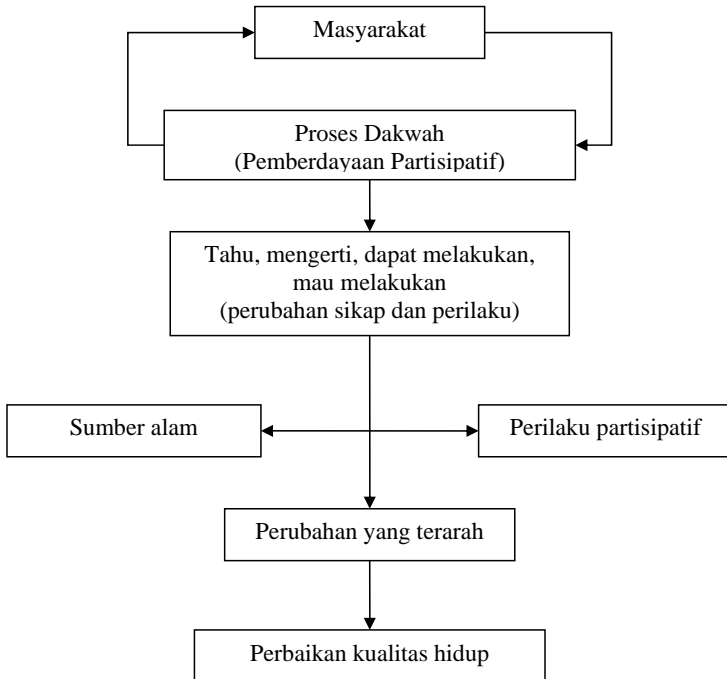
Sumber daya manusia yang berkualitas cenderung memiliki perilaku yang baik yaitu di dalam penguasaan ilmu dan teknologi, sikap, moral, budi pekerti, dan keterampilan yang handal untuk melaksanakan pembangunan. Tetapi yang amat penting adalah adanya pengakuan akan pentingnya peranan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menempatkannya menjadi prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan baik pada level nasional maupun regional. Sementara secara umum diketahui, bahwa dakwah bertujuan mengubah perilaku manusia dan merupakan rangkaian kegiatan perubahan berencana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu masyarakat yang mandiri.

Era globalisasi mengharuskan untuk selalu berperilaku efisien, memiliki daya saing yang tinggi, dan profesional. Batas wilayah menjadi semakin semu. Pertimbangan perbandingan (*comparative advantage*) dikombinasikan dengan pertimbangan keuntungan (*competitive advantage*) (Rian Nugroho D: XVIII). Kegiatan yang lebih menguntungkan, lebih banyak memberikan manfaat yang akan menjadi pilihan. Sedangkan upaya untuk menanggulangi adalah mempersiapkan masyarakat agar lebih berdaya, mau bekerja keras, menguasai ilmu dan teknologi, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan. Bagi masyarakat yang telah berdaya dan partisipatif, peran Pemerintah sebagai pengawal, pendamping, dan fasilitator. Pada masyarakat yang belum mampu memahami hakikat pembangunan, maka campur tangan yang bijaksana perlu dilakukan. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk

bekerja sama. Karena itu, pemerintah melalui aparatnya yang semakin profesional dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki daerah baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

Dalam kaitan ini, apa peranan dakwah dalam proses pemberdayaan masyarakat? Dapatkah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tanpa nilai-nilai keagamaan? Jika dapat bagaimana hasilnya? Secara sederhana, jawaban pertanyaan di atas dapat dijelaskan pada bagan berikut.



Melalui dakwah, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan motivasi yang yang dibingkai dengan nilai-nilai keagamaan (Islam), sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan

dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup, insan kamil. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat lebih aktif dan kreatif melaksanakan sebagai aktivitas yang terarah dan berencana terutama dalam meningkatkan pendapatan *-income generating-* serta membuka lapangan kerja baru *-employment generating-* untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Syarat-syarat yang harus diperhatikan agar masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan adalah:

“People will not participate in community development program unless they are getting what they want. Accordingly, the first duty of those responsible for community development programs to identify the felt needs of the people. They should also assist the people in making better judgments for themselves on what their needs are and how to satisfy them. Finally they should be able to identify needs not yet perceived and make the people conscious of them and aware of the importance of satisfying them.” (United Nations 1978)

Masyarakat tidak akan tegerak dan berpartisipasi di dalam program pembangunan, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Ross (1987) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- (1) *The “single function” approach in which programmes or techniques are implanted by external agents - “a new school, a medical program,*

or a housing project, which the external agent (or the organization he presents) thinks will benefit the community.

- (2) The “multiple” approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety of services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.
- (3) The “inner resources approach”. “Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to work co-operatively with governmental and other agencies at satisfying them.

Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *The single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat.

Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

Demikian juga dengan pola pendekatan *the multiple approach*, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat ialah *the inner resources approach*. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Krisis multidimensi yang sangat berat yang dihadapi Indonesia sekarang, umumnya bermuara kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, memiliki implikasi terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama kemampuan berdemokrasi dan melaksanakan reformasi. Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi dakwah perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu sudah sangat mendesak untuk dilakukannya reformulasi pola dakwah yang sekarang masih dipraktekkan. Karena dakwah memegang peranan kunci dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang berorientasi ketuhanan, dan hanya melalui tangan-tangan da'i yang berkualitas dan bertanggungjawab serta komit terhadap pembinaan umat yang akan mampu membantu umat untuk keluar dari persoalan kemerosotan akhlak.

Masyarakat yang berdaya, adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi di dalam membangun diri mereka. Tidak menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Mereka mampu berkompetisi dalam konteks kerjasama dengan pihak lain. Mereka memiliki pola pikir kosmopolitan, memiliki wawasan berfikir yang luas, cepat mengadopsi inovasi, toleransi tinggi, dan menghindari konflik sosial. Hal ini dapat terwujud berkat aktualisasi dakwah yang telah membekali mereka dengan perilaku/behavior yang baik, berakhlak, disamping berpengetahuan yang luas.

Pelaksanaan kegiatan dakwah semestinya merupakan upaya pemberdayaan, dimana masyarakat diharapkan dapat dan mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk mencapai taraf ini, perlu dilaksanakan “dakwah komunitas” secara berkesinambungan. Dengan demikian, implementasi keberdayaan masyarakat merupakan suatu janji sekaligus tantangan. Ia menjanjikan masyarakat madani yang bebas, bekerja sama, mampu memerintah diri sendiri, religius,

berkeadilan sosial, partisipatif dalam pembangunan, memiliki hak *equal opportunity* untuk berkarya dan berkembang. Berbagai aktivitas dakwah, dengan begitu juga merupakan tantangan, karena keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan dakwah bertumpu pada pundak pelaksana dakwah (da'i). Namun demikian, aktivitas dakwah tidak boleh berhenti apabila banyak kesulitan yang dihadapi pada fase permulaan. Pepatah klasik mengatakan *All the beginning is difficult.* ❁

BAB VI

PENUTUP

Sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, baik antara manusia dengan kelompok-kelompoknya maupun dengan lingkungannya yang termasuk di dalamnya struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Sementara dakwah adalah suatu tindakan sosial sebagai upaya pentransformasian nilai ketuhanan kepada masyarakat sebagai objek kajian dalam ilmu sosiologi. Karenanya sosiologi dakwah merupakan merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis dakwah dengan menggunakan perspektif ilmu sosiologi. Dakwah sejatinya harus diterjemahkan ke dalam dua aspek penting yakni sebagai tindakan sosial dan sebagai fakta sosial. Tindakan sosial dimaksudkan bahwa dakwah merupakan upaya yang ditujukan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan umat bukan untuk kepentingan individual sedangkan dakwah sebagai fakta sosial dimaknai bahwa dakwah merupakan tindakan terarah yang memperhatikan nilai serta norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kebudayaan natural dalam masyarakat.

Dalam prosesnya mentransformasiakan nilai ketuhanan akan menyelinap segenap aksi dan reaksi yang menimbulkan berbagai dinamika dalam proses sosial masyarakat. karenanya dakwah

sebagai sebuah interaksi dan mobilisasi sosial menjadi jawaban atas perjalanan panjang dakwah yang seharusnya diimani oleh semua manusia sebagai esensi awal keberadaannya di dunia. Sosiologi dakwah menekankan bahwa dakwah mesti tertata dan terstruktur dengan baik dan rapi layaknya sebagai sebuah sistem yang memasuki semua arena panggung sosial baik dalam tingkatan mikro berupa interaksi dan hubungan antar individual, tingkatan mezo berupa hubungan antar kelompok masyarakat dan tingkatan makro pada tatanan struktural masyarakat sehingga dakwah bisa dapat dilihat dan difahami dengan baik sebagai tindakan universal atau rahmatallil'alamin.❀

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (pnyt). 1983. *Agama dan perubahan sosial*. Jakarta: Rajawali
- Abdullah, Taufik (pnyt.). 1987a. *Sejarah dan masyarakat, lintasan historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, Taufik. 1987b. *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Adam, Doug Mc & Snow, David A. 1997. *Social movements: readings on their emergence, mobilization, and dynamics*. California: Roxbury Publishing Company.
- Ad-Dismasyqi, Ibnu Katsir. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Akhyar, Thawil. 1994. *The sufision verses (ayat-ayat sufi)*. Semarang: CV. Cahaya Indah.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta. Amzah
- Amir M. S. 1987. *Tonggak tuo budaya Minang*. Jakarta: CV. Karya Indah.
- Amir M.S. 2001. *Adat Minangkabau, pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

- Armstrong, Karen. 2001. *Berperang demi Tuhan, fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Terj. Bandung: Mizan.
- Aziz, Muhammad Ali. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Aziz, Mohammad Ali (Ed.). 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.
- Azra, Azyumardi. 1992. *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Pergolakan politik Islam, dari fundamentalisme, modernisme dan post modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Renaissans Islam Asia Tenggara, sejarah wacana dan kekuasaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Surau, pendidikan Islam tradisional dalam transisi dan modernisasi*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuk*. Yogyakarta: Galang Press.
- Basayev, Abu Syamil. 2003. *Urgensi Dakwah di Parlemen & Pemerintahan*. Jakarta. Team Tazkia production press.
- Berger, Peter L. 1980. *Invitation to sociology: a humanistic perspective*. New York: Pinguin Books.
- Berger, Peter L. 1985. *Sosiologi ditafsirkan kembali, esai tentang metode dan bidang kerja*. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L. 1990. *Tafsir sosial atas kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit suci: agama sebagai realitas sosial*. Jakarta: LP3ES.

- Bruinessen, Martin van, & Wajidi, Farid. 2006. Syu'un ijtima'iyah and the kiai rakyat: traditionalist Islam, civil society and social concerns. Dlm. Henk Schulte Nordholt (pnyt.). *Indoensian transitions*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Bruinessen, Martin van. 1992. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: survei historis, geografis, dan sosiologis*. Bandung: Mizan.
- Budiman, Hikmat. 1997. *Pembunuhan Yang Selalu Gagal: Modernitas dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Buechler, Steven M. & Cylke, F. Kurt (Pnyt.). 1997. *Social movements: perspectives and issues*. California: Mayfield Publishing Company.
- Burke, E. & Lapidus, I.M., et. al. 1988. *Islam, politics, and social movements*. California: California University Press.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh teori sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cunningham, David. 2003. State versus social movement: FBI counterintelligence against the New Left. Dalam Goldstone, J.A (pnyt.). *States, parties and social movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cuzzort & King. 1987. *Kekuasaan, birokrasi, harta dan agama di mata Max Weber dan Emile Durkheim*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dahama, O.P, dan O.P. Bhatnagar. 1980. *Educational and Communication For Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, Co.
- Daya, Burhanuddin. 1990. *Gerakan pembaharuan pemikiran Islam*. Yogyakarta; PT. Tiara Wacana.
- Davis, Kinsley. 1965. *Human society*. New York: The MacMillan Company.

- Dhavamony, Mariasusai. 2002. *Fenomenologi agama*. Terj. A. Sudiarja. Cet. ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Diani, Mario. 2000. The Concept of Social Movement. Dalam Nash, Kate. *Reading in contemporary political sociology*. Blackwell. Oxford, hlm 154-176.
- Dunham, Athur. December 1956. *Outlook for Community Development Review*.
- Einsiedel, Luz, A, 1968. *Success and Failure of some Community Development in Batanggas*, A Community Development Research Council Publication, University of the Philippines.
- Eisenstadt, S. N (pnyt.). 1968. Max Weber on charisma and institution building. *The building*. Chicago: The University of Chicago.
- Engineer, Asghar Ali. 1990. *Islam and liberation theology*. New Delhi: SPPL.
- Enskilopedia Islam. 1992. Jakarta: Djambatan.
- Fakih, Mansoer. 1997. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, Eep Syaifullah. 1994. Unjuk rasa, gerakan masa dan demokratisasi: potret pergeseran politik Orde Baru. *Prisma*. No. 4 Tahun XXIII. Jakarta: LP3ES
- Foreman, Anne. 1997. *Femininity as alienation: women and the family in marxism and psychoanalysis*. London: Pluto Press.
- Geertz, Clifford. 1966. Religion as a cultural system. Dalam *antropological approaches to the study of religion*. No. 3. London.
- Geertz, Clifford. 1968. *Islam observed: religious movement in Morocco and Indonesia*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Geertz, Clifford. 1976. *The religions of Java*. Chicago, Ill.: University of Chicago.
- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Glaser, Barney G. & Strauss, Anlslem L. 1974. *The discovery of graounded theory*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Goldstone, J.A, 2003. Brdging institutionalized and noninstitutionalized politics. Dlm. Goldstone, J.A (pnyt.). *States, parties and social movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas
- Hardiman, Francisco Budi. 1990. *Kritik ideologi, pertautan pengetahuan dan kepentingan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2000. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, masyarakat, Politik & Posmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- Hardy, Salahuddin. 2005. *Dakwah Bil-Hal dan Sistem Ekonomi Islam*. (dalam Aziz, Moh. Ali. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Hill, F. F., 1982. *Education in the Developpng Countries* International Development Review, 4, No.4.
- Hoeve, Ichtiar van. 2005. *Ensiklopedi Islami*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Horton, Paul B., Hunt, Chester L. 1991. *Sosiologi*. Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Edisi keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ilyas Yunus Ba & Ahmad, Farid. 1985. *Sosiologi Islam dan masyarakat kontemporer*. Terj. Hamid Basyaib. Bandung: Penerbit Mizan.

- Ishii, Yoneo. 1993. *Sejarah sangha thai, hubungan buddhisme dengan negara dan masyarakat*. Terj. Mohamed Yusoff Ismail. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Jonhson, Paul D. 1986. *Teori sosiologi klasik dan modern*. Jakarta: Gramedia.
- Johnston, Hank & Klandermans, Bert (pnyt.). 1995. *Social movements and culture*. Vol. ke-4. Minneapolis: University of Minnesita Press.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamanto Sunarto. 1993. *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar antropologi*. Cetakan kedua. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa pokok antropologi sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1991. "Kepemimpinan dan kuasa; tradisional, masa kini, resmi dan tak resmi", dalam M Budiardjo (pnyt.), *Aneka pemikiran tentang kuasa dan wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Larana, Enrique., Johnson, Hank., & Gusfield, Joseph R. 1994. *New social movements: from ideology to identity*. Philadelphia: Temple University Press.
- Lofland, John. 1996. *Social movements organisations: guide to research on insurgent realities*. New York: Aldine de Gruyter.
- Luthfi, Atabik. 2011. *Tafsir Da'awi, Tadabbur Ayat-Ayat Dakwah Untuk Para Da'i*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Madjid, Nurcholish. 1989. *Islam: kemodernan dan keindonesiaan*. Bandung: Penerbit Mizan.

- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam agama peradaban: membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mannheim, Karl. 1991. *Ideologi dan utopia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mc Carthy, Thomas. 2011. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Bantul: Kreasi Wacana
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan berbeda, sudut pandang baru tentang relasi gender*. Bandung: Mizan
- Moore, Henrietta L. 1998. *Feminisme & antropologi*. Jakarta: Obor.
- Muliono & Welhendri Azwar. 2013. *Pengemis dan Disfungsi Sistem Sosial Kultural Dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: IAIN Press.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1995, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, Yogyakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir: kamus bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Nasr, Sayyed Husein. 1981. *Islam dalam cita dan fakta*. Terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid. Jakarta: LAPPENAS.
- Nasrullah & Dkk (ed.). 2001. *Geliat Dakwah di Era baru, Kumpulan Wawancara Dakwah*. Jakarta: Izzah Press.
- Neisbitt, John. 1990. *Mega trend 2000*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan modern Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Noor, Fariz A. 2006. *Islam progresif: peluang, tantangan, dan masa depannya di Asia Tenggara*. Yogyakarta: SAMHA.

- Nugroho, Riant D, 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Nurbakhsy, Javad. 1998. *Psikologi Sufi*. Terj. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- O’dea, Thomas F. 1996. *Sosiologi agama: suatu pengenalan awal*. Cet. ke-7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Patria, Nezar & Arief, Andi. 1999. *Antonio Gramsci, negara dan hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peursen, C. A. van. 2001. *Strategi kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Purwoko, Dwi., Sobary, Mohamad. 1998. *Agama dan perubahan sosial: dimensi sosial budaya kehidupan komunitas keagamaan di perguruan tinggi*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Quthb, Sayyid. 2009. *Petunjuk Jalan*. Jakarta: Gema Insani.
- Ritzer, George. 1992. *Sociology, a multiple paradigm science*. Terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali Press.
- Ritzer, George. 1996. *Sociological theory*. New York-USA: The McGraw-HillCompanies Inc.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2005. *Teori sosiologi modern*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.
- Robertson, Roland (pnyt.). 1995. *Agama: dalam analisa dan interpretasi sosiologis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosada & Dkk (Gamais ITB). 2007. *Risalah Manajemen Dakwah Kampus*. Bandung: Gamais Press.
- Ross, Murray, 1987. *Community Organization*. New York: Harper and Brother.

- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro sosiologi, sebuah pendekatan terhadap realitas sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scharf, Betty R. 1995. *Kajian sosiologi agama*. Terj. Drs. Machnun Husein. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Schroeder, Ralp. 1992. *Max Weber and the sociology of culture*. Newbury Park-California: Sage Publications.
- Scmitt, Richart. 1987. *Introduction to Marx and Engels*. Boulder USA: Westview Press.
- Smelser, Neil J. (pnyt.). 1973. *Karl Marx on sociology and social change*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sobari, Mohamad, 1998, *Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi*, Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- Sodiqin, Ali. 2008. *Antropologi Alqur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Prsada.
- Suaedy, Ahmad. 2005. An artist-activist from a mock political party in Tasikmalaya. Dlm. Margaret Kartomi (pnyt.). *The year voting frequently: politics and artists in Indonesia's 2004 elections*. Annual Indonesia Lecture Series 27. Melbourne: Monash University Press.
- Sulthon, Muhammad. 2003. *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontenporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syukur, Amin. 2004. *Tasawuf sosial*. Cet. ke-1. Yugyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Ggroup, Cetakan ke-3.
- Turner, Bryan S. 1983. *Religion and social theory: a materialist perspective*, London: Heinemann.
- Turner, Bryan S. 1991. *Religion and social theory*. London: Sage Publications Ltd.
- Usman, Sunyoto. 1996. *Dakwah dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam Universitas Muhammadiyah.
- Veeger, K. J. 1990. *Realitas sosial: refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Vitayala, Aida., Sjafrri Hubeis et all. 1994. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset

Tentang Penulis



WELHENDRI AZWAR, lahir di Jorong Guguak Koto Aua Kec. Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober 1970, adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Masyarakat pada tahun 1994 di kampus yang sekarang dijadikan tempat pengabdian, mencurahkan ilmu dan pengalaman yang dipunya kepada civitas akademika. Pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan S-2 pada Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2013.

Karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik* (buku); *Status Perempuan dalam Lingkaran Budaya Minangkabau* (jurnal); *Pengembangan Masyarakat: pendekatan dakwah partisipatoris* (jurnal); dan, *Perkawinan Matrilineal-matrilokal Minangkabau* (jurnal). Sementara karya tulis yang dituangkan dalam bentuk makalah, diantaranya; *Studi Gender: antara cita dan fakta*, disampaikan pada Pelatihan Penelitian Berwawasan Gender; *Perempuan dalam Kerangkeng*

Tradisi, disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Kesetaraan dan Keadilan Gender; *Perempuan dalam Perspektif Penelitian*, disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Berwawasan Gender; *Teori Sosial dalam Penelitian Keagamaan*, disampaikan pada DIKLAT Dasar-dasar Penelitian Dosen/WI UIN, IAIN dan STAIN se-Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi; *Kepemimpinan dan Organisasi*, disampaikan pada Latihan Kepemimpinan Pemuda Sumatera Barat; *Aktualisasi Peran: pendekatan pembinaan generasi muda*, disampaikan pada Rapat Koordinasi Kepemudaan Provinsi Sumatera Barat; *Interaksi Kebangsaan: pembauran perspektif generasi muda*, disampaikan pada Farum Komunikasi dan Konsultasi Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda; *Tarekat Sosial: fungsi sosial ajaran tarekat di Minangkabau*, disampaikan pada Seminar Internasional “Serumpun IV” Universitas Hasanuddin (UNHAS) – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Pengabdian dalam bidang akademik juga diimbangnya dengan pengabdian pada tugas-tugas struktural kelembagaan di IAIN Imam Bojol Padang, khususnya pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniiasi. Dia pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan BPI tahun 2000-2002; Sekretaris BP KKN IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2002-2003; Sekretaris Jurusan PMI tahun 2004-2005, Ketua Jurusan PMI 2009-2012, dan mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2012 sampai sekarang.

Penulis juga aktif pada beberapa organasiasi sosial, keagamaan dan kepemudaan di Sumatera Barat, diantaranya; Sekretaris Pemuda Tarbiyah Islamiyah Provinsi Sumatera Barat tahun 2001-2007, Wakil Sekretaris Gerakan Kerjasama Umat Islam MUI Provinsi Sumatera Barat tahun 2002-2005, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat tahun 2003-2007 dan 2007-2010, Sekretaris Pengurus Daerah Tarbiyah Islamiyah Provinsi Sumatera

Barat tahun 2007-2011, Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tahun 2010 sampai sekarang, dan Wakil Sekretaris MUI Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 sampai sekarang.